

**PENGARUH PERSEPSI KINERJA PEMERINTAH
TERHADAP PARTISIPASI DIMEDIASI OLEH
KEPERCAYAAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
di Provinsi Kalimantan Utara)**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister



Oleh

ANGGA ASFAN CANDRA

NIM. 216030101111039

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS

**PENGARUH PERSEPSI KINERJA PEMERINTAH TERHADAP
PARTISIPASI DIMEDIASI OLEH KEPERCAYAAN
MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
di Provinsi Kalimantan Utara)**

Oleh :

**ANGGA ASFAN CANDRA
NIM. 216030101111039**

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 8 Agustus 2024
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19670905 198601 1 002

Anggota



Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA
NIP. 19711013 200003 2 001

Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG
NIP. 198106012005011005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Adimistrasi
Universitas Brawijaya



Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D.
NIP. 196702171991031010

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 8 Agustus 2024



Angga Asfan Candra
NIM. 216030101111039



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
SEKOLAH PASCASARJANA

24 0347 T



Nomor: 000028/UN10.F4001/B/DL.07.05/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Nama : Angga Asfan Candra
NIM : 216030101111039
Program Studi : Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas : Universitas Brawijaya

Dengan Judul Tesis

Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi. (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online pada tanggal **29 Juli 2024** dan dinyatakan **bebas plagiasi** dengan kriteria toleransi $\leq 5\%$.

Malang, 31 Juli 2024
Ketua Badan Penerbitan Jurnal

Prof. Setyo Tri Wahyudi, SE., M.Ec., Ph. D.
NIP. 19810702200501 1 002



Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A.
NIP. 19710111199802 1 001



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI
Nomor: 000028/UN10.F4001/B/DL.07.05/2024

Direktur Pascasarjana Universitas Brawijaya menyatakan bahwa Tesis:

Nama : Angga Asfan Candra
NIM : 216030101111039
Judul : Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi. (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)
Program Studi : Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi <5%, dan dinyatakan bebas dari plagiasi (Rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

31 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.Si., M.A.
NIP. 19710111 199802 1 001

Tembusan

1. Ketua Program Studi yang bersangkutan
2. Pembimbing/Promotor

HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI

Judul Tesis : Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi.
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)

Nama Mahasiswa : Angga Asfan Candra

NIM : 216030101111039

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

Anggota : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG

Dosen Penguji 2 : Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP., Ph.D

Tanggal Ujian :

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada
Allah SWT sebagai rasa syukur (Alhamdulillah)
Mama dan Papa tercinta,
Adik-adikku ter sayang,
Partner hidup 24/7 yang belum dipertemukan,
Teman-teman di FIA UB

HALAMAN RIWAYAT HIDUP

Angga Asfan Candra, lahir di Malang - Jawa Timur pada tanggal 28 November 1988, anak dari Mulyono dan Riwati., S.pd. Jenjang SD dihabiskan di Sumberpucung - Malang, melanjutkan pendidikan SMP di Sumberpucung sampai dengan SMK berpindah di Singosari, lulus SMK tahun 2007, melanjutkan pendidikan D-IV program studi Teknik Informatika Departemen Teknik Informatika di PENS-ITS Surabaya sampai dengan 2011. Mulai berkarir sebagai ASN pada tahun 2015, dengan penempatan kerja di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini. Kemudian melanjutkan program magister dengan program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya pada tahun 2021.

Malang, Agustus 2024
Peneliti,

Angga Asfan Candra

HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Terwujudnya tesis ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku penguji.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS dan Ibu Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teoritis maupun moril, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP, MMG dan Bapak Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP., Ph.D selaku dosen penguji, serta Bapak dan Ibu Pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
5. Orangtua peneliti dan adek peneliti, Mulyono dan Riwati S.pd, serta Gazela Gata Famala dan Alfian Ananda Putra, yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi peneliti selama penyusunan tesis ini.

6. Keluarga Besar Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Kepada Pusbindiklatren Bappenas yang telah memfasilitasi dana pendidikan dan *living allowance* kepada peneliti sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan magister secara lancar.
8. Sahabat seperjuangan peneliti, Kelas Reguler dan Afirmasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2021 dan 2022 dan Teman-teman seangkatan Magister Administrasi Publik 2022 yang telah memberikan dukungan penuh dan menjadi diskusi peneliti, dan bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Malang, Agustus 2024

Peneliti,

Angga Asfan Candra

RINGKASAN

Angga Asfan Candra, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, **Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi. (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)**; Komisi Pembimbing: Ketua : Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, Anggota: Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA.

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang memengaruhi tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dan kebijakan. Hal ini dikenal sebagai Proses deliberatif yang merupakan suatu pendekatan dalam kebijakan publik yang diyakini oleh banyak ahli dapat membawa keberhasilan kebijakan publik. Kunci dari proses deliberatif adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah yang harus mengarah pada demokrasi berkualitas tinggi. Kebijakan deliberatif ini disusun berdasarkan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan warga melalui pembahasan bersama sebelumnya. Proses deliberatif ini, sejalan dengan amanah yang telah tertuang di Undang-undang cipta kerja dan Undang-undang Jasa Konstruksi yang mendorong penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam upaya sebagai lokomotif pembinaan jasa konstruksi yang mengamanatkan kewenangan pemerintah mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) pengaruh variabel kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi, (2) pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi, (3) pengaruh kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi dan (4) peran mediasi dari kepercayaan masyarakat jasa konstruksi antara variabel kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan jenis penelitian *explanatory research*. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara. Populasi penelitian ini yakni masyarakat jasa konstruksi yang diwakili pada forum jasa konstruksi yang terdiri berbagai unsur yang merepresentasikan masyarakat jasa konstruksi. Pengambilan metode sampel jenuh. Data dianalisis menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan *Partial Least Squares* (PLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji memiliki pengaruh signifikan. Persepsi kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam kegiatan

pembinaan jasa konstruksi. Persepsi atas kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi signifikan memediasi hubungan antara persepsi atas kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah secara efektif menjaring harapan masyarakat jasa konstruksi melalui survei kepuasan yang rutin, menerima kritik dan saran, serta menindaklanjuti hasil survei, kritik, dan saran tersebut untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat jasa konstruksi.

Kata Kunci : *Forum Jasa Konstruksi, Masyarakat jasa Konstruksi, Kinerja Pemerintahan, Kepercayaan, Partisipasi Masyarakat*

SUMMARY

Angga Asfan Candra, Graduate Program, Brawijaya University, Malang, **The Effect of Perceptions of Government Performance on Participation Mediated by Community Trust in Construction Services: A Case Study of the Implementation of Construction Services in North Kalimantan Province.**; Supervisor : Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, and Co-Supervisor : Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA.

Trust is a key element in the relationship between the government and the community, affecting the level of participation and involvement of the community in various programs and policies. This is known as the deliberative process, an approach to public policy that many experts believe can lead to successful public policy outcomes. The key to the deliberative process is public participation in government policy making and implementation, which should lead to high-quality democracy. This deliberative policy is formulated based on the results of joint decisions between the government and citizens through prior discussions. This deliberative process aligns with the mandate contained in the work copyright law, which encourages strengthening the role of the construction services community as a driver of construction services development. It mandates the government's authority to include the construction services community.

This study aims to examine (1) the effect of government performance on public participation in construction services, (2) the effect of government performance on public trust in construction services, (3) the effect of public trust in construction services on public participation in construction services, and (4) the mediating role of public trust in construction services between government performance and public participation in construction services.

The research approach used is a quantitative approach, specifically explanatory research. The research was conducted purposively at the Public Works, Spatial Planning, Housing, and Settlement Areas Office of North Kalimantan Province. The population of this study is the construction service community, represented in the construction service forum, which consists of various elements of the community. A saturated sampling method was employed. Data were analysed using Structural Equation Modelling (SEM) techniques with Partial Least Squares (PLS)

The results showed that all tested variables had a significant effect. Perceptions of government performance have a positive and significant effect on the participation of the construction service community in construction service guidance activities. Perceptions of government performance have a positive and significant effect on public trust in construction services. Trust within the construction services community has a positive and significant effect on community

participation in construction services. Additionally, trust within the construction services community significantly mediates the relationship between perceptions of government performance and community participation in construction services.

Based on these findings, it is recommended that the government effectively capture the expectations of the construction service community through regular satisfaction surveys, consider criticism and suggestions, and follow up on survey results, criticisms, and suggestions to improve performance and enhance trust within the construction service community.

Keywords: *Construction Services Forum, Construction Services Society, Government Performance, Trust, Public Participation*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyajikan proposal tesis yang berjudul **Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi. (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)**. Di dalam tulisan ini, disajikan pembahasan mengenai Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh variabel kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi, pengaruh kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi, pengaruh kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi dan peran mediasi dari kepercayaan masyarakat jasa konstruksi antara variabel kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Penulis menyadari sepenuhnya dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan demi penyempurnaan tesis ini agar dapat bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Malang, Agustus 2024
Penulis,

Angga Asfa Candra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian	19
1.4. Manfaat Penelitian	19
1.4.1. Manfaat Akademik	19
1.4.2. Manfaat Praktis	20
1.5. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1. Penelitian Terdahulu.....	22
2.2. Kebijakan Publik	34
Demokrasi dan Kebijakan Deliberatif	36
2.3. Teori Governance	43
2.4. Kepercayaan terhadap Pemerintah	47
2.4.1 Tujuan Kepercayaan	47
2.4.2 Indikator Kepercayaan	49
2.5. Partisipasi	50

2.5.1 Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	50
2.5.2 Tingkatan Partisipasi.....	52
2.5.3 Indikator Persepsi Partisipasi dalam Pendekatan Kebijakan Publik....	56
2.6. Kinerja Pemerintah	57
2.6.1 Konsep Persepsi Kinerja Pemerintah.....	57
2.6.2 Tujuan Persepsi Kinerja Pemerintah	57
2.6.3 Indikator Kinerja Pemerintah	62
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....	64
3.1. Kerangka Konsep Penelitian.....	64
3.2. Hipotesis Penelitian.....	66
BAB IV METODE PENELITIAN	69
4.1. Pendekatan Penelitian.....	69
4.2. Lokasi Penelitian.....	69
4.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	70
4.3.1 Variabel.....	70
4.3.2 Definisi Operasional Variabel (DOV)	72
4.4. Skala Pengukuran.....	79
4.5. Populasi.....	80
4.6. Sumber Data.....	85
4.7. Metode Pengumpulan Data	86
4.8. Metode Analisis Data.....	87
4.8.1 Analisis Statistik Deskriptif	87
4.8.2 Analisis SEM (<i>Structural Equation Modelling</i>)	89
4.8.2.1 Model Pengukuran atau <i>Outer Model</i>	91
4.8.2.2 Model Struktural atau <i>Inner Model</i>	94
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	99
5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	99
5.1.1 Provinsi Kalimantan Utara.....	99
5.1.1.1 Kondisi Penduduk	101
5.1.1.2 Keadaan Perekonomian.....	104
5.1.2 Gambaran Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara.....	106
5.2. Karakteristik Umum Responden.....	115
5.2.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	115

5.2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia	116
5.2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Sebaran Domisili	117
5.2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.	118
5.2.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	120
5.2.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan yang diambil.....	121
5.2.7 Distribusi Responden Berdasarkan Sertifikasi yang dimiliki.....	122
5.2.8 Distribusi Responden Berdasarkan Unsur yang diwakili.....	123
5.3. Analisis Statistik Deskriptif.....	124
5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah (X)	124
5.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepercayaan Masyarakat (Z) ...	129
5.3.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)	135
5.4. Pengujian Hasil Analisis SEM (<i>Structural Equation Modelling</i>)	139
5.4.1 <i>Outer Model</i>	139
5.4.1.1 Uji Reliabilitas	140
5.4.1.2 Uji <i>Internal Consistency Reliability</i>	143
5.4.1.3 Uji <i>Convergent Validity</i>	144
5.4.1.4 Uji <i>Discriminant Validity</i>	145
5.4.1.5 Uji Kolinearitas.....	148
5.4.2 <i>Inner Model</i>	150
5.4.2.1 Analisis <i>Higher-Order Model</i>	152
5.4.2.2 Uji Signifikan dan Relevansi Koefisien Jalur	157
5.4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	164
5.5. Pembahasan.....	165
5.5.1 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi.....	167
5.5.2 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi.....	171
5.5.3 Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi.....	175
5.5.4 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi.....	178
BAB VI	182

KESIMPULAN DAN SARAN.....	182
6.1 Kesimpulan	182
6.2 Saran	184
DAFTAR PUSTAKA.....	189
LAMPIRAN.....	197

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dengan Tenaga Ahli Konstruksi Tersertifikasi	9
1.2.	Tabel Progres Pembentukan Bidang dan Seksi Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara	17
1.3.	Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	17
2.1.	Penelitian Terdahulu	32
3.1.	Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu.....	68
4.1.	Definisi Operasional Variabel Penelitian (DOV)	75
4.2.	Skala Likert.....	80
4.3.	Dasar Interpretasi Skor Rata – rata dalam Variabel Penelitian.....	88
4.4.	Prinsip Perbedaan SEM & PLS-SEM	90
4.5.	Aturan Praktis Untuk Penilaian Inner Model.....	95
5.1.	Luas Daerah Provinsi Kalimantan Utara	100
5.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara	101
5.3.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2020 – 2024.....	102
5.4.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023.....	109
5.5.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kualitas Pelayanan Pemerintah	124
5.6.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kompetensi Pegawai.....	125
5.7.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Etika Pegawai.....	127
5.8.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Disposisional ...	129
5.9.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Institusional.....	131
5.10.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Interpersonal....	133
5.11.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Penerimaan pelayanan.....	135
5.12.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal.....	137
5.13.	Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah.....	140
5.14.	Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Masyarakat	142
5.15.	Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat.....	143
5.16.	Uji Internal Consistency Reliability	143
5.17.	Uji Internal Consistency Reliability	145
5.18.	Discriminant Validity Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah	146
5.19.	Discriminant Validity Variabel Kepercayaan Masyarakat.....	147
5.20.	Discriminant Validity Variabel Partisipasi Masyarakat	147
5.21.	Uji Kolinearitas Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah	148
5.22.	Uji Kolinearitas Variabel Kepercayaan Masyarakat.....	149
5.23.	Uji Kolinearitas Variabel Partisipasi Masyarakat	150

5.24. Pengaruh Langsung.....	157
5.25. Uji Pengaruh Signifikan Pengaruh Tidak Langsung	160
5.26. F Square.....	161
5.27. Uji Koefisien Determinasi	164
5.28. Summary	181

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Perkembangan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	11
1.2.	Jumlah Perusahaan Konstruksi di Region Kalimantan	12
1.3.	Persentase Pengangguran pada Tingkat Perguruan Tinggi di Region Kalimantan.....	13
1.4.	Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk di Region Kalimantan	14
1.5.	Tingkat Ketidakaktifan Tenaga Kerja	15
2.1.	DIAD Network Dynamic.....	37
2.2.	Tingkat Partisipasi.....	53
2.3.	Pengukuran Hasil Kebijakan.....	60
3.1.	Kerangka Konsep Penelitian.....	65
3.2.	Model Hipotesis	66
5.1.	Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan	99
5.2.	Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara	102
5.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022– 2023.....	103
5.4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kalimantan Utara	104
5.5.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi dan PDRB Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019-2023	107
5.6.	Nilai dan Share Sektor Konstruksi pada PDRB Provinsi Kalimantan Utara (Triliun & persen), 2019-2023	107
5.7.	Sarana Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara	110
5.8.	Jumlah Jurusan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara.....	111
5.9.	Pertumbuhan BUJK tahun 2016 - 2022.....	112
5.10.	Persentase Keanggotaan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	113
5.11.	Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi *terbitan LPJK.....	114
5.12.	Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi *terbitan LSP.....	115
5.13.	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	116
5.14.	Distribusi Responden Berdasarkan Usia	116
5.15.	Distribusi Responden Berdasarkan Sebaran Domisili	117
5.16.	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	118
5.17.	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	119
5.18.	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	120
5.19.	Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan yang diambil.....	121
5.20.	Distribusi Responden Berdasarkan Sertifikasi yang dimiliki	122
5.21.	Distribusi Responden Berdasarkan Unsur yang diwakili	123
5.22.	Model Pengukuran Penelitian PLS SEM	139
5.23.	Uji Model Struktural.....	151
5.24.	Prosedur Analisis Mediasi.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Jasa konstruksi sesungguhnya merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi dalam pembangunan nasional, karena jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (Panjaitan, 2022). Pada wilayah penyedia jasa juga menjadi pertemuan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi itu sendiri diantaranya pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan jasa konstruksi. Dalam mengefektifkan kerja sama dari pelaku usaha, pekerja, dan rantai pasok pemerintah harus memiliki kebijakan yang dapat mengatur hubungan tersebut. Kebijakan pemerintah ini merupakan upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meminimalkan ketimpangan antar wilayah dan antar kelompok sosial yang tertuang dalam komitmen mewujudkan visi dan misi Presiden RI melalui pembangunan infrastruktur.

Kebijakan publik merupakan sebuah aktivitas pemerintah dalam memecahkan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Permasalahan yang timbul dalam masyarakat dapat dikatakan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Diharapkan Kebijakan publik hadir sebagai respons dari pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan serta dapat berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan

inklusif. Kebijakan publik diharapkan selalu beradaptasi dan terus diperbaharui agar tetap efektif dan efisien guna mengikuti perkembangan jaman demi memastikan relevansinya dalam mengatasi permasalahan yang muncul, seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan.

Proses deliberatif merupakan suatu pendekatan dalam kebijakan publik yang diyakini oleh banyak ahli dapat membawa keberhasilan kebijakan publik. Kunci dari proses deliberatif adalah partisipasi masyarakat dalam pengambilan dan implementasi kebijakan pemerintah yang harus mengarah pada demokrasi berkualitas tinggi (Holum, 2022). Kebijakan deliberatif ini disusun berdasarkan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan warga melalui pembahasan bersama sebelumnya. Hajer dan Wageenar (2003: 7) menyebutkan bahwa pendekatan deliberatif dalam kebijakan publik menekankan penyelesaian masalah lokal secara kolektif, pragmatis, partisipatif, dengan kesadaran bahwa banyak masalah yang terlalu kompleks, terlalu kontroversial, dan terlalu tidak stabil untuk memungkinkan pengaturan yang skematis dan terpusat.

Relevansi kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pandangan dari sejumlah kecil individu atau kelompok kepentingan. Hal ini memberikan legitimasi demokratis pada kebijakan yang diterapkan.

Kebijakan publik sendiri menentukan kelangsungan banyak organisasi masyarakat dan pemerintah, hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang ada (Holum, 2022; Dryzek, 2000; Innes & Booher, 2000). Kebijakan publik yang diambil

secara deliberatif disusun berdasarkan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan warga melalui pembahasan bersama. Hajer dan Wageenar (2003: 7) menyebutkan bahwa pendekatan deliberatif dalam kebijakan publik menekankan penyelesaian masalah lokal secara kolektif dan partisipatif. Kebijakan yang bersifat deliberatif memerlukan partisipasi seluruh aktor yang terlibat untuk membentuk kebijakan yang tepat.

Dalam penyelesaian masalah dan penyusunan kebijakan deliberatif sangat diperlukan partisipasi baik dari pemerintah dan juga masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan diberbagai tingkatan memberikan umpan balik bagi pemerintah, hal ini dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dan kepuasan masyarakat (Mizrahi et al, 2009). Hal ini juga berlaku sebaliknya sesuai dengan (Putnam, 1993) menyatakan bahwa kinerja pemerintah yang efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

Partisipasi masyarakat erat juga kaitannya dengan kepercayaan masyarakat dan kinerja pemerintah. Para ahli (lihat Bouckaert & van de Walle, 2003; Christensen & Lægreid, 2005; Morgeson & Petrescu, 2011) melihat kepercayaan kepada pemerintah tidak lepas dari bagaimana warga melihat kinerja pemerintah. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja dan kepercayaan menunjukkan pengaruh signifikan, jika masyarakat merasakan kepuasan atas kinerja pemerintah, masyarakat cenderung menghargai kompetensi pemerintah. Oleh karena itu, kepuasan terhadap kinerja yang diberikan pemerintah ini membentuk kepercayaan masyarakat (Kumlin, 2002; Rothstein & Steinmo, 2002). Buruknya kinerja pemerintah akan melemahkan kepercayaan masyarakat bahwa para birokrat tidak bekerja demi kepentingan mereka dan negara (Meer, 2017). Misalnya Dalton (2004) menegaskan bahwa jika masyarakat tidak puas dengan

kinerja pemerintah, maka mereka akan tidak percaya terhadap rezim tersebut. Sehingga mengurangi dukungan terhadap pemerintah. Hal ini juga dipertegas oleh (Caemmerel, 2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan dan partisipasi pada sektor publik dapat diprediksi melalui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan sendiri memiliki hubungan erat dengan partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tergantung kepada penumbuhan kepercayaan dan identifikasi masyarakat mengenai pelayanan publik yang baik secara konsisten

Menurunnya tingkat kepercayaan kepada pemerintah di banyak negara OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*), menimbulkan tantangan bagi kebijakan di tahun-tahun mendatang (OECD, 2013). Kepercayaan menyebabkan melegitimasi tindakan pemerintah dan menciptakan kondisi yang mendukung para *stakeholder*. Tanpa kepercayaan, pengalaman-pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan melibatkan diri mereka untuk berpartisipasi pada program kegiatan pemerintah (Caemmerel, 2017). Hal ini dipertegas pada Nulhusna, *et al.* (2017) yang menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat dalam penggunaan *E-government* yang handal memberi dampak yang signifikan dalam berkelanjutan penggunaan pelayanan serta penyebarluasan informasi yang positif yang merefleksikan partisipasi masyarakat. Nulhusna, *et al* (2017) menuliskan bahwa kepercayaan sebagai *variable* mediasi dapat diukur melalui 3 dimensi yaitu kepercayaan disposisional, Institusional, dan interpersonal. Hal ini dapat diartikan bahwa kepercayaan kepada seseorang, institusi, dan hubungan antar sesama dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, 3 dimensi kepercayaan memberikan pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Pada praktik di lapangan secara empiris dapat dilihat bahwa kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah terkhusus jasa konstruksi dapat ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-undang No. 18 Tahun 1999, dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah akan lebih banyak dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi dengan melibatkan masyarakat jasa konstruksi. Sehingga pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi. Dengan kata lain, kunci daya saing sektor konstruksi nasional ada di tangan pemerintah daerah terutama untuk menghadapi persaingan global. Ini sejalan dengan keterlibatan masyarakat jasa konstruksi pada proses pengambilan keputusan yang efektif, *up to date*, serta dapat menjawab tantangan global yang semakin dinamis dan cepat. Ditambah dengan lahirnya Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU tentang Cipta Kerja) yang berdampak juga pada sektor jasa konstruksi. Dampak dari terlahirnya UU cipta kerja ialah penguatan masyarakat jasa konstruksi, peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas serta integrasi data jasa konstruksi. Diharapkan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi dapat tercapai, yaitu mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi (baik partisipasi yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan pemanfaatan hasil penyelenggaraan jasa konstruksi), maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum (Panjaitan, 2022). Hal ini merupakan implementasi dari kebijakan deliberatif dimana masyarakat ikut serta

baik secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengambilan kebijakan publik.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPR-Perkim) yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam urusan sektor jasa konstruksi sesuai Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah di ubah oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 52 Ketentuan Pasal 7. Sesuai dengan hal tersebut wewenang pemerintah daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada sub-urusan jasa konstruksi meliputi: penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Sebagaimana dimaksud dengan melakukan penyelenggaraan pembinaan kepada tenaga kerja konstruksi yang diikuti oleh perseorangan maupun badan usaha/lembaga. Pembinaan dilakukan dengan cara menjalin kerja sama dengan penyedia jasa konstruksi, memberikan bimbingan teknis, seminar/sosialisasi dan pelatihan uji kompetensi, serta mengadakan forum jasa konstruksi (FJK).

Guna mendorong peran masyarakat jasa konstruksi aktif dalam pembinaan di sektor jasa konstruksi sesuai PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi (FJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Forum jasa

konstruksi (FJK) memiliki manfaat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi serta meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembuatan kebijakan di bidang jasa konstruksi.

Menurut UU No. 18 Tahun 1999, Forum jasa konstruksi (FJK) adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen dan mandiri. Forum jasa konstruksi (FJK) memberikan wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat jasa konstruksi yang dimaksud ialah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, mitra usaha jasa konstruksi, dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.

Dengan keberagaman unsur masyarakat dalam jasa konstruksi ditambah dengan berbagai kepentingan yang ada sehingga pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih memandang bahwa setiap unsur memiliki kedudukan yang sama. Peran pemerintah dalam hal ini terus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif karena masyarakat jasa konstruksi itu sendirilah yang tahu dan paham apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi urgensi dalam suatu pengambilan keputusan. Sehingga kebijakan pemerintah yang diambil merupakan representatif dari aspirasi dan rembuk diskusi dari berbagai unsur kepentingan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan Carl J. Friedrich (Suwitri, 2008) yang mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat di atas dapat diambil garis besar bahwa pengambilan kebijakan harus memberi ruang kepada publik untuk proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Sekarang bersumber dari pada konsepsi “ruang publik” (*public sphere*) yang artinya cara pengambilan keputusan yang menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog *stakeholder* (Fitriana *et al.*, 2020).

Kebijakan yang bersifat deliberatif memerlukan partisipasi seluruh aktor yang terlibat untuk membentuk kebijakan yang tepat. Partisipasi para aktor ini sangat penting sejak tahap pertama siklus kebijakan: penetapan agenda (Birkland, 2020). Pendekatan deliberatif terhadap kebijakan publik menekankan penyelesaian masalah lokal secara kolektif, pragmatis, partisipatif, dan menyadari bahwa banyak permasalahan yang terlalu rumit, terlalu kontroversial, dan terlalu tidak stabil untuk memungkinkan adanya regulasi yang bersifat skematis dan terpusat. Proses deliberatif ini, sejalan dengan amanah yang telah tertuang di Undang-undang cipta kerja yang mendorong penguatan peran masyarakat jasa konstruksi dalam upaya sebagai lokomotif pembinaan jasa konstruksi yang mengamanatkan kewenangan pemerintah mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi

Undang - Undang Jasa Konstruksi dalam penerapannya telah menimbulkan berbagai permasalahan dari persyaratan usaha bahwa badan usaha sebagai pelaku wajib mempunyai sertifikat badan usaha dan sertifikat keahlian/keterampilan bagi pelaku, di mana semua sertifikat tersebut wajib didaftarkan atau diregistrasi pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) (Rachenjantono, 2010: 21). Dalam pelaksanaan sertifikasi masih dari kata

jauh dari yang seharusnya tenaga kerja konstruksi seluruh Indonesia wajib tersertifikasi begitu pula di Provinsi Kalimantan Utara. Sesungguhnya sesuai yang telah disampaikan di atas, pemerintah baik di pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi. Salah satu tanggung jawab dan kewenangan ini adalah memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bidang jasa konstruksi. Menteri dan kepala daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi kompetensi kerja. Namun, pada kenyataannya alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam pembiayaan sertifikasi kompetensi kerja ini masih jauh dari kebutuhan lapangan.

Berdasarkan data dari Kompas (2020), dari sejumlah 134.399 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar, ternyata sebanyak 110.146 perusahaan atau 82% merupakan usaha kecil jasa konstruksi. Sedangkan berdasarkan data dari CNN (2020) Indonesia, dari keseluruhan tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor usaha konstruksi yang berjumlah 5,3 juta orang, ternyata baru 512.787 orang atau 9,67 % yang bersertifikat kompetensi kerja.

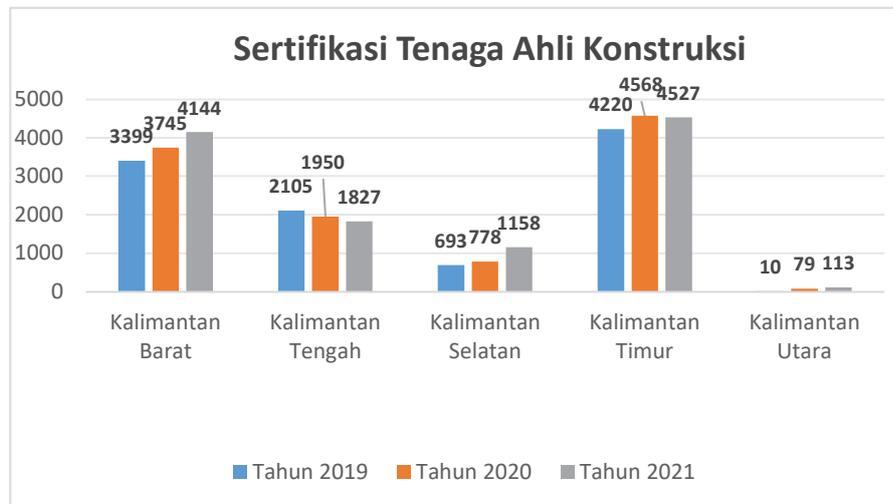
Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dengan Tenaga Ahli Konstruksi Tersertifikasi

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Tersertifikasi	Persentase (%)
Aceh	140.731	9.711	6,90
Sumatera Utara	390.728	3.733	0,96
Sumatera Barat	132.230	8.470	6,41
Riau	155.111	42.644	27,49
Jambi	84.461	2.893	3,43
Sumatera Selatan	222.616	5.194	2,33
Bengkulu	48.951	894	1,83
Lampung	251.010	1.774	0,71
Kep. Bangka Belitung	31.790	6.432	20,23
Kepulauan Riau	72.193	49.523	68,60
D.K.I. Jakarta	197.229	32.931	16,70
Jawa Barat	1.590.019	14.717	0,93
Jawa Tengah	1.477.931	7.013	0,47

Provinsi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Tersertifikasi	Persentase (%)
D.I. Yogyakarta	145.447	2.381	1,64
Jawa Timur	1.349.931	12.404	0,92
Banten	358.028	6.840	1,91
Bali	155.461	1.878	1,21
Nusa Tenggara Barat	174.886	1.690	0,97
Nusa Tenggara Timur	135.671	2.529	1,86
Kalimantan Barat	150.386	4.144	2,76
Kalimantan Tengah	64.418	1.827	2,84
Kalimantan Selatan	104.986	1.158	1,10
Kalimantan Timur	99.693	4.527	4,54
Kalimantan Utara	17.166	113	0,66
Sulawesi Utara	88.368	12.311	13,93
Sulawesi Tengah	89.644	4.321	4,82
Sulawesi Selatan	268.406	9.140	3,41
Sulawesi Tenggara	86.567	1.669	1,93
Gorontalo	29.746	6.469	21,75
Sulawesi Barat	37.368	3.221	8,62
Maluku	35.747	1.902	5,32
Maluku Utara	31.718	626	1,97
Papua Barat	27.936	1.021	3,65
Papua	47.196	1.586	3,36

Sumber Data : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (3 Juli 2020)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi yang memiliki persentase paling kecil pemenuhan tenaga ahli konstruksi dari semua provinsi di Indonesia di luar dari provinsi yang baru terbentuk. Di mana jumlah tenaga kerja konstruksi berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 17.166 orang namun yang memiliki sertifikasi tenaga ahli konstruksi hanya sebesar 113 orang atau hanya sekitar 0,66 % jauh dari rata-rata nasional sebesar 7,24 %. Hal ini mencerminkan belum terlihatnya peran asosiasi profesi, lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan Pemerintah daerah dalam melakukan percepatan sertifikasi khususnya sertifikasi keahlian yang merupakan tanggung jawab di bawah naungan pemerintah provinsi sebagai pembina jasa konstruksi cakupan provinsi.



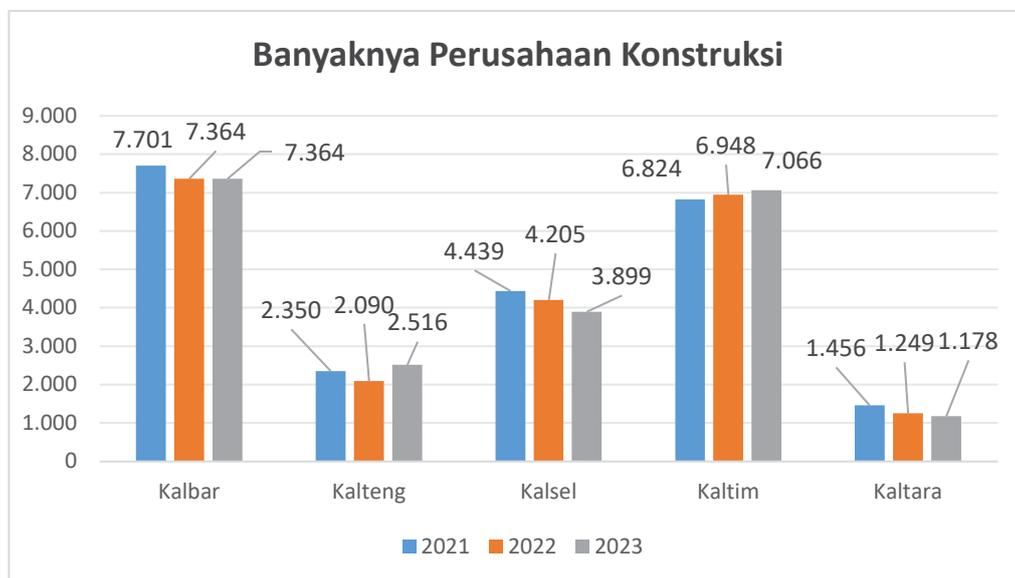
Gambar 1.1. Perkembangan Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi

Sumber : Olahan peneliti dari data Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (3 Juli 2020)

Dibandingkan dengan provinsi tetangga pulau kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara masih memiliki jumlah tenaga kerja ahli konstruksi yang terbilang sangat kecil, dari perkembangan dari tahun ke tahun *progres* peningkatan sertifikasi masih terbilang cukup minim. Hal ini perlu dilakukan peran asosiasi, badan usaha, perguruan tinggi dan unsur lain dalam proses percepatan sertifikasi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi tersertifikasi.

Hal ini sejalan dengan jumlah perusahaan konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara yang cukup relatif lebih kecil (gambar 1.2) dibandingkan dengan Provinsi pada regional Kalimantan. Hal ini tidak menjadi salah satu kekhawatiran karena Provinsi Kalimantan Utara masih terbilang cukup baru sehingga proses membantukan ekosistem jasa konstruksi akan dan terus berlangsung. Namun perlu kita garis bawahi bahwa angka tenaga ahli tersertifikasi yang terdaftar di kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI masih jauh dari angka perusahaan konstruksi yang tercatat. Pada (gambar 1.1) jumlah tenaga ahli konstruksi pada tahun 2021 tercatat sebanyak 113 orang sedangkan jumlah

perusahaan konstruksi tercatat sebanyak 1.456 perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan konstruksi tidak memiliki tenaga ahli tetap pada perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan konstruksi tersebut mengambil tenaga ahli tersertifikasi dari luar Provinsi Kalimantan Utara. Anomali seperti ini perlu segera diselesaikan dan perlunya partisipasi badan usaha dan asosiasi profesi bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan sertifikasi.



Gambar 1.2. Jumlah Perusahaan Konstruksi di Region Kalimantan
 Sumber : Olahan peneliti dari data BPS RI pada publikasi Konstruksi dalam angka (2023)

Perlu ada kajian mendalam dari berbagai unsur mengapa pertumbuhan tenaga kerja ahli tersertifikasi mempunyai *progres* yang sangat lambat dan faktor apa saja yang memengaruhi hal tersebut. Masalah-masalah tersebut hanya dapat dijabarkan oleh pelaku yaitu tenaga kerja itu sendiri yang diwakili oleh asosiasi profesi/serikat pekerja dan badan usaha yang biasanya diwakili oleh asosiasi badan usaha. Pemerintah dalam hal ini harus mendorong terciptanya ekosistem

jasa konstruksi yang baik, pengawasan dan stimulus yang tepat guna mempercepat proses sertifikasi yang sudah diamanatkan oleh UU.

Provinsi	Pendidikan Tinggi		
	Februari	Agustus	Februari
	2023	2023	2024
(1)	(8)	(9)	(10)
Kalimantan Barat	11,01	12,64	9,38
Kalimantan Tengah	19,64	13,35	19,46
Kalimantan Selatan	14,77	11,91	15,27
Kalimantan Timur	12,46	14,62	14,73
Kalimantan Utara	12,65	16,85	21,82

Gambar 1.3. Persentase Pengangguran pada Tingkat Perguruan Tinggi di Region Kalimantan

Sumber : BPS RI pada publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia (2024)

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa persentase pengangguran pada kalangan berpendidikan tinggi terlihat data trendnya meningkat pada Provinsi Kalimantan Utara, dimana pada bulan Februari 2023 angka pengangguran pada pendidikan tinggi sebesar 12.65 % dan ini terus meningkat di bulan Agustus 2013 sebesar 16.85 % dan terus meningkat pada bulan Februari 2024 sebesar 21.82 %. Pada Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Utara terlihat trend naik hampir 2 kali lipat, hal ini merupakan trend kenaikan tertinggi pada regional Kalimantan.

Dari data di atas dapat diasumsikan bahwa peningkatan pengangguran di kalangan pekerja berpendidikan tinggi bisa saja kurangnya pelatihan tambahan/sertifikasi yang diperlukan untuk bersaing dengan pekerja di luar daerah hal ini dilihat dari sangat kecilnya serapan tenaga ahli konstruksi tersertifikasi yang ada di Kalimantan Utara (Tabel 1.1).

Dalam hal yang lebih luas lagi dapat dilihat pada gambar 1.4 mengenai rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk dapat dilihat bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki rasio terkecil dari region Kalimantan yaitu sebesar

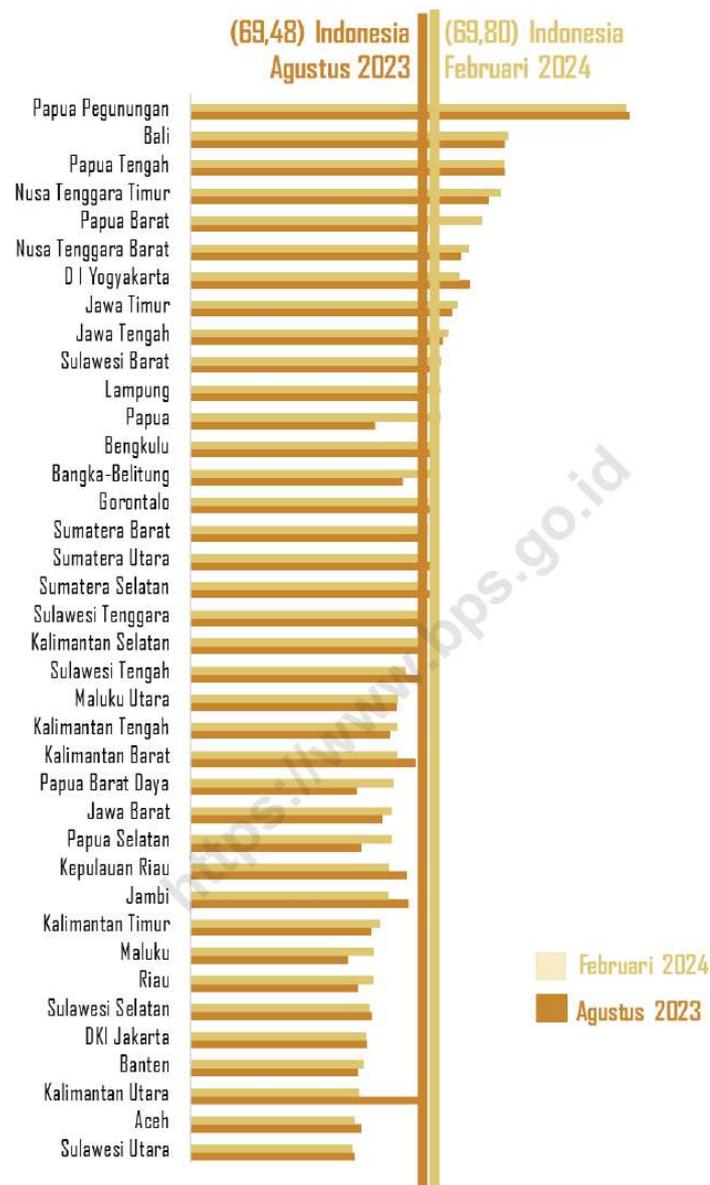
61,93. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata semua sektor pekerjaan memiliki rasio relatif lebih kecil kesempatan bekerja jika tinggal di Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu bisa dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau tenaga kerja lokal Kalimantan Utara tidak kompetitif dengan tenaga kerja luar. Dalam konteks tenaga kerja konstruksi perlunya sertifikasi dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pekerja konstruksi lokal Kalimantan Utara. Pembuatan program/kegiatan yang tetap sasaran oleh pemerintah perlu adanya peran masyarakat dari berbagai unsur sehingga partisipasi masyarakat sangat perlu dan penting dalam proses pengambilan kebijakan.

Provinsi	Februari 2023			Agustus 2023			Februari 2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kalimantan Barat	80,11	49,78	65,36	80,53	50,47	65,92	78,05	51,16	64,98
Kalimantan Tengah	82,83	48,01	66,12	81,64	45,87	64,42	82,61	46,76	65,34
Kalimantan Selatan	80,43	52,93	66,78	81,32	51,96	66,75	80,21	53,29	66,85
Kalimantan Timur	77,88	43,62	61,48	78,85	43,90	62,09	79,24	44,36	62,50
Kalimantan Utara	77,04	49,83	64,28	81,59	51,65	67,53	77,23	44,68	61,93

Gambar 1.4. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk di Region Kalimantan

Sumber : BPS RI pada publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia (2024)

Dilihat dari data BPS (gambar 1.5) Hasil survey Februari 2024 menunjukkan tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,20 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, terdapat sekitar 30 orang yang tidak aktif dalam pasar kerja. Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK—lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen. Perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurangi dengan TPAK (1–TPAK).



Gambar 1.5. Tingkat Ketidakaktifan Tenaga Kerja

Sumber : BPS RI pada publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia (2024)

Tiga provinsi dengan TPAK terendah pada Februari 2024 adalah Provinsi Sulawesi Utara (63,98 persen), Provinsi Aceh (64,15) dan Provinsi Kalimantan Utara (64,52 persen). Tingkat ketidakaktifan tenaga kerja dapat berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial. tingkat ketidakaktifan tenaga kerja yang tinggi berarti banyak individu yang tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja. Hal ini

dapat mengurangi *output* ekonomi keseluruhan, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan *underutilization* sumber daya manusia. Di samping itu berdampak pada penurunan Keterampilan dan pengalaman sehingga orang yang lama tidak bekerja dapat kehilangan keterampilan dan pengalaman yang relevan, membuat mereka lebih sulit untuk masuk kembali ke pasar kerja dan bersaing dengan pekerja lainnya. Guna mengantisipasi hal ini pemerintah perlu membuat kebijakan dan program yang komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dukungan kesehatan mental, dan insentif bagi perusahaan untuk merekrut dan mempertahankan pekerja. Hal ini bisa terjadi pada sektor jasa konstruksi jika semua unsur terlibat baik itu unsur pemerintah, unsur asosiasi profesi, unsur asosiasi badan usaha dan tidak kalah penting unsur bidang pendidikan.

Di samping itu, masalah lain yang muncul ialah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sendiri baru terbentuk pada tahun 2012, sedangkan bidang bina jasa konstruksi pada Dinas PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara baru terbentuk pada tahun 2018 dengan jumlah personil tidak lebih dari 10 PNS (tabel 1.3). Pada tataran Pemerintah kabupaten/kota juga belum terbentuk Bidang setara dengan eselon III yang menaungi bidang jasa konstruksi serta eselon IV yang belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini mengakibatkan tidak ada perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dalam melakukan kegiatan pelatihan/sertifikasi dan pembinaan jasa konstruksi. Dengan belum terbentuknya bidang dan seksi di kabupaten/kota mengakibatkan belum adanya anggaran yang dikhususkan dalam pembinaan jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota (Table 1.2).

Tabel 1.2. Tabel Progres Pembentukan Bidang dan Seksi Jasa Konstruksi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/ kota	Bidang Jasa Konstruksi (Eselon III)	Kasie (Eselon IV)	Keterangan
Provinsi	Sudah terbentuk	Sudah Terbentuk 2 Seksi (Eselon IV)	1 Seksi terkena penyederhanaan Birokrasi
Bulungan	Belum Terbentuk	Belum Terbentuk	-
Tarakan	Belum Terbentuk	1 Kasie di bawah bidang cipta karya	-
Nunukan	Belum Terbentuk	1 Kasie di bawah bidang tata ruang	-
Malinau	Belum Terbentuk	Belum Terbentuk	-
Tana Tidung	Belum Terbentuk	Belum Terbentuk	-

Sumber Data : Bidang Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023

Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

No.	Bidang	Jenis Jabatan		
		Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)	Pejabat Fungsional Umum
1	Sekretariat	4	1	15
2	Sumber Daya Air	2	1	12
3	Bina Marga	3	1	10
4	Cipta Karya	3	1	5
5	Tata Ruang dan Pertanahan	3	1	9
6	Jasa Konstruksi	3	1	6
7	Perumahan	1	3	11

Sumber Data : LAKIP Dinas PUPR-Perkim Kaltara 2023

Oleh karena itu, keterbatasan personil, ketidaktepatan anggaran, belum maksimal *progres* peningkatan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi ditambah belum terbentuknya perangkat daerah yang diamanatkan oleh undang-undang, menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kemungkinan belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam urusan

sektor jasa konstruksi. Sedangkan dalam pembuatan kebijakan deliberatif salah satunya bisa diwujudkan melalui Forum Jasa Konstruksi (FJK) yang bertujuan untuk menjalankan program pembangunan nasional diperlukan partisipasi yang dimediasi kepercayaan masyarakat agar terbentuk suatu kebijakan publik yang efektif dan efisien. Forum jasa konstruksi (FJK) menjadi perwujudan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, yaitu dengan memanfaatkan hak untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi, termasuk ide-ide atau evaluasi dalam pemecahan masalah yang kerap terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dimediasi oleh kepercayaan masyarakat. Maka peneliti mengambil Judul **“Pengaruh Persepsi Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi. (Studi Kasus Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- b. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat?
- c. Bagaimana pengaruh kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- d. Bagaimana pengaruh kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat di mediasi oleh kepercayaan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menghitung dan menganalisis kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat.
- b. Menghitung dan menganalisis kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat.
- c. Menghitung dan menganalisis kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat.
- d. Menghitung dan menganalisis kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dimediasi oleh kepercayaan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah, memperluas, dan memperdalam kajian/implikasi teoritis tentang tingkat partisipasi publik dalam bidang jasa konstruksi di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah, memperluas, dan memperdalam kajian/implikasi teoritis tentang persepsi kinerja pemerintah khususnya bidang jasa konstruksi di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat berguna untuk menambah, memperluas, dan memperdalam kajian/implikasi teoritis tentang arah hubungan antara kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat dan

efeknya terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi masukan kepada para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan garis besar dari penulisan karya ilmiah serta bertujuan untuk membantu pembaca mengetahui susunan keseluruhan dari penulisan ini. Adapun sistematika penelitian dalam penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang menyajikan penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang terdiri dari konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan peneliti dalam menyusun disertasi serta kerangka teori sebagai landasan dari penelitian ini. Teori yang digunakan di antaranya. Teori Kebijakan Publik, Teori Kebijakan Deliberatif, Teori *Governance*, Teori Partisipasi

Masyarakat, Teori Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah, dan Teori Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.

Bab III Metodologi Penelitian

Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Metode yang digunakan tersebut menyangkut jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan, juga dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian antara penelitian satu dengan penelitian lainnya yang relevan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji, yaitu:

1. Caemmerer, et al. (2017). *Public Service Satisfaction, Citizen Trust, and Participation - Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Academy of marketing Science World Marketing Congress*, 513-514.

Penelitian ini menguji bagaimana pengelolaan hubungan antara pelanggan dari sektor swasta dapat di adopsi oleh sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey sebanyak 1240 warga kota mengenai kepuasan, kepercayaan dan mengidentifikasi terhadap kotanya khususnya kepuasan warga terhadap anggota dewan, kepuasan pelayanan anggota dewan, hubungan antara partisipan dengan anggota dewan, kepercayaan warga, partisipasi politik, ketertarikan terhadap politik dan persepsi terhadap keberhasilan politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dan partisipasi pada sektor publik dapat diprediksi melalui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kepercayaan sendiri memiliki hubungan erat

dengan partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tergantung kepada penumbuhan kepercayaan dan identifikasi masyarakat mengenai pelayanan publik yang baik secara konsisten

2. Nulhusna, *et al.* (2017): *The relation of e-government quality on public trust and its impact towards public participation.* 1-20.

Dalam penelitian ini mengadopsi pandangan kepercayaan multidimensional, dan menyelidiki bagaimana kepercayaan multidimensional dipengaruhi oleh dimensi keberhasilan sistem informasi (IS), yaitu *e-Government*. Serta mengukur dampak kepercayaan terhadap keberlanjutan penggunaan *e-Government* dan *Electronic World of Mouth* (EWoM). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner kepada pengguna layanan *e-Government* di Indonesia. Sebuah sampel sebanyak 293 dianalisis menggunakan Pemodelan Persamaan Struktural (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi memiliki hubungan signifikan dengan kepercayaan, maka dapat disimpulkan kualitas informasi adalah faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan *e-Government*. Selain itu, kepercayaan multidimensional memiliki dampak signifikan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap partisipasi yang direfleksikan terkait niat penggunaan berkelanjutan dan eWoM.

3. Alsajjan, Bander. (2014). *Satisfaction-Trust Model: Developing Customer Satisfaction and Trust Indices for Mobile Service Providers in the UK.* 1088-1104.

Dalam penelitian ini menyelidiki dampak kepuasan, kepercayaan, dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan menggunakan model perilaku. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner di sebuah institusi akademik di Inggris, kuesioner di distribusikan pada kelas pascasarjana dan sarjana, lalu mendapatkan total 322 sampel. Kualitas servis berupa jaminan yang di definisikan sebagai “kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat” memiliki dampak signifikan pada kepercayaan, yang menjadi mediator utama terhadap loyalitas.

4. Romieke, *et al.* (2016). *How Differences in Perceptions of Own and Team Performance Impact Trust and Job Satisfaction in Virtual Teams*, 1-41

Penelitian ini memperlihatkan pentingnya memahami proses perbandingan sosial dalam tim virtual. Dengan menghubungkan teori perbandingan sosial dengan teori pertukaran sosial, penelitian ini mengidentifikasi bahwa proses perbandingan sosial tidak hanya mempengaruhi tingkat kepercayaan antar anggota tim, tetapi juga berdampak langsung pada tingkat kepuasan kerja mereka. Data penelitian ini diambil dari karyawan layanan lapangan teknis sebuah perusahaan telekomunikasi di Jerman, dengan mengumpulkan sebanyak 753 karyawan.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian sebelumnya dalam bidang teori perbandingan sosial dan pertukaran sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota tim yang merasa kinerja individu mereka lebih baik dibandingkan dengan persepsi kinerja tim secara keseluruhan menghasilkan ketidakpuasan dengan pekerjaan mereka dan memiliki

tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap tim mereka. Hasil ini menunjukkan perlunya indikator kinerja yang dapat dengan mudah dikomunikasikan dan dipahami oleh karyawan virtual untuk mempertahankan tingkat kepercayaan terhadap rekan tim dan kepuasan kerja mereka.

5. Sonali, et al. (2020). *Moderating effect of perceived trust on service quality – student satisfaction relationship: evidence from Indian higher management education institutions*, 1-26.

Penelitian ini menguji peran moderasi dari kepercayaan yang dirasakan dalam hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi faktor-faktor kualitas layanan yang berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa, mengajukan rekomendasi untuk perbaikan praktik pendidikan, dan menegaskan pentingnya kepercayaan dalam memoderasi hubungan antara kualitas layanan dan kepuasan mahasiswa. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari mahasiswa India yang belajar di berbagai institusi manajemen pendidikan tinggi, baik di sektor publik maupun swasta, di Delhi dan Wilayah Ibukota Nasional. Institusi-institusi ini adalah institusi terakreditasi dengan mahasiswa dari berbagai negara bagian di India. Penulis, yang berada di bidang pendidikan, memanfaatkan kontak profesional mereka untuk mengumpulkan data dari 14 institusi yang menjalankan program manajemen.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa kepercayaan yang dirasakan oleh mahasiswa terhadap institusi, yaitu keyakinan bahwa institusi akan bertindak sesuai dengan kepentingan mereka, memainkan peran moderasi

yang signifikan dalam hubungan antara kualitas layanan (SQ) dan kepuasan mahasiswa (SS). Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengakibatkan mahasiswa mengabaikan kelemahan dalam SQ, sementara kepercayaan yang rendah dapat memperburuk masalah bahkan dalam hal-hal yang sepele. Temuan ini menyoroti pentingnya kepercayaan dalam memengaruhi kepuasan mahasiswa, sebuah temuan yang konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.

6. Jiaming, *et al.* (2008). *Effects of innovativeness and trust on web survey participation*, 144-152.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam survei web. Khususnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh inovativitas web personal dan kepercayaan terhadap niat responden potensial untuk berpartisipasi dalam survei web. Selain itu, penelitian ini ingin menguji model yang mengintegrasikan Teori Perilaku Terencana dengan variabel kepercayaan *online* dan inovativitas web personal untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam partisipasi survei web secara lebih mendalam. Data penelitian diambil dari 142 partisipasi web survei.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sponsor dan inovativitas personal berperan langsung dalam membentuk sikap dan niat partisipasi responden terhadap web survey, tanpa memoderasi hubungan antara kontrol perilaku yang dirasakan (PBC) dan sikap dengan niat partisipasi. Integrasi kedua variabel ini ke dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) meningkatkan kemampuan model untuk

memprediksi niat partisipasi, menjelaskan sekitar 44% variasi dalam niat partisipasi. Temuan juga menunjukkan bahwa inovativitas personal web mempengaruhi PBC secara signifikan, sementara kepercayaan terhadap sponsor tidak berdampak pada PBC. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya membangun kepercayaan sebagai sponsor yang dapat meningkatkan partisipasi dalam web survei, serta mempertimbangkan inovativitas personal sebagai faktor yang mempengaruhi sikap dan kontrol perilaku dalam konteks penelitian survei online.

7. Marc, *et al.* (2013). *A Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe*, 131-155

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah kepercayaan politik adalah sumber yang diperlukan untuk partisipasi politik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan kompleks antara kepercayaan politik dengan berbagai bentuk partisipasi politik, baik yang terinstitusionalisasi maupun yang tidak, serta untuk memahami apakah kepercayaan politik mempengaruhi tingkat partisipasi politik secara keseluruhan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana kepercayaan politik dan efikasi politik saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku politik. Data penelitian ini berasal dari gelombang ketiga dari *European Social Survey* (ESS) tahun 2006.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan politik memiliki pengaruh kompleks terhadap partisipasi politik. Warga dengan tingkat kepercayaan politik yang tinggi cenderung lebih banyak terlibat dalam partisipasi politik terinkorporasi seperti pemilihan umum, sementara

mereka cenderung mengurangi partisipasi dalam bentuk non-terinkorporasi seperti demonstrasi. Interaksi antara kepercayaan politik dan pemahaman politik juga mempengaruhi pola partisipasi, di mana kepercayaan politik yang dipadukan dengan pemahaman politik lebih tinggi terkait dengan partisipasi politik yang lebih aktif. Temuan ini menegaskan bahwa rendahnya kepercayaan politik tidak selalu berarti alienasi dari sistem politik, tetapi mencerminkan perubahan struktural dalam cara warga berinteraksi dengan sistem politik, meskipun juga menimbulkan pertanyaan tentang representasi efektif pandangan warga dalam proses keputusan politik.

8. Quixian, *et al.* (2020). *Empirical Study on the Evaluation Model of Public Satisfaction With Local Government Budget Transparency: A Case From China*, 1-15

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menguji model Indeks Kepuasan Publik terhadap Transparansi Anggaran (*Budget Transparency Public Satisfaction Index*, BTPSI) di Tiongkok. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan publik terhadap transparansi anggaran dalam kebijakan Tiongkok. Dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan dan karakteristik dari informasi anggaran pemerintah lokal, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana tingkat transparansi anggaran memengaruhi persepsi publik dan dampaknya terhadap kepuasan mereka. Melalui pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modelling* (PLS-SEM), studi ini bertujuan untuk memberikan estimasi yang kuat dan mendalam terhadap hubungan antara transparansi anggaran dan kepuasan publik di Tiongkok,

dengan implikasi untuk reformasi pemerintahan dan pengembangan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini mengungkap faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi kepuasan publik terhadap transparansi anggaran pemerintah lokal di Tiongkok. Studi ini menemukan bahwa kualitas yang dirasakan dari transparansi anggaran secara positif dan signifikan berkorelasi dengan kepuasan publik. Faktor-faktor seperti kualitas informasi anggaran, metode akuisisi informasi anggaran, dan keterlibatan publik berpengaruh penting terhadap kualitas yang dirasakan ini. Selain itu, citra pemerintah juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan kepuasan publik, sementara harapan publik tidak terbukti berhubungan dengan kepuasan secara signifikan. Temuan ini memberikan panduan bagi pemerintah lokal dalam meningkatkan praktik pengelolaan anggaran dan memperkuat kepercayaan publik melalui kebijakan transparansi anggaran yang efektif.

9. S. Pavan, *et al.* (2017). *Influence of Trust and Participation in Decision Making on Employee Attitudes in Indian Public Sector Undertakings*, 1-13.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kepercayaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kepuasan kerja, komitmen afektif, dan komitmen kelompok di Perusahaan BUMN di India. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian yang ada terkait dengan komitmen afektif dan komitmen kelompok, serta peran mediasi kepuasan kerja dalam hubungan tersebut. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kepercayaan dan praktik partisipatif dalam manajemen pengambilan

keputusan dapat mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan di konteks unik PSUs India. Data penelitian ini mencakup informasi dari responden kategori manajerial dari empat organisasi skala besar yang diklasifikasikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di India, dengan total 780 partisipan.

Hasil penelitian ini menyajikan beberapa temuan penting terkait hubungan antara kepercayaan, kepuasan kerja, komitmen kelompok, dan komitmen afektif di BUMN India. Ditemukan bahwa kepercayaan antar karyawan berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan positif, yang berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja. Kepercayaan juga menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi komitmen kelompok, memfasilitasi interaksi sosial dan mengurangi ketidakpastian di antara karyawan. Namun, partisipasi dalam pengambilan keputusan tidak secara signifikan mempengaruhi komitmen kelompok, mungkin karena tantangan seperti distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dalam lingkungan partisipatif. Kepuasan kerja terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap komitmen kelompok dan komitmen afektif, menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang mendukung dan pengakuan terhadap kinerja berkontribusi pada identifikasi dan keterikatan karyawan terhadap kelompok mereka dan organisasi secara keseluruhan.

10. Marthe Holum. (2023). *Citizen Participation: Linking Government Efforts, Actual Participation, and Trust in Local Politicians*, 915-925.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan partisipasi warga dalam konteks

lokal di Norwegia. Penelitian bertujuan untuk memahami apakah upaya pemerintah lokal untuk meningkatkan partisipasi warga memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, serta sejauh mana partisipasi ini benar-benar mendorong keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengeksplorasi variasi dalam tingkat kepercayaan dan partisipasi di tingkat lokal, yang dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Dengan menganalisis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap literatur tentang administrasi publik dan teori demokrasi, khususnya dalam konteks pengelolaan krisis seperti yang diperlihatkan oleh pandemi COVID-19. Data penelitian ini terdiri dari dua survei nasional besar yang dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 di Norwegia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya partisipasi pemerintah lokal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan terhadap politisi lokal, terutama melalui efek sinyal yang menunjukkan niat politisi untuk bertindak demi kepentingan publik. Namun, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara upaya pemerintah lokal dan partisipasi aktual, menunjukkan bahwa efek positif yang diamati lebih cenderung disebabkan oleh sinyal-sinyal yang diberikan oleh inisiatif partisipasi tersebut daripada oleh peningkatan partisipasi yang nyata. Temuan ini memberikan implikasi bahwa mekanisme partisipasi mungkin tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, mungkin disebabkan oleh desain yang kurang tepat, pelaksanaan yang tidak efektif, atau strategi

komunikasi yang gagal untuk merangsang keterlibatan warga secara efektif.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Pendekatan Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sekarang
1.	Caemmerer , et al. (2017)	<i>Public Service Satisfaction, Citizen Trust, and Participation - Developments in Marketing Science:</i>	Kuantitatif	Kinerja Pemerintah (X), Kepercayaan Masyarakat (Y) Partisipasi (Z)	Perbedaan dengan penelitian yaitu lokus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang Jasa konstruksi, Instrumen Penelitian dan penggunaan metode analisis data PLS-SEM
2.	Nulhusna, et al. (2017)	<i>The relation of e-government quality on public trust and its impact towards public participation</i>	Kuantitatif dengan analisis SEM	E-Government Quality (X), Kepercayaan (Z), Partisipasi (Y)	kinerja pada penelitian tersebut diwujudkan pada kualitas layanan e-gov sedangkan kinerja pada penelitian peneliti lebih ke kebijakan dan program kerja, instrumen penelitian, lokus penelitian
3.	Alsajjan, Bander. (2014)	<i>Satisfaction-Trust Model: Developing Customer Satisfaction and Trust Indices for Mobile Service Providers in the UK</i>	Kuantitatif	Service Quality (X), Trust (Z), Satisfaction (Z). Loyalty (Y)	Kinerja pada penelitian tersebut diasosiasikan pada Service Quality sedangkan pada penelitian peneliti diasosiasikan ke kebijakan dan program kerja, instrumen penelitian, lokus penelitian
4.	Romieke, et al. (2016)	<i>How Differences in Perceptions of Own and Team</i>	Kuantitatif	Performance (X), Trust (Z),	Memiliki kesamaan variable X dan Z tetapi variable Y

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Pendekatan Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sekarang
		<i>Performance Impact Trust and Job Satisfaction in Virtual Teams, 1-41</i>		<i>Satisfaction(Y)</i>	dimana peneliti meletakkan partisipasi sebagai variabel Y. Instrumen Penelitian dan penggunaan metode analisis data PLS-SEM
5.	Sonali, et al. (2020)	<i>Moderating effect of perceived trust on service quality – student satisfaction relationship: evidence from Indian higher management education institutions, 1-26</i>	Kuantitatif	<i>Service Quality (X), Trust (Z), Student satisfaction (Y)</i>	Kinerja pada penelitian tersebut diasosiasikan pada Service Quality Memiliki kesamaan Z tetapi variable Y dimana peneliti meletakkan partisipasi sebagai variabel Y. Instrumen Penelitian dan penggunaan metode analisis data PLS-SEM
6.	Jiaming, et al. (2008)	<i>Effects of innovativeness and trust on web survey participation, 144-152.</i>	Kuantitatif	<i>Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioural Control (X), Trust (Z), Intention (Y)</i>	Dimensi kinerja pada penelitian diasosiasikan dengan <i>Attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioural</i> dan dimensi partisipasi diasosiasikan dengan <i>intention</i> .
7.	Marc, et al. (2013)	<i>A Comparative Analysis of the Relation Between Political Trust and Forms of Political Participation in Europe, 131-155</i>	Kuantitatif komparatif dengan analisis regresi logistik	Kepercayaan (X) Partisipasi (Y)	Mengidentifikasi hubungan kepercayaan dengan partisipasi. Peneliti menambah apa ada hubungan dengan kinerja dengan kepercayaan dan partisipasi
8.	Quixian, et al. (2020)	<i>Empirical Study on the Evaluation</i>	Kuantitatif dengan	<i>Government Image (X1),</i>	Adanya hubungan <i>government image</i>

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Pendekatan Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sekarang
		<i>Model of Public Satisfaction With Local Government Budget Transparency: A Case From China</i>	Analisis Persamaan struktural	<i>Public Expectation (Z1), Public Satisfaction (Z2), Public Trust (Y)</i>	dengan <i>public trust</i> . Peneliti mengasosiasikan <i>government image</i> yang bagus berkorelasi dengan kinerja yang baik dan menambahkan variable partisipasi
9.	S. Pavan, et al. (2017)	<i>Influence of Trust and Participation in Decision Making on Employee Attitudes in Indian Public Sector Undertakings</i> , 1-13.	Kuantitatif dengan analisis SEM dengan pendekatan PLS	Kepercayaan (X1), Partisipasi (X2) kepuasan pekerjaan, komitmen grup (Y) Komitmen Organisasi Afektif (Z)	Perbedaan dengan penelitian yaitu lokus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam bidang Jasa konstruksi, Instrumen Penelitian dan penggunaan metode analisis data PLS-SEM
10.	Marthe Holum. (2023)	<i>Citizen Participation: Linking Government Efforts, Actual Participation, and Trust in Local Politicians</i> , 915-925	kuantitatif	<i>Political interest (X), Trust (Z), Participation (Y)</i>	Dimensi kinerja pada penelitian diasosiasikan dengan <i>Political Interest</i> (dalam artian luas)

Sumber: Olahan Penulis (2024)

2.2. Kebijakan Publik

Menurut Murtiarin (2017) kebijakan publik umumnya didefinisikan sebagai "sebuah rencana tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menghadirkan tantangan dan peluang yang dimanfaatkan dan diatasi oleh kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan." Kebijakan publik tidak hanya berfokus pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih pada tujuan bersama, kepentingan publik, atau masyarakat

secara keseluruhan. Rencana tindakan yang diusulkan sebagai kebijakan kemudian diwujudkan melalui keputusan dan tindakan berikutnya.

Menurut Lester (Wibowo dan Tangkilisan, 2004:45) kebijakan publik adalah "proses atau serangkaian keputusan atau kegiatan pemerintah yang dirancang untuk menangani isu-isu publik, baik yang nyata maupun yang masih direncanakan". Kebijakan publik memiliki karakteristik tertentu, di mana kebijakan ini dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi oleh otoritas yang terdiri dari anggota legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Kebijakan publik juga dapat didefinisikan secara komprehensif sebagai keseluruhan kegiatan pemerintah, baik secara langsung maupun melalui perantara, karena tindakan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat.

Deliberasi publik dalam kebijakan publik merujuk pada proses diskusi antara warga negara dan pejabat pemerintah untuk bersama-sama membuat keputusan kebijakan. Para ahli menganggap ini sebagai kemampuan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam dialog yang bermakna berdasarkan alasan dan mencapai keputusan yang bertujuan untuk mengatasi masalah publik yang menjadi perhatian bersama (Roberts, 2004:340).

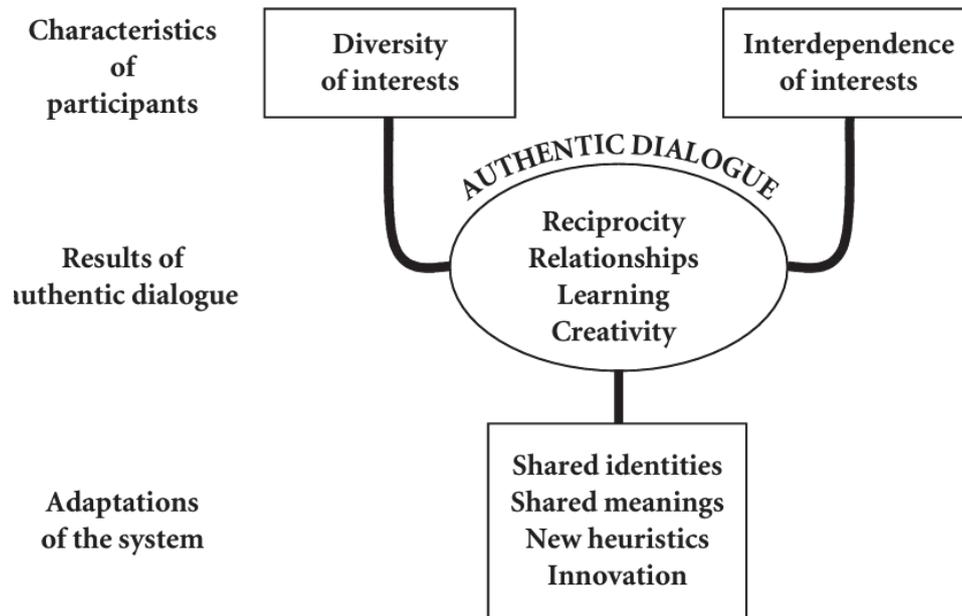
Jika di masa lalu pemungutan suara adalah satu-satunya cara untuk mencapai demokrasi, sekarang deliberasi dianggap lebih penting dalam menilai demokrasi dan partisipasi publik. Chang (2012) menegaskan bahwa untuk memajukan barang publik, deliberasi harus digunakan untuk menghubungkan proses pembuatan kebijakan dengan diskusi berbasis alasan, di mana anggota masyarakat berkumpul untuk membuat keputusan bersama. Menurutnya, ini adalah proses transformasi demokrasi di era modern di mana diskusi berbasis

alasan menggantikan demokrasi tidak langsung. Lebih spesifik, demokrasi tidak hanya berfokus pada percakapan tetapi juga pada pemungutan suara.

Demokrasi dan Kebijakan Deliberatif

Kebijakan Deliberatif menganjurkan dialog autentik sebagai sarana untuk mencapai kolaborasi yang efektif di antara pemangku kepentingan dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda. Pentingnya dialog yang autentik dalam konteks publik ditekankan, karena kebanyakan orang tidak terbiasa dengan jenis komunikasi ini. Untuk mencapai hal ini, perlu keterlibatan fasilitator profesional dan pelatihan khusus bagi peserta agar dapat mengatasi kecenderungan untuk menyembunyikan kepentingan dan terjebak dalam tawar-menawar posisional. Fasilitator memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap kepentingan dan konflik diidentifikasi secara transparan sejak awal, dan bahwa proses berlangsung dalam lingkungan yang aman dan terbuka.

Selain itu, pentingnya staf yang terlatih dan kompeten dalam mengelola dialog yang kompleks juga disorot. Mereka tidak hanya bertugas sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penjaga informasi, mediator di luar pertemuan, serta analis yang dapat menyusun hasil diskusi dengan baik. Kepercayaan dari semua pihak terlibat terhadap staf ini sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dialog. Berbagai metode dan praktik baru dalam menciptakan dialog autentik sedang didokumentasikan dan dianalisis, dengan tujuan untuk memahami strategi yang efektif serta kondisi yang memungkinkan komunikasi yang rasional dan kolaboratif.



Gambar 2.1. DIAD Network Dynamic

Sumber: Deliberative Policy Analysis - Understanding Governance in the Network Society, Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (Eds.). (2003).

Akhirnya, sebuah dialog autentik menuntut bahwa setiap peserta dapat mewakili kepentingannya dengan jujur, berkomunikasi secara tulus, dan menghargai perbedaan pendapat. Hal ini tidak hanya memerlukan kemampuan peserta untuk mengeksplorasi titik temu, tetapi juga untuk menantang asumsi-asumsi yang mendasari status *quo*. Fleksibilitas dalam mengikuti arah diskusi yang dibutuhkan tanpa terikat pada aturan yang menghalangi perubahan juga sangat penting untuk memastikan terbukanya ruang untuk inovasi dan solusi yang lebih baik. Dengan demikian, praktik kebijakan deliberatif mengusulkan pendekatan yang terstruktur namun adaptif untuk mengatasi perbedaan dan mencapai hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks kolaborasi antara pemangku kepentingan yang berbeda, dialog autentik menjadi krusial untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan

dan terinformasi. Hal ini ditekankan oleh Habermas, yang menegaskan bahwa keinklusan dalam wacana diperlukan untuk mencapai rasionalitas komunikatif di mana semua kepentingan diungkapkan dan dipertanyakan. Tanpa kehadiran semua pihak terlibat, kesepakatan yang tercapai cenderung tidak berkelanjutan atau kurang terinformasi, karena informasi penting dan perspektif yang berbeda dapat terlewatkan. Pentingnya inklusivitas ini juga ditegaskan oleh pengalaman fasilitator profesional, yang menemukan bahwa eksklusi pemangku kepentingan dapat mengancam kesepakatan yang sudah dicapai, bahkan jika pemangku kepentingan tersebut tidak memiliki kekuatan langsung untuk menghentikan kesepakatan tersebut.

Selain inklusivitas, saling ketergantungan di antara pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Contoh dari berbagai studi kasus menunjukkan bahwa pemangku kepentingan sering kali saling terkait melalui sistem yang kompleks, seperti pengelolaan sumber daya air atau perencanaan transportasi. Memahami interkoneksi ini membantu pemangku kepentingan untuk menemukan solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan individu mereka, tetapi juga berkontribusi pada sistem secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, proses kolaboratif dimulai dengan pemahaman yang bertahap tentang saling ketergantungan ini, yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menemukan titik temu dan mengembangkan solusi yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, kolaborasi yang efektif memerlukan dialog autentik yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan serta pemahaman yang mendalam tentang saling ketergantungan mereka. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dapat bekerja bersama untuk mencapai solusi yang tidak hanya berkelanjutan dari sudut pandang teknis, tetapi juga secara politis dan sosial

dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang inklusif dan berorientasi pada pemahaman sistem adalah kunci untuk mengatasi masalah yang kompleks dan kontroversial dalam kebijakan publik dan manajemen sumber daya.

Demokrasi deliberatif merupakan konsep yang relatif baru dalam teori demokrasi (Floridia, 2018). Meskipun penelitian mengenai demokrasi deliberatif terus berkembang, perhatian terhadap peran masyarakat sipil dalam praktiknya masih terbatas (Dodge, 2014; Zgiep, 2019). Terutama dalam bidang jasa konstruksi, aspek deliberatif belum terinstitusionalisasi dengan baik karena berbagai hambatan (Gholipour, *et al.*, 2023). Mengingat pentingnya pendekatan deliberatif dalam sektor jasa konstruksi, yang dapat membantu masyarakat menyeimbangkan berbagai *trade-off* dan menyoroti nilai-nilai sosial terkait sektor tersebut (Tugendhaft, *et al.*, 2021), diskusi mengenai demokrasi deliberatif dalam bidang jasa konstruksi menjadi sangat penting.

Terdapat perbedaan signifikan antara demokrasi deliberatif dan bentuk demokrasi lainnya. Teori demokrasi deliberatif menekankan bahwa kita harus menghindari sekedar penghitungan suara dan lebih fokus pada proses diskusi (Goodin, 2008). Ini mengimplikasikan bahwa demokrasi deliberatif membutuhkan partisipasi aktif warga negara, bukan hanya secara teoritis. Seringkali, warga negara diperlakukan bukan sebagai warga negara sejati, tetapi sebagai 'konsumen' (Davies, *et al.*, 2006). Konsep Osborne dan Gaebler (1992) yang berorientasi pada pelanggan bertujuan untuk mendorong inovasi dan mengurangi pemborosan. Namun, konsep ini mengabaikan peran warga sebagai warga negara, yang akan dibahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Sejauh ini, banyak ilmuwan, khususnya filsuf politik, telah mempelajari *public deliberation*, namun hanya sedikit yang mengeksplorasi *public deliberation* dalam konteks proses kebijakan publik, terutama dalam kehidupan nyata (Stie, 2008). Mereka cenderung menganggap *public deliberation* sebagai bentuk demokrasi politik, dan sering mengabaikan pentingnya musyawarah dalam administrasi publik dan proses pengambilan keputusan (Abdullah & Rahman, 2015). Faktanya, musyawarah dapat terjadi dalam bentuk pemerintahan lain, seperti rezim otoriter, meskipun tidak seefektif dalam pemerintahan demokratis (Parkinson & Mansbridge, 2012).

Public deliberation dalam proses kebijakan merupakan topik penting untuk dibahas. Memberikan pelayanan terbaik bagi warganya adalah tujuan dasar pemerintahan (Muluk, 2008). Dengan kata lain, kebijakan publik adalah salah satu instrumen untuk mengatasi tantangan dan masalah jasa konstruksi masyarakat (Todosia, 2019; Widodo, 2021). Pemerintah dapat menggunakan kebijakan publik untuk melakukan intervensi atau tindakan tertentu guna mencapai hasil yang diharapkan (*intended impacts*) (Widodo, 2021). Kebijakan publik diperlukan untuk memecahkan masalah di bidang jasa konstruksi mencapai kesejahteraan rakyat, memenuhi tuntutan dan harapan publik, serta mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kebijakan publik merupakan suatu keniscayaan bagi sebuah negara dalam menyediakan layanan jasa konstruksi kepada masyarakat.

Saat ini, pemerintah mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna membahas berbagai masalah kebijakan yang kompleks seperti isu jasa konstruksi, lingkungan, dan lainnya (Davies, *et al.*, 2006). Kebijakan publik mencakup semua

tindakan yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, karena ketidakaktifan pemerintah juga mempengaruhi masyarakat (Dye, 2013). Di sisi lain, kebijakan deliberatif mengacu pada diskusi antara warga negara dan pejabat pemerintah untuk secara bersama-sama mengambil keputusan kebijakan (Popa, 2019). Ini menekankan pada proses pembuatan kebijakan publik, di mana diskusi digunakan sebagai alat untuk menganalisis perdebatan kebijakan, sehingga memungkinkan peningkatan partisipasi dari pemangku kepentingan awam.

Demokrasi deliberatif adalah gagasan yang menitikberatkan pada pertimbangan logis atau praktis dalam proses pengambilan keputusan, sambil memastikan partisipasi yang setara melalui musyawarah demokratis (Florida, 2018). Dalam konteks demokrasi deliberatif, partisipasi yang setara dan adil dianggap krusial dalam upaya bersama mengevaluasi isu-isu publik. Dengan demikian, esensi dari demokrasi deliberatif terletak pada hubungan antara aspirasi masyarakat dan inklusi berdasarkan prinsip kesetaraan.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses dialog publik untuk menegosiasikan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka (Roberts, 2004:340). Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa masyarakat dari kalangan ekonomi bawah sering kali diabaikan dalam partisipasi politik, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuasaan yang ada, meskipun hal ini terjadi tanpa disengaja, dan marginalisasi tersebut dapat membatasi kemampuan kelompok tertentu untuk turut serta (Wallerstein, *et al.*, 2019). Tantangan dalam tata kelola pemerintahan menuntut pemahaman yang mendalam tentang cara masyarakat yang sering diabaikan dapat ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan (Fung, 2006). Keberhasilan proses deliberatif bergantung pada jaminan bahwa keragaman masyarakat tercermin secara

memadai (Phillips, 1998). Konsep akuntabilitas dalam konteks deliberatif dapat mengatasi beberapa kelemahan dari model akuntabilitas demokratis yang bersifat sukarela dan tradisional (Buchstein, 2021). Hal ini memiliki signifikansi besar bagi legitimasi demokrasi modern, di mana akuntabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat (Lafont, 2020). Lafont (2020) mengemukakan bahwa esensi partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan adalah memastikan bahwa proses politik tidak mengesampingkan pembentukan opini dan keinginan masyarakat sehingga warga dapat secara efektif memengaruhi proses tersebut. Ini bertujuan agar undang-undang dan kebijakan yang diikuti masyarakat bukan hanya responsif terhadap kepentingan dan pandangan mereka, tetapi juga mencerminkan cara berpikir dan keprihatinan mereka terhadap isu-isu politik.

Kebijakan deliberatif mendukung legitimasi demokrasi dan penyelesaian masalah (Chambers, 2018; Abdullah & Rahman, 2015; Polletta & Gardner, 2018). Hal ini menjadi ciri khas yang membedakan kebijakan deliberatif dari teori dan bentuk kebijakan konvensional. Namun, Chambers (2018) mencatat adanya variasi yang signifikan dalam penilaian terhadap kekuatan dan sifat klaim epistemik terkait dengan pemberian alasan, serta bagaimana klaim tersebut berkaitan dengan inklusi demokratis. Alasan-alasan dalam kebijakan deliberatif dapat memperoleh legitimasi karena proses pengambilan keputusan publik yang menekankan kesetaraan, kepentingan bersama, diskusi yang berlandaskan alasan, kepentingan publik, fokus pada keputusan, dan kesepakatan mengenai preferensi yang dipermasalahkan (Abdullah & Rahman, 2015). Kebijakan deliberatif memfasilitasi partisipasi yang bebas dan adil, serta menciptakan

kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi informasi antar peserta sebelum proses implementasi kebijakan oleh pemerintah.

2.3. Teori Governance

Agenda *governance* mengatasi masalah efisiensi, pembangunan, kapasitas, akuntabilitas, dan legitimasi (Bevir, 2012). Beberapa agenda ditampilkan sebagai obat mujarab universal yang diduga dapat diterapkan kapan pun dan di mana pun. Yang lainnya disajikan sebagai tanggapan yang lebih spesifik terhadap zaman dan praktik baru yang terkait dengan globalisasi, teknologi informasi, dan pemerintahan baru itu sendiri. Semua agenda ini merupakan upaya untuk mendorong persaingan visi *good governance*. tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang mampu, responsif, inklusif, dan transparan (Saito, 2021). Hal ini mengacu pada mengacu pada proses administrasi publik yang memaksimalkan kepentingan publik (Keping, 2018).

Tata pemerintahan yang baik mempunyai 8 ciri utama. Hal ini bersifat partisipatif, berorientasi pada konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif serta mengikuti supremasi hukum (UN ESCAP, 2009). Hal ini menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan kelompok minoritas diperhitungkan dan suara kelompok paling rentan di masyarakat didengar dalam pengambilan. Sedangkan UNDP (1997:32) memberikan penjelasan bahwa:

Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also effective and equitable. And it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the voices of the poorest and the most vulnerable are heard in decision-making over the allocation of development resources.

Tata kelola yang baik antara lain bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini pemerintah harus melakukan kinerjanya secara efektif dan adil. Mempromosikan kebijakan publik sebagai instrumen dalam mencapai tata kelola yang baik. Adanya kepastian tentang prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus luas di masyarakat dan bahwa suara kelompok termiskin dan paling rentan didengar dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya pembangunan. Berikut dijabarkan terkait dengan prinsip-prinsip *good governance*.

1. Partisipasi,

Partisipasi masyarakat merupakan landasan utama tata pemerintahan yang baik (UN ESCAP, 2009). Semua masyarakat harus memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perantara atau perwakilan yang sah. Partisipasi luas tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif (UNDP 1997). Penting untuk diingat bahwa demokrasi perwakilan tidak selalu berarti bahwa kepentingan kelompok paling rentan dalam masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi perlu diinformasikan dan diorganisir. Hal ini berarti kebebasan berserikat dan berekspresi di satu sisi dan masyarakat sipil yang terorganisir di sisi lain.

2. Aturan hukum

Good governance memerlukan kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara tidak memihak (UN ESCAP, 2009). Hal ini juga memerlukan

perlindungan penuh terhadap hak asasi manusia, terutama dalam jaminan partisipasi publik. Lemahnya aturan hukum akan menyebabkan partisipasi publik menurun dikarenakan masyarakat tidak memiliki jaminan hukum untuk ikut andil berpartisipasi dalam kebijakan publik (Keping, 2018).

3. Transparansi

Transparansi berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan terkena dampak keputusan tersebut dan penegakannya (UN ESCAP, 2009; UNDP, 1997). Hal ini juga berarti tersedianya informasi yang cukup dan disajikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami. Semua warga negara berhak atas informasi mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri, termasuk kegiatan legislatif, pembuatan kebijakan, ketentuan hukum, penegakan kebijakan, anggaran administratif, pengeluaran publik dan informasi politik relevan lainnya. Transparansi mengharuskan informasi politik tersebut dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai media sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik dan mengawasi proses administrasi publik secara efektif (Keping, 2018).

4. Daya tanggap

Good governance mengharuskan lembaga dan proses berusaha melayani seluruh pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar (UN ESCAP, 2009; UNDP, 1997). Pada dasarnya, hal ini berarti bahwa administrator publik dan badan administratif harus menanggapi tuntutan warga negara secara tepat waktu dan bertanggung jawab, dan dilarang

melakukan penundaan tanpa sebab atau membiarkan masalah apa pun tidak terselesaikan tanpa tanggapan (Keping, 2018).

5. Berorientasi pada konsensus

Good Governance memerlukan mediasi berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai konsensus luas dalam masyarakat mengenai apa yang menjadi kepentingan terbaik seluruh masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai (UN ESCAP, 2009). Kebijakan menjadi instrumen yang baik dalam memediasi berbagai kepentingan (UNDP, 1997). Tentunya, hal ini juga memerlukan perspektif yang luas dan jangka panjang mengenai apa yang diperlukan untuk pembangunan manusia berkelanjutan dan bagaimana mencapai tujuan pembangunan tersebut. Hal ini hanya dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap konteks sejarah, budaya dan sosial suatu masyarakat atau komunitas tertentu.

6. Kesetaraan dan inklusivitas

Dalam kaitannya pelayanan, masyarakat baik itu kaya maupun miskin dapat mengakses pelayanan/program yang sama dan setara. Kesejahteraan suatu masyarakat bergantung pada jaminan pemerintah melalui aspek kebijakan. Hal ini mengharuskan semua kelompok, terutama kelompok paling rentan, mempunyai peluang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektivitas dan efisiensi

Good Governance berarti bahwa proses dan lembaga menghasilkan hasil yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan pada saat yang sama memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya (UNDP, 1997). . Konsep efisiensi dalam konteks tata pemerintahan yang

baik juga mencakup pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup (UN ESCAP, 2009). Kinerja pemerintah dapat mempengaruhi persepsi warga terhadap legitimasi pemerintah, yang kemudian menghasilkan kepercayaan publik.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban setiap orang atas perilakunya sendiri. Tidak hanya lembaga pemerintah tetapi juga sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan kelembagaan mereka. Secara umum suatu organisasi atau lembaga bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang akan terkena dampak dari keputusan atau tindakannya. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan supremasi hukum.

2.4. Kepercayaan terhadap Pemerintah

2.4.1 Tujuan Kepercayaan

Signifikansi kepercayaan dapat bervariasi sesuai dengan situasi yang berbeda dan dipengaruhi oleh berbagai faktor (Rose-Ackerman, 2001). Secara logis, jika terdapat keraguan terhadap keabsahan suatu institusi demokrasi, maka kepercayaan terhadap institusi tersebut juga akan terpengaruh. Sebaliknya, jika seseorang tidak mempercayai suatu institusi, kemungkinan kecil bagi orang tersebut untuk menganggap institusi tersebut sah. Intinya, legitimasi bergantung pada keyakinan bahwa pemerintah akan menggunakan kekuasaannya dengan tepat. Ini menandakan pengakuan akan kerentanan negara (Robinson, *et al.*, 2017).

Kepercayaan sepertinya menjadi krusial saat terdapat ketidakpastian dan risiko, tidak peduli seberapa besar tingkat risiko tersebut, dan ketidakpastian ini

muncul karena ketidakpastian individu terhadap motif, niat, dan perilaku orang lain di masa depan yang menjadi bergantung pada individu tersebut (Jones, 1998) Pendekatan ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada dasarnya bukanlah karakteristik yang secara alami dimiliki oleh individu atau aspek psikologis, tetapi lebih merupakan produk dari interaksi sosial atau identitas kelompok. Perilaku ini didukung oleh kumpulan aturan institusional, hukum, dan tradisi (Calnan & Rowe, 2006)

Menurut Bouckaert & Van De Walle (2003), kepercayaan yang tertinggi terhadap pemerintah dapat menjadi salah satu tanda keberhasilan tata kelola yang efektif. Beberapa pendekatan menghubungkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan faktor-faktor yang tidak sepenuhnya terkait dengan pemerintah. Perspektif manajemen cenderung menjelaskan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sebagai akibat dari kinerja sistem pemerintah yang kurang memuaskan, sehingga perbaikan dalam kualitas pelayanan dianggap sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan tersebut.

Jika pemerintah gagal dalam kinerjanya, ini bisa mendorong masyarakat untuk mencari alternatif layanan, menghindari kewajiban pajak, atau mengeskpresikan ketidakpuasan dengan menentang pemerintah yang berkuasa atau mengajukan keluhan. Pilihan antara tindakan-tindakan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat loyalitas individu terhadap pemerintah. Pendekatan dalam administrasi publik juga menghubungkan kinerja pemerintah dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Namun, dalam pendekatan ini, kinerja yang buruk sering kali disebabkan oleh beban yang terlalu berat bagi pemerintah: baik karena pemerintah tidak lagi mampu memenuhi tuntutan yang meningkat, atau karena beberapa tuntutan masyarakat bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu,

solusi yang diusulkan adalah manajemen ekspektasi pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk merevisi tuntutan mereka atau menyoroti sifat konflik dari beberapa tuntutan yang diajukan.

2.4.2 Indikator Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keadaan mental seseorang yang memungkinkan mereka menerima kerentanan dan menempatkan kepentingan mereka dibawah kendali orang lain dengan harapan bahwa sikap orang lain tersebut baik (Yang, 2006). Hal ini sering disebut dengan kepercayaan terhadap pemerintah atau kepercayaan politik (anderson, 2010). Kepercayaan terhadap pemerintah dikategorikan menjadi hubungan dan kepercayaan institusional (Papadakis, 1999). Kepercayaan dalam hubungan merupakan gabungan dari kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi, kebaikan dan integritas pemerintah (Mayer et al, 1995). Kepercayaan institusional merupakan persepsi warga terhadap lingkungan institusional (Mcknight et al., 2002). ini merupakan indikator sikap yang bersifat abadi dan subjektif yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah. Torcal (2014) menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pernyataan masyarakat bahwa pemerintah dapat diandalkan.

Kepercayaan adalah elemen kunci yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam program pemerintah. Meskipun tidak ada definisi yang sepenuhnya diterima secara universal, secara umum, kepercayaan terkait dengan kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Ini melibatkan penerimaan kerentanan berdasarkan harapan positif terhadap perilaku orang lain. Menurut Nulhusna, *et al.* (2017) terdapat tiga dimensi utama kepercayaan yang diidentifikasi, diambil dari bidang-bidang seperti sosiologi dan psikologi :

- a. Kepercayaan Disposisional: Ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bergantung pada orang lain di berbagai situasi. Ini mencakup keyakinan pada kompetensi, kebaikan hati, dan integritas orang lain. Pada pemerintahan dapat di implementasikan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pada pemerintahan.
- b. Kepercayaan Institusional: Dimensi ini terkait dengan persepsi individu terhadap lingkungan institusional, Hal ini seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan layanan jasa konstruksi dalam konteks penelitian ini.
- c. Kepercayaan Antarpribadi: Fokusnya adalah pada keyakinan khusus terhadap penyedia layanan, seperti lembaga pemerintah dalam konteks ini seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan hasil kebijakan yang telah diambil.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepercayaan dalam konteks pemerintah dalam lingkup jasa konstruksi, mencakup predisposisi individu dan persepsi tentang hubungan institusional dan antarpribadi, yang semuanya memengaruhi kemauan individu untuk menggunakan layanan pemerintah daerah.

2.5. Partisipasi

2.5.1 Prinsip-Prinsip Partisipasi

OECD (2022) menguraikan prinsip-prinsip esensial yang perlu dipertimbangkan saat melaksanakan partisipasi masyarakat, yang membantu memastikan kualitas proses partisipasi. Prinsip-prinsip ini disusun berdasarkan

analisis praktik terbaik untuk setiap metode, serta pedoman OECD untuk pembuatan kebijakan yang inklusif dan terbuka.

Tujuan dari partisipasi masyarakat harus didefinisikan secara jelas dan berhubungan dengan isu-isu atau tantangan publik yang ada. Hal ini dimaksudkan yang terpengaruh harus didorong untuk turut serta dalam menetapkan agenda dan mengusulkan isu-isu yang akan dihadapi melalui proses partisipatif. Partisipasi harus langsung terhubung dengan proses pengambilan keputusan, dan peserta harus mampu memahami dampaknya terhadap keputusan publik.

Pihak berwenang harus secara jelas menetapkan harapan terkait hasil yang diinginkan dari proses partisipasi untuk mengelola harapan masyarakat. Pentingnya komitmen publik untuk merespon atau mengikuti rekomendasi dari masyarakat harus diakui, termasuk langkah-langkah untuk menindaklanjuti masukan mereka dengan tepat waktu dan, bila memungkinkan, secara transparan. Pihak berwenang juga perlu memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas mengenai bagaimana mereka memanfaatkan masukan yang diterima.

Sebelum dimulai, proses partisipasi harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Diperlukan tingkat transparansi yang tinggi dalam semua tahap pengambilan keputusan yang terjadi setelah proses partisipasi. Rancangan proses serta semua materi dan data yang relevan harus tersedia untuk publik pada waktu yang sesuai. Tanggapan terhadap masukan yang diterima dari peserta strategi komunikasi publik. Pihak berwenang dapat memanfaatkan mekanisme komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Setiap individu atau pihak yang tertarik harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat, dengan memperhatikan keberagaman masyarakat. Hal ini mencakup pemilihan metode yang sesuai dengan audien target, usaha untuk mengurangi rintangan partisipasi, dan mempertimbangkan cara untuk melibatkan kelompok yang mungkin kurang terwakili. Selain itu, partisipasi dapat didorong dan didukung melalui insentif, fasilitas pembiayaan, dan/atau pelayanan.

Adanya lembaga publik yang konsisten dalam menyediakan sistem partisipasi yang efektif, yang dapat melibatkan masyarakat yang sering diabaikan dalam proses partisipasi. Proses ini harus dijalankan dengan niat yang jujur, sambil berusaha untuk menjadikan proses tersebut tetap bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau dominasi oleh kelompok kepentingan tertentu.

2.5.2 Tingkatan Partisipasi

Menurut *International Association of Public Participation* (2018), tingkat partisipasi merupakan penentu peran masyarakat dalam setiap proses partisipatif. Skala partisipasi ini digunakan secara global dalam berbagai program partisipasi publik. Dari dua ujung skala partisipasi tersebut, tergambar tingkat pengaruh yang beragam, dimulai dari adanya kesempatan untuk memengaruhi (tingkat informasi) hingga memiliki kontrol penuh terhadap hasil (tingkat pemberdayaan)

	INFORM	CONSULT	INVOLVE	COLLABORATE	EMPOWER
PUBLIC PARTICIPATION GOAL	To provide the public with balanced and objective information to assist them in understanding the problem, alternatives, opportunities and/or solutions.	To obtain public feedback on analysis, alternatives and/or decisions.	To work directly with the public throughout the process to ensure that public concerns and aspirations are consistently understood and considered.	To partner with the public in each aspect of the decision including the development of alternatives and the identification of the preferred solution.	To place final decision making in the hands of the public.
PROMISE TO THE PUBLIC	We will keep you informed.	We will keep you informed, listen to and acknowledge concerns and aspirations, and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will work with you to ensure that your concerns and aspirations are directly reflected in the alternatives developed and provide feedback on how public input influenced the decision.	We will look to you for advice and innovation in formulating solutions and incorporate your advice and recommendations into the decisions to the maximum extent possible.	We will implement what you decide.

© IAP2 International Federation 2018. All rights reserved. 20181112_v1

Gambar 2.2. Tingkat Partisipasi

Sumber: *International Association of Public Participation* (2018)

1. *Inform*

Pada tahap pertama partisipasi, yaitu disebut *Inform*, Masyarakat sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif. Namun, pada tingkat ini, lembaga memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mereka dapat memahami proses pengambilan keputusan oleh lembaga terkait. Ini juga mengingatkan Lembaga bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat tidak memiliki peluang untuk memengaruhi keputusan, dan memberikan informasi sudah dianggap memadai. Saat masyarakat berpartisipasi pada tingkat *Inform*, penting untuk dicatat bahwa tujuan mereka bukanlah memengaruhi atau memanipulasi opini publik. Oleh karena itu, tingkat informasi tidak sama dengan kampanye hubungan masyarakat. Sebaliknya, partisipasi pada tingkat informasi menekankan pada kewajiban lembaga terkait untuk memberikan informasi yang jujur kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami program dan keputusan yang diambil, serta dapat membuat kesimpulan sendiri tentang

kecukupan dan kekayaan keputusan tersebut. Tujuan utama dari partisipasi pada tingkat informasi adalah memastikan bahwa masyarakat tetap terinformasi.

2. *Consult*

Partisipasi dalam konsultasi adalah kesempatan dasar bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap suatu keputusan, tetapi ini mencerminkan tingkat partisipasi yang lebih minimal. Konsultasi berarti meminta pendapat tanpa mengajak untuk bekerja sama secara aktif. Pemerintah hanya meminta masukan masyarakat dan mempertimbangkan masukan tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Saat melakukan konsultasi, lembaga biasanya meminta masukan pada titik-titik tertentu dalam proses dan tidak memberikan kesempatan terus-menerus untuk memberikan masukan. Tujuan dari partisipasi dalam konsultasi adalah untuk memperoleh dan mempertimbangkan masukan masyarakat. Pada tingkat konsultasi, komitmen adalah untuk mempertimbangkan masukan yang diterima dari masyarakat dan tidak memberikan umpan balik mengenai bagaimana masukan tersebut mempengaruhi keputusan.

3. *Involve*

Partisipasi masyarakat pada tingkat keterlibatan melibatkan lebih dari sekedar memberikan konsultasi. Pada tingkat ini, masyarakat diundang untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, biasanya sejak awal, dan diberikan banyak kesempatan untuk memberikan masukan sepanjang proses tersebut. Meskipun demikian, lembaga tetap bertanggung jawab sebagai pengambilan keputusan, dan tidak diharapkan mencapai konsensus atau memberikan pengaruh besar kepada masyarakat terkait keputusan yang diambil. Tujuan dari partisipasi pada tingkat keterlibatan adalah untuk berkolaborasi secara langsung dengan masyarakat dan mempertimbangkan masukan mereka dalam

pengambilan keputusan. Pada tingkat keterlibatan, ada komitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat dan mempertimbangkan masukan mereka dalam pengambilan keputusan. Pada tingkat keterlibatan, ada komitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan dan menerima umpan balik langsung tentang kontribusi mereka terhadap keputusan yang diambil.

4. *Collaborate*

Partisipasi masyarakat pada tingkat kolaborasi melibatkan semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi berarti bekerja sama dalam proses tersebut. Pada tingkat kolaborasi, masyarakat secara langsung terlibat dalam mengambil keputusan, sering kali dengan upaya mencapai kesepakatan bersama. Meskipun demikian, lembaga tetap sebagai penentu utama keputusan. Penting untuk dengan jelas menetapkan sejauh mana upaya mencapai kesepakatan akan dilakukan dan sejauh mana otoritas pengambilan keputusan akan diberikan kepada masyarakat. Meskipun semua masukan dari masyarakat dipertimbangkan, lembaga akan membuat keputusan akhir, Implementasi program tingkat kolaborasi memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang besar dan harus diperlakukan secara serius. Ketika konsensus dicapai oleh para pemangku kepentingan namun diabaikan oleh lembaga, ini dapat berdampak negatif serius pada program kebijakan dan hubungan masa depan dengan para pemangku kepentingan. Tujuan dari partisipasi pada tingkat kolaborasi adalah untuk membangun kemitraan yang efektif dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Komitmen pada tingkat kolaborasi adalah bahwa masyarakat akan terlibat dalam semua aspek kegiatan dan pengambilan keputusan penting, dan

masukan mereka akan dipertimbangkan sebaik mungkin. Meskipun konsensus tidak selalu tercapai pada tingkat kolaborasi, penting untuk menjelaskan sejauh mana upaya akan dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

5. *Empower*

Tingkat pemberdayaan melibatkan lembaga pemerintah memberikan wewenang kepada masyarakat untuk membuat keputusan sendiri. Meskipun pemungutan suara atau referendum adalah kegiatan umum pada tingkat ini, lembaga pemerintah jarang terlibat dalam partisipasi pemberdayaan. Biasanya, lembaga tidak diperbolehkan untuk mendelegasikan wewenang pengambilan kebutuhan kepada masyarakat, dan menciptakan proses pemberdayaan yang adil, sah, dan inklusif diluar pemungutan suara dasar merupakan tantangan yang kompleks. Bahkan, pemungutan suara dasar sering kali gagal memberikan pengetahuan dan masukan yang diperlukan dari masyarakat untuk partisipasi yang bermakna. Tujuan dari partisipasi pada tingkat pemberdayaan adalah menciptakan program yang memungkinkan masyarakat membuat keputusan yang tepat, dengan komitmen bahwa lembaga akan mengimplementasikan apa yang diputuskan oleh masyarakat.

2.5.3 Indikator Persepsi Partisipasi dalam Pendekatan Kebijakan Publik

Partisipasi merujuk pada keinginan masyarakat untuk terlibat dalam suatu program pemerintah. Keberhasilan dalam pengambilan kebijakan tercermin dari tingkat partisipasi Masyarakat. Dalam penelitian Nulhusna, *et al* (2017), hal ini tercermin melalui niat untuk berkolaborasi atau mengikuti kegiatan pemerintah daerah. Keputusan untuk mengikuti kegiatan pemerintah daerah serupa dengan Keputusan konsumen untuk melanjutkan pembelian ulang karena keduanya dipengaruhi oleh pengalaman awal dan memiliki potensi untuk mengubah

keputusan awal. Sehingga dapat diartikan partisipasi masyarakat dapat digambarkan melalui dua hal yaitu bagaimana masyarakat dalam penggunaan layanan, kontinuitas penggunaan, penggunaan berulang, penggunaan di kebutuhan kedepan serta bagaimana masyarakat bisa menyebarkan pengalaman, merekomendasikan layanan tersebut.

2.6. Kinerja Pemerintah

2.6.1 Konsep Persepsi Kinerja Pemerintah

Kepuasan masyarakat terhadap penyediaan layanan publik juga dikenal sebagai persepsi kinerja pemerintah (Akinboade, *et al.*, 2012). Lebih lanjut, definisi persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan dapat diartikan sebagai pandangan mereka terhadap layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional (Salim, *et al.*, 2017). Dengan kata lain, ini mencakup pandangan masyarakat tentang mutu barang dan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Definisi yang lebih rinci menurut Morgeson & Petrescu (2011) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik mencakup sejumlah atribut, termasuk aksesibilitas layanan, ketepatan waktu, efisiensi layanan, serta ketersediaan dan kejelasan informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Beberapa peneliti lain menggambarkannya sebagai tingkat kepuasan masyarakat, yang merupakan evaluasi masyarakat terhadap layanan pemerintah berdasarkan harapan mereka sebelumnya (Kim & Kim, 2022)

2.6.2 Tujuan Persepsi Kinerja Pemerintah

Analisis terhadap pandangan masyarakat mengenai kinerja pemerintah penting karena beberapa alasan. Menurut Akinboade (2012), ini dijelaskan secara

detail sebagai pendekatan praktis untuk menilai dampak tata kelola. Mereka menyatakan bahwa metode analisis semacam itu dapat menjadi instrumen yang cepat dan sederhana bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efek reformasi tata kelola terhadap kinerja pemerintah, terutama di sektor-sektor di mana penilaian kualitas layanan tidak mudah, dengan catatan bahwa kepuasan masyarakat berhubungan erat dengan kualitas layanan aktual. Di samping itu, pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat menjadi esensial untuk mengevaluasi efek desentralisasi atau upaya reformasi pemerintahan yang lainnya.

Beberapa riset telah menggambarkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kinerja layanan publik merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan terhadap pemerintah (He & Ma, 2020; Salim, *et al.*, 2017). Menurut OECD (2013), pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam menyediakan barang dan layanan publik adalah inti dari pendekatan yang berpusat pada masyarakat dalam penyediaan layanan, dan merupakan bagian penting dari strategi organisasi untuk peningkatan yang berkelanjutan. Data tentang persepsi ini biasanya dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengalaman masyarakat dengan pemerintah dan mendapatkan pandangan mereka tentang hasil layanan yang mereka terima. Informasi ini dapat membantu manajemen layanan publik mengidentifikasi elemen layanan mana yang meningkatkan kepuasan, serta memantau dampak reformasi pada pengguna akhir.

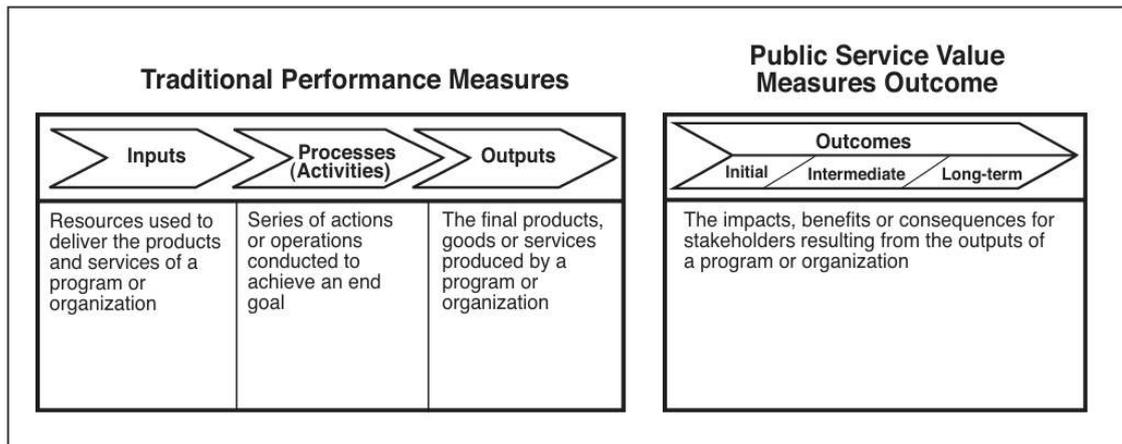
OECD (2013) juga menyatakan bahwa nilai pandangan masyarakat terhadap kinerja layanan publik adalah cara bagi pembuat kebijakan dan manajer untuk lebih memahami demografis masyarakat mereka. Ini membantu dalam mengenali sub kelompok masyarakat serta perbedaan dalam aksesibilitas. Selain

itu, tingkat kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator penting dari kinerja keseluruhan pemerintah.

2.5.3 Penilaian Kinerja Pemerintah

Menurut Cole dan Partson, menjelaskan sebuah model konseptual yang menghubungkan antara efektivitas pencapaian tujuan, yang di dalam hal ini berwujud *public value* dengan efektivitas biaya. *public value* adalah nilai tambah yang diciptakan oleh instansi publik/pemerintah (*public sector*). Nilai (*Value*) yang dimaksud berbeda dengan nilai yang diciptakan oleh sektor swasta (*private sector*), karena nilai yang dihasilkan *private sector* bisa dengan mudah di konversi dalam wujud keuntungan dan kerugian finansial, sedangkan nilai yang dihasilkan oleh *public* bersifat kompleks dan biasanya kurang bersifat materiil dibandingkan dihasilkan *private sector*. Nilai tersebut melibatkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Nilai ekonomis yang lebih luas,
- Nilai sosial dan budaya
- Keadilan dan kesetaraan
- Nilai politis dan ekonomis
- Kestinambungan jangka panjang dari sistem sosial dan ekonomi

FIGURE 2.1**Inputs, Processes and Outputs versus Outcomes****Gambar 2.3. Pengukuran Hasil Kebijakan**

Sumber : Cole, Martin dan Greg Parston. 2006. *Unlocking Public Value*.

Menurut Cole dan Parston (2006: 21), penilaian kinerja (*performance measurement*) sangat penting untuk menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan. Penilaian kinerja adalah metode yang diterapkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dalam studi implementasi, yaitu: (i) apa isi dan tujuan dari kebijakan tersebut; (ii) langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut; dan (iii) apakah setelah langkah-langkah tersebut diambil, implementasi kebijakan berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja implementasi suatu kebijakan ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Yang dimaksud dengan indikator dampak (*policy outcome*) dalam kerangka logis pengukuran kinerja adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan atau biasa juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Seperti yang telah dijelaskan dalam alur kerangka logis

pengukuran kinerja implementasi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Cole dan Partson pada Gambar. 2.2 di atas. Lebih lanjut, *policy outcomes* menurut Purwanto (2012:110) merupakan salah satu cara untuk mengukur hasil implementasi kebijakan, hasil atau dampak kebijakan sejatinya berkaitan dengan perubahan kondisi kelompok sasaran dari kebijakan atau program tersebut yang dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

- 1) Pertama: *initial outcome* atau dampak langsung dari diberlakukannya sebuah program kebijakan terhadap kelompok sasaran ketika menerima atau mendapatkan produk kebijakan baik berupa barang atau pun layanan;
- 2) Kedua: *intermediate outcome* atau dampak jangka menengah, dimana kelompok sasaran akan berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelum produk kebijakan diterima oleh kelompok sasaran;
- 3) *Long-term outcome* atau tujuan jangka panjang, dimana kelompok sasaran menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Menurut Cole dan Partson dalam Gambar 2.2, dapat diartikan bahwa pengukuran hasil kebijakan (*policy outcome*) sertifikasi tenaga ahli di Provinsi Kalimantan Utara dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, *initial outcome* atau dampak langsung, yaitu dampak kebijakan saat kelompok sasaran menerima produk program, baik berupa barang atau layanan. Awalnya, sertifikasi tenaga ahli dilakukan secara mandiri dengan mengeluarkan dana pribadi tetapi dengan adanya program sertifikasi tenaga ahli konstruksi, kebutuhan dalam peningkatan akan sertifikasi dipenuhi melalui program tersebut. Kedua, *intermediate outcome* atau dampak jangka menengah. Setelah menerima produk dari program tersebut, kelompok sasaran tidak lagi berada dalam keadaan seperti sebelum menerima

produk program. Dalam konteks nya, kondisi sebelumnya ialah tenaga kerja konstruksi dalam mengakses sertifikasi keahlian melalui 2 cara yaitu jalur mandiri atau insentif dari pemerintah. Sehingga program sertifikasi keahlian bidang jasa konstruksi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan *output* tenaga kerja konstruksi ter-sertifikasi. Ketiga, *long-term outcome* atau tujuan jangka panjang. Tujuan akhir dari program ini adalah mencapai kesejahteraan kelompok sasaran (tenaga kerja konstruksi) dari kondisi persaingan tenaga kerja lokal Kalimantan Utara dengan tenaga kerja dari luar Kalimantan Utara. Dengan adanya program ini, diharapkan tercipta kesempatan memperoleh pekerjaan yang sama karena salah satu syarat dalam melakukan pekerjaan jasa konstruksi dapat terpenuhi melalui sertifikasi sehingga berimbas peningkatan ekonomi.

2.6.3 Indikator Kinerja Pemerintah

Penilaian terhadap kinerja pemerintah mencakup seberapa efektif pemerintah memberikan layanan/kerja sama yang berkualitas, memiliki pegawai yang ahli, dan menunjukkan perilaku yang etis, yang dievaluasi berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan. Indikator kinerja pemerintah menurut Yao (2014) melibatkan tiga aspek, yaitu kualitas layanan pemerintah, kompetensi pegawai, dan etika. Kualitas Layanan Pemerintah diukur melalui pengalaman kontak terbaru dengan pemerintah lokal. Seperti adanya hubungan kerja sama terbaru dengan pemerintah daerah. Kompetensi pegawai diukur melalui kompetensi pejabat publik selama kontak terbaru dengan pemerintah daerah. Hal ini menilai berbagai aspek pegawai pemerintahan. Etika diukur melalui aspek kejujuran, perlakuan adil, dan tanggung jawab dari pemerintah lokal. Hal ini menilai bagaimana pemerintah daerah bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Menurut

European Commission (2018) mengatakan dalam melaksanakan survei pada masyarakat cara yang paling efektif adalah dengan mengukur kontak terbaru dengan lembaga tersebut (misalnya, selama 12 bulan terakhir). Karena cara yang lain seperti pengambilan sampel masyarakat yang memiliki kontak terdahulu akan menyebabkan pengambilan sampel lebih lama dan terdapat bias *recall* dalam menjawab kuisioner.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

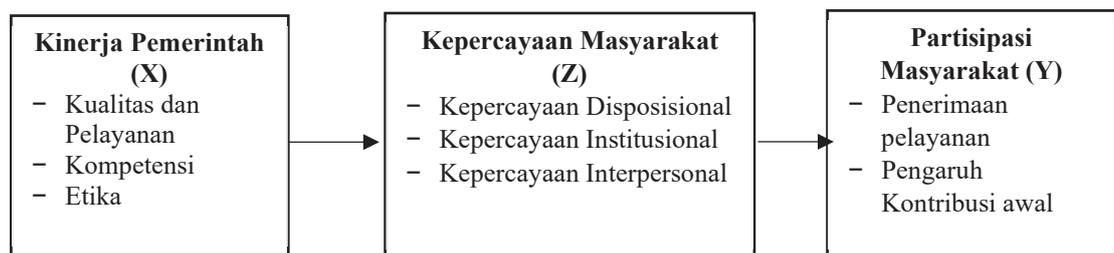
3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Menurut Lester (dikutip oleh Wibowo dan Tangkilisan, 2004:45) kebijakan publik adalah "proses atau serangkaian keputusan atau kegiatan pemerintah yang dirancang untuk menangani isu-isu publik, baik yang nyata maupun yang masih direncanakan". Relevansi kebijakan publik dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat dapat dilihat dalam proses pembuatan kebijakan publik yang melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pandangan dari sejumlah kecil individu atau kelompok kepentingan. Ini memberikan legitimasi demokratis pada kebijakan yang diterapkan.

Partisipasi masyarakat telah menjadi tema sentral dalam kebijakan deliberatif (He & Ma, 2021). Proses deliberatif merupakan suatu pendekatan dalam kebijakan publik yang diyakini oleh banyak ahli dapat membawa keberhasilan kebijakan publik. Para pembuat kebijakan dan praktisi telah menggunakan pendekatan *bottom up* untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi atas warganya (Church et al. 2002). Kebijakan deliberatif bertujuan menciptakan masyarakat yang partisipatif (Hajer & Wageenar, 2003). Namun untuk menciptakan masyarakat yang partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan menuntut terbentuknya kepercayaan masyarakat (Caemmerel, 2017).

Asumsi dasarnya semakin orang percaya maka semakin orang berpartisipasi terhadap program pemerintah (Caemmerel, 2017). Sedangkan kepercayaan hanya akan terbentuk jika masyarakat mendapatkan kepuasan atas kinerja pemerintah (Budihanto et al., 2020). Maka asumsi dalam penelitian ini, berhipotesis bahwa kepercayaan masyarakat memediasi peran kinerja pemerintah dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Forum jasa konstruksi (FJK) dipilih untuk menjadi objek penelitian, dimana forum tersebut, menjadi sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri. Forum jasa konstruksi memberikan wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat jasa konstruksi yang dimaksud ialah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, mitra usaha jasa konstruksi, dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.

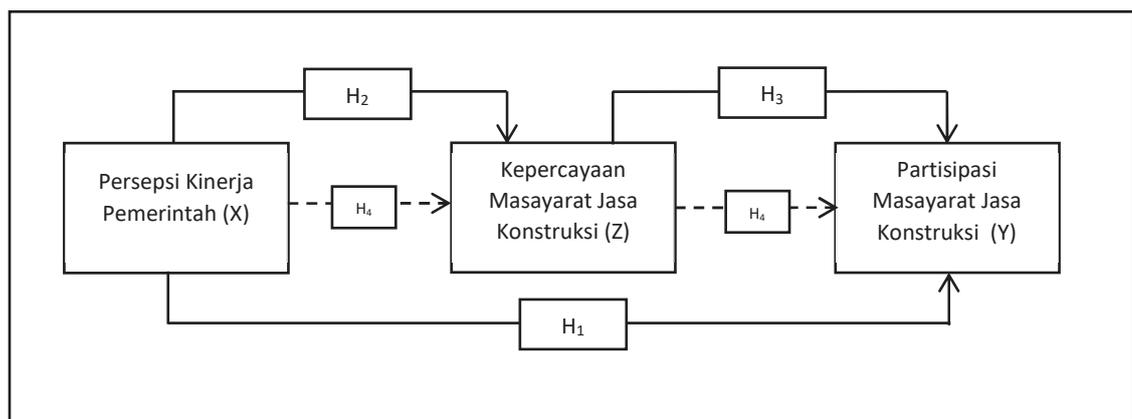


Gambar 3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Sumber : Olahan Peneliti berdasarkan Yao (2014) dan Nulhusna, *et al* (2017)

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun suatu kerangka berpikir ke dalam model hipotesis sebagai dasar pembentukan hipotesis penelitian. Terdapat dua jenis hipotesis dalam penelitian ini, yaitu hipotesis nihil (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nihil merupakan hipotesis yang menyatakan pengaruh signifikan antar variabel sama dengan nol. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antar variabel, sedangkan hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang menyatakan pengaruh signifikan antar variabel tidak sama dengan nol. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antar variabel.



Gambar 3.2. Model Hipotesis

Sumber : Olahan berdasarkan Yao (2014) dan Nulhusna, *et al* (2017)

- > Pengaruh variabel independen terhadap dependen
- - - - -> Pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan variabel mediasi

Berdasarkan model konsep pada Gambar 3.2, maka model hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a) H_1

H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan dari Persepsi atas Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

H_a : Adanya pengaruh signifikan dari Persepsi Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

b) H_2

H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan dari Persepsi atas Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

H_a : Adanya pengaruh signifikan dari Persepsi atas Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

c) H_3

H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan dari Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

H_a : Adanya pengaruh signifikan dari Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara

d) H_4

H_0 : Tidak adanya pengaruh signifikan dari persepsi atas Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) dimediasi oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

H_a : Adanya pengaruh signifikan dari persepsi atas Kinerja Pemerintahan (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) dimediasi oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) pada penyelenggaraan forum Jasa konstruksi di Kalimantan Utara.

Tabel 3.1. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu

No	Rumusan Hipotesis	Penelitian Terdahulu
1.	Persepsi kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat	Caemmerer, <i>et al.</i> (2017)
2.	Persepsi kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepercayaan	He & Ma (2020); (2009); Yao (2014)
3.	Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat.	Nulhusna, <i>et al</i> (2017), Caemmerer, <i>et al.</i> (2017), lee <i>et al</i> (2018)
4.	Adanya pengaruh signifikan antara persepsi kinerja pemerintah terhadap partisipasi dimediasi oleh kepercayaan masyarakat	Caemmerer, <i>et al.</i> (2017)

Sumber : Olahan Peneliti (2024)

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research*. Penelitian eksplanatori merupakan jenis penelitian yang akan menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis (Sinambela, 2014). Oleh karena itu, *explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel eksogen dan endogen. Alasan utama peneliti menggunakan penelitian *explanatory* untuk menjelaskan pengaruh signifikan antar variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis.

4.2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Provinsi Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi dikarenakan sesuai dengan lokasi penelitian yaitu di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada kegiatan Forum Jasa Konstruksi (FJK) dimana melibatkan 6 unsur masyarakat jasa konstruksi.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI lewat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi bahwa tingkat kesempatan kerja sektor jasa konstruksi mempunyai nilai tertinggi dibandingkan dengan provinsi di pulau Kalimantan yaitu di angka 5.58 % sama dengan Provinsi Kalimantan Timur, tetapi dilihat dari tenaga kerja ahli konstruksi hanya berada di nomor paling bawah dari seluruh provinsi yaitu 0,66 % jauh dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada 7.79 %. Dari data diatas dapat disimpulkan terdapat anomali dimana adanya kurangnya partisipasi atau ketidaktahuan masyarakat jasa konstruksi dalam hal ini proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan fasilitasi proses sertifikasi oleh pemerintah daerah. Di tambah dengan struktur organisasi pada bidang jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu provinsi termuda dan pada tataran pemerintah kabupaten/kota, masih banyak yang belum membuat bidang jasa konstruksi di tingkat eselon 3 dan eselon 4 yang mengakibatkan pos anggaran kegiatan pembinaan jasa konstruksi belum maksimal.

4.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel

Variabel penelitian mewakili pengukuran yang terkait dengan individu, peristiwa, aktivitas, situasi, dan sebagainya (Hair, *et al.*, 2022). Mengacu pada karakteristik, atribut individu atau organisasi yang dapat diukur, diamati, dan bervariasi yang sedang dipelajari (Creswell, 2014). Berdasarkan definisi tersebut dapat diperoleh informasi tentang suatu hal yang dipelajari yang memiliki atribut, nilai, dan variasi seperti persepsi kinerja pemerintah, kepercayaan masyarakat

jasa konstruksi, dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi serta persepsi kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi, dimediasi oleh kepercayaan masyarakat jasa konstruksi. Penelitian ini memiliki tiga jenis variabel, yaitu variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen.

a. Variabel Independen (X)

Menurut Cresswell (2014, p. 52) bahwa, "*Independent variables are those that (probably) cause, influence, or affect outcomes. They are also called treatment, manipulated, antecedent, or predictor variables*". Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel "X". Variabel independen dalam penelitian ini adalah Persepsi Kinerja Pemerintah (X).

b. Variabel Mediasi (Z)

Mediasi terjadi ketika variabel mediator memediasi hubungan antara dua variabel lain yang memiliki hubungan langsung. Secara lebih spesifik, perubahan dalam variabel yang bersifat eksogen menyebabkan perubahan dalam variabel mediator, yang kemudian mempengaruhi variabel endogen. Dalam menganalisis kekuatan hubungan variabel mediator dengan variabel lainnya, peneliti dapat memperkuat pemahaman mengenai mekanisme yang mendasari hubungan sebab-akibat antara variabel eksogen dan variabel endogen (Hair, et al., 2022)

Mediasi terjadi ketika variabel mediator berada di antara dua variabel terkait lainnya. Lebih tepatnya, perubahan dalam variabel eksogen menyebabkan perubahan dalam variabel mediator, yang kemudian mengakibatkan perubahan dalam variabel endogen dalam model jalur. Dengan kata lain, variabel; mediator mengatur sifat hubungan antara dua variabel (Hair, et al., 2022). Variabel

intervening atau mediasi pada penelitian ini Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z).

c. Variabel Dependen (Y)

Menurut Creswell (2014, p. 52) bahwa, "*Dependent variables are those that depend on the independent variables; they are the outcomes or results of the influence of the independent variables*". Variabel Dependen adalah hasil dari pengaruh atau akibat karena adanya variabel independen. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y).

4.3.2 Definisi Operasional Variabel (DOV)

Menurut Syahrudin dan Salim (2012), definisi operasional variabel memiliki dua aspek penting. Pertama, definisi operasional merupakan proses untuk mengubah variabel penelitian menjadi bentuk yang dapat diukur dan dinyatakan secara empiris, atau dalam kata lain, menjadi sesuatu yang konkret dan jelas. Kedua, definisi operasional merujuk pada batasan-batasan atau parameter yang spesifik yang menetapkan kriteria yang pasti dan tetap untuk suatu variabel. Dengan menetapkan definisi operasional ini, variabel penelitian dapat dikendalikan dengan baik. Berikut ini adalah definisi operasional untuk masing-masing variabel:

1) Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah

Penilaian terhadap kinerja pemerintah mencakup seberapa efektif pemerintah memberikan layanan/kerja sama yang berkualitas, memiliki pegawai yang ahli, dan menunjukkan perilaku yang etis, yang dievaluasi berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan.

Indikator kinerja pemerintah menurut Yao (2014) melibatkan tiga aspek, yaitu kualitas layanan pemerintah, kompetensi pegawai, dan etika.

- a) Kualitas Layanan Pemerintah diukur melalui pengalaman kontak terbaru dengan pemerintah lokal. Seperti adanya hubungan kerjasama terbaru dengan pemerintah daerah.
- b) Kompetensi pegawai diukur melalui kompetensi pejabat publik selama kontak terbaru dengan pemerintah daerah. Hal ini menilai berbagai aspek pegawai pemerintahan.
- c) Etika diukur melalui aspek kejujuran, perlakuan adil, dan tanggung jawab dari pemerintah lokal. Hal ini menilai bagaimana pemerintah daerah bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

2) Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah elemen kunci yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam program pemerintah. Meskipun tidak ada definisi yang sepenuhnya diterima secara universal, secara umum, kepercayaan terkait dengan kemampuan, kebaikan hati, dan integritas. Ini melibatkan penerimaan kerentanan berdasarkan harapan positif terhadap perilaku orang lain. Terdapat tiga dimensi utama kepercayaan yang diidentifikasi, diambil dari bidang-bidang seperti sosiologi dan psikologi (Nulhusna, *et al*, 2017):

- a. Kepercayaan Disposisional: Ini mencerminkan kecenderungan seseorang untuk bergantung pada orang lain di berbagai situasi. Ini mencakup keyakinan pada kompetensi, kebaikan hati, dan integritas orang lain. Pada pemerintahan dapat diimplementasikan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pada pemerintahan.

- b. Kepercayaan Institusional: Dimensi ini terkait dengan persepsi individu terhadap lingkungan institusional, Hal ini seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah layanani.
- c. Kepercayaan Antarpribadi: Fokusnya adalah pada keyakinan khusus terhadap penyedia layanan, seperti lembaga pemerintah dalam konteks ini seperti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan hasil dari kebijakan.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kepercayaan dalam konteks pemerintah dalam lingkup pembinaan jasa konstruksi, mencakup predisposisi individu dan persepsi tentang hubungan institusional dan antarpribadi, yang semuanya memengaruhi kemauan individu untuk menggunakan layanan pemerintah daerah.

3) Variabel Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

Partisipasi merujuk pada keinginan masyarakat untuk terlibat dalam suatu program pemerintah. Keberhasilan dalam pengambilan kebijakan tercermin dari tingkat partisipasi Masyarakat. Dalam penelitian Nulhusna, *et al* (2017), hal ini tercermin melalui niat untuk berkolaborasi atau mengikuti kegiatan pemerintah daerah. Keputusan untuk mengikuti kegiatan pemerintah daerah serupa dengan Keputusan konsumen untuk melanjutkan pembelian ulang karena keduanya dipengaruhi oleh pengalaman awal dan memiliki potensi untuk mengubah keputusan awal. Hal ini meliputi:

- a) Penerimaan pelayanan
- b) Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal

Berdasarkan definisi operasional variabel yang telah dijelaskan, maka dapat dipetakan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian (DOV)

No.	Konsep	Variabel dan Sumber	Indikator	Item
1	Persepsi kinerja pemerintah adalah seberapa baik pemerintah memberikan layanan/kerja sama, memiliki kompetensi pekerja, dan menunjukkan etika yang dinilai berdasarkan tingkat kepuasan yang diterima oleh penerima layanan	Persepsi Kinerja pemerintah (X) (Yao, 2014)	Kualitas Pelayanan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah menjalin hubungan kerja sama/bekerja bersama dengan pemerintah daerah dengan unsur masyarakat jasa konstruksi 2. Mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah terkait jasa konstruksi 3. Puas akan layanan pemerintah daerah terkait jasa konstruksi 4. Pemerintah memberikan layanan melebihi dari harapan. 5. Merasakan dampak positif dari regulasi/program/kegiatan pemerintah. 6. Puas akan penyelenggaraan forum jasa konstruksi. 7. puas akan hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi. 8. merasakan dampak dari hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.
			Kompetensi Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi mampu memahami tentang bidang yang ditekuni. 2. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi

No.	Konsep	Variabel dan Sumber	Indikator	Item
				<p>merupakan orang yang profesional.</p> <p>3. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan pelayanan secara efisien.</p> <p>4. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berusaha keras/proactive memberikan layanan terbaik.</p> <p>5. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berhati-hati, menghindari kesalahan (akurasi) dan memperbaiki kesalahannya.</p> <p>6. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki keahlian komunikasi yang baik.</p>
			Etika	<p>1. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaannya dengan jujur.</p> <p>2. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan perlakuan adil.</p> <p>3. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah.</p> <p>4. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur</p>

No.	Konsep	Variabel dan Sumber	Indikator	Item
				<p>(SOP) / tidak memiliki konflik kepentingan.</p> <p>5. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi tidak penerima hadiah/barang/jasa (gratifikasi) dari masyarakat guna mendapatkan layanan.</p> <p>6. Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi dapat menjaga kerahasiaan data privasi dari pengguna layanan.</p>
3.	Kepercayaan merupakan faktor kunci yang memengaruhi apakah seseorang akan berpartisipasi dalam program pemerintah atau tidak.	Kepercayaan masyarakat (Z) (McKnight, Choudhury, and Kacmar, 2002; Alsaghier <i>et al.</i> , 2009) pada (Nulhusa, 2017)	Kepercayaan Disposisional	<p>1. Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi peduli dengan kepuasan dari masyarakat pengguna layanan</p> <p>2. Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi dapat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya</p> <p>3. Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dengan baik.</p> <p>4. Yakin untuk tetap menggunakan layanan dari pemerintah selama tidak menemukan hal yang mengecewakan</p>
			Kepercayaan Institusional	<p>1. Senang dan percaya menggunakan layanan terkait jasa konstruksi</p>

No.	Konsep	Variabel dan Sumber	Indikator	Item
				<ol style="list-style-type: none"> 2. Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan butuhkan saat ini. 3. Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan berdasarkan UU. 4. Mengandalkan pembinaan jasa konstruksi melalui pemerintah daerah. 5. Percaya terhadap pemerintah sebagai perantara dan regulator terkait layanan jasa konstruksi 6. Percaya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Forum Jasa Konstruksi (FJK) 7. Percaya terhadap pemerintah sebagai pembina jasa konstruksi
			Kepercayaan Interpersonal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya terhadap regulasi yang sudah berjalan pada sektor jasa konstruksi 2. Percaya terhadap mekanisme pengambilan kebijakan dalam pembuatan regulasi jasa konstruksi 3. Percaya terhadap <i>output</i> kebijakan dalam penyelenggaraan FJK 4. Percaya terhadap tindak lanjut hasil FJK oleh pemerintah daerah
4.	Partisipasi adalah niat masyarakat untuk ikut terlibat dalam sebuah	Partisipasi Masyarakat (Y)	Penerimaan pelayanan (Tan, Benbasat, and Cenfetelli,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki niat/bermaksud untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK). 2. Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika mempunyai

No.	Konsep	Variabel dan Sumber	Indikator	Item
	program pemerintah		2008; Teo, Srivastava, and Jiang, 2008) pada Nulhusna, <i>et al</i> (2017)	<p>kepentingan/maksud tertentu.</p> <p>3. Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) merupakan salah cara untuk mengutarakan aspirasi.</p> <p>4. menghadiri kembali Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika diadakan kembali.</p>
			<p>Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal</p> <p>(Lee, Noh, dan Kim, 2013; Son, Kim, dan Jang, 2012) pada Nulhusna, <i>et al</i> (2017)</p>	<p>1. Membagikan pengalaman selama mengikuti Forum Jasa Konstruksi (FJK)</p> <p>2. Menyebarluaskan hasil dari Forum Jasa Konstruksi (FJK) ke masyarakat jasa konstruksi lainnya</p> <p>3. Mengajak teman untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK)</p> <p>4. Berkontribusi ke kegiatan Forum Jasa Konstruksi (FJK)</p>

Sumber : Olahan Peneliti (2024)

4.4. Skala Pengukuran

Menurut Martono (2015) skala pengukuran merupakan pembeda ukuran variabel yang didasarkan pada karakteristik kategori sebuah variabel. Perbedaan ini mempengaruhi cara memperlakukan dan menganalisis sebuah variabel dengan variabel yang lain. Ada empat (4) jenis skala pengukuran yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Pada penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert.

Tabel 4.2. Skala Likert

No.	Skala Jawaban	Skor / Nilai
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Cukup	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Martono (2015)

Menurut Martono (2015) skala Likert merupakan salah satu bentuk instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, atau sikap seseorang mengenai suatu objek. Pada skala Likert umumnya menggunakan lima (5) angka penilaian dan mempunyai gradasi dari positif sampai dengan negatif yang dapat berupa contoh jawaban dan skor yang diberikan untuk setiap item pertanyaan seperti pada tabel 4.2.

4.5. Populasi

Menurut Cooper (dalam Sudaryono, 2021) populasi berkaitan dengan seluruh kelompok orang, peristiwa atau benda yang menjadi pusat perhatian penelitian untuk diteliti. Idealnya peneliti dapat melakukan penelitian secara menyeluruh untuk menggambarkan keseluruhan subjek yang diteliti jika populasinya kecil. Jika penelitian dilakukan kepada seluruh elemen populasi maka dapat disebut sebagai penelitian populasi atau penelitian sensus. Groves *et al* (dalam Sudaryono, 2021) menyatakan bahwa sensus adalah upaya sistematis untuk menghitung seluruh populasi.

Menurut Sugiyono (2022:81) sampel adalah bagian dari dalam jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* atau mewakili populasi yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yakni sampel jenuh karena seluruh jumlah populasi dijadikan sampel. Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perwakilan masyarakat jasa konstruksi yang hadir atau diundang dalam forum jasa konstruksi sebanyak 71 perwakilan (data diambil pada tahun 2023) dan forum jasa konstruksi (FJK) 2022 yang terdiri dari berbagai unsur-unsur diantaranya Unsur Pemerintah Pusat, Unsur Pemerintah Provinsi, Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, Unsur Perguruan tinggi, Unsur Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Unsur Asosiasi.

Pemilihan populasi pada forum jasa konstruksi sesuai dengan amanat sesuai PP 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi (FJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Forum jasa konstruksi (FJK) memiliki manfaat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi serta meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembuat kebijakan di bidang jasa konstruksi.

Menurut UU No. 18 Tahun 1999, Forum jasa konstruksi (FJK) adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen dan mandiri. Forum jasa konstruksi (FJK) memberikan wadah bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyalurkan

aspirasinya kepada pemerintah. Masyarakat jasa konstruksi yang dimaksud ialah asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, pemerintah, mitra usaha jasa konstruksi, dan organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.

Serta pemilihan sampel jenuh pada tahun 2022 dan 2023 didasarkan kepada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan adanya pengaturan Cipta Kerja pada Sektor Konstruksi salah satunya perkuatan masyarakat jasa konstruksi jadi berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil sampel pada forum jasa konstruksi setelah UU Cipta Kerja disahkan yaitu tahun 2022 dan 2023 sedangkan 2024 pada saat penelitian dilakukan forum jasa konstruksi masih belum dilaksanakan.

Unsur- unsur yang dimaksud yaitu antara lain :

1. Keterwakilan Unsur Pemerintah Pusat
 - a. Perwakilan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin.
 - b. Perwakilan dari Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Kalimantan Utara
2. Keterwakilan Unsur Asosiasi Badan Usaha & Asosiasi Profesi
 - a. Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Perwakilan Gabungan Pelaksanaan Konstruksi Nasional (GAPENSI) Provinsi Kalimantan Utara.
 - c. Perwakilan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (IKINDO) Provinsi Kalimantan Utara.

- d. Perwakilan Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
 - e. Perwakilan Konsultan Indonesia (PERKINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
 - f. Perwakilan Asosiasi Kontraktor (ASKONAS) Provinsi Kalimantan Utara.
 - g. Perwakilan Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (GABPEKSI) Provinsi Kalimantan Utara.
 - h. Perwakilan Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia (PERKOPINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
 - i. Perwakilan Gabungan Tenaga Ahli Konstruksi (GATENSI) Provinsi Kalimantan Utara.
 - j. Perwakilan Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia (PERTAPIN) Provinsi Kalimantan Utara.
 - k. Perwakilan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Kalimantan Utara.
 - l. Perwakilan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Provinsi Kalimantan Utara.
 - m. Perwakilan Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Provinsi Kalimantan Utara.
 - n. Perwakilan Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia (HATSINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
 - o. Perwakilan Himpunan Tenaga Ahli konsultan Indonesia (PERTAHKINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
 - p. Perwakilan Perkumpulan Profesi Tenaga Teknik Indonesia (PERTATINDO) Provinsi Kalimantan Utara.
3. Keterwakilan Unsur Pemerintah Provinsi
- a. Perwakilan pejabat eselon 1 atau 2 pada Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Perwakilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara
 - c. Perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara.
 - d. Perwakilan dari Biro pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Utara.
 - e. Perwakilan dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara.
 - f. Perwakilan dari Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara.
 - g. Perwakilan dari BPSDM Provinsi Kalimantan Utara.
 - h. Perwakilan dari PUPR-Perkim Provinsi Kalimantan Utara.
 - i. Perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
 - j. Perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
 - k. Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.
 - l. Perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Utara.
 - m. Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
 - n. Perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Keterwakilan Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota
- a. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan.
 - b. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.
 - c. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Malinau
 - d. Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

- e. Perwakilan dari Pemerintah Kota Tarakan.
5. Keterwakilan Unsur Perguruan Tinggi.
- a. Perwakilan dari Universitas Borneo Tarakan.
 - b. Perwakilan dari Universitas Kaltara.
 - c. Perwakilan dari Politeknik Negeri Nunukan.
 - d. Perwakilan dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan.
6. Keterwakilan Unsur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

4.6. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini adalah informasi yang terkait dengan individu atau dokumen lain yang menjadi bagian dari objek penelitian. Peneliti menjelaskan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui pengamatan oleh peneliti maupun melalui respons terhadap pernyataan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden, sesuai dengan metode pengambilan sampel yang ditetapkan.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada informasi yang digunakan untuk mendukung hasil data primer. Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh pengumpulan data tidak secara langsung. Dalam konteks ini, peneliti tidak langsung terlibat dalam proses

pengumpulan data, tetapi menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lainnya (Martono, 2015). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari sumber tertulis, seperti naskah, peraturan perundang-undangan, hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS), studi kepustakaan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

4.7. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi dengan cara yang optimal. Hal ini memungkinkan data yang diperoleh dapat dikelompokkan, diproses, dan dianalisis sesuai dengan kerangka metode penelitian yang digunakan, sehingga hasilnya menjadi lebih akurat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi.

Kuesioner adalah instrumen utama yang digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif primer. Penggunaan kuesioner memungkinkan pengumpulan data kuantitatif dilakukan secara standar, sehingga data tersebut konsisten secara internal dan dapat dianalisis dengan koheren. Dalam penelitian ini, kuesioner disebar melalui media sosial dan juga secara langsung di lapangan. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab, sesuai dengan populasi dan sampel yang telah ditetapkan.

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dalam bentuk yang sudah jadi atau telah diolah oleh sumber informasi, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pencarian dengan pengolahan data terutama untuk memperkuat dasar teoritis yang terkait dengan masalah penelitian. Data dokumentasi yang

dimanfaatkan dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang diperoleh dari dokumen, statistik, dan sumber informasi lain yang relevan selama proses penelitian berlangsung. Data dokumentasi yang telah dikumpulkan kemudian disaring untuk memastikan keakuratan dan kecocokan sebelum dimasukkan ke dalam laporan penelitian.

4.8. Metode Analisis Data

Proses analisis data melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Tujuan utamanya adalah agar data yang disajikan memiliki makna dan memungkinkan pembaca untuk memahami hasil penelitian (Martono, 2015). Berikut ini adalah metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini:

4.8.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Lind, *et al.* (2006), statistik deskriptif adalah serangkaian metode yang digunakan untuk mengatur, mengikhtisarkan, dan menyajikan data dengan cara yang informatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menampilkan karakteristik data dengan jelas. Statistik deskriptif memberikan rangkuman informasi tentang sifat dan distribusi nilai dalam satu atau lebih set data. Pentingnya statistik deskriptif adalah memberikan gambaran tentang sampel yang diteliti tanpa membuat kesimpulan berdasarkan teori probabilitas (Kaliyadan & Kulkarni, 2019). Meskipun demikian, statistik deskriptif tetap berguna untuk memberikan ringkasan umum dalam mendeskripsikan populasi menggunakan alat seperti tabel distribusi, seperti rata-rata. Selain itu, statistik deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan suatu variabel tunggal (analisis univariat)

Analisis yang digunakan didasarkan pada nilai rata-rata (*mean*) dari variabel yang dievaluasi. Setelah memperoleh nilai rata-rata dari setiap variabel, langkah berikutnya adalah membandingkannya dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dan terendah yang dihasilkan dari kuesioner. Berikut ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata (*mean*):

<p>Untuk variable X</p> $Me = \frac{\sum xi}{n}$
--

<p>Untuk variable Y</p> $Me = \frac{\sum yi}{n}$
--

Keterangan:

Me = Rata-rata

$\sum xi$ = Jumlah nilai X ke-i sampai ke-n

$\sum yi$ = Jumlah nilai Y ke-i sampai ke-n

n = jumlah responden yang akan dirata-rata

Setelah seluruh data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan proses pengelompokan data. Pengelompokan ini dilakukan dengan mengkategorikan nilai rata-rata responden berdasarkan skala interval (1 hingga 5). Metode ini melibatkan perhitungan panjang kelas interval berdasarkan rumus yang dijelaskan dalam karya Susetyo (2010).

Tabel 4.3. Dasar Interpretasi Skor Rata – rata dalam Variabel Penelitian

Interval	Interpretasi
1-1,8	Sangat tidak setuju (STS)/ Sangat tidak sesuai/Rendah sekali
>1,8-2,6	Tidak setuju (TS)/ Tidak Sesuai/Rendah
>2,6-3,4	Netral (N)/ Ragu-ragu/ sedang/cukup
>3,4-4,2	Setuju (S) / Sesuai/Tinggi
>4,2- 5	Sangat setuju (SS) / Sangat sesuai/sangat tinggi

Sumber: Susetyo (2010:21)

4.8.2 Analisis SEM (*Structural Equation Modelling*)

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan memanfaatkan perangkat lunak SmartPLS versi.4. PLS adalah salah satu pendekatan yang termasuk dalam *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM memungkinkan peneliti untuk secara simultan memodelkan dan mengestimasi hubungan yang kompleks antara berbagai variabel dependen dan independen (Hari, *et al.*, 2022). SEM juga memungkinkan integrasi variabel yang tidak dapat diamati langsung, yang diukur melalui variabel indikator, serta membantu dalam menangani kesalahan pengukuran pada variabel yang teramati (Hair, *et al.*, 2014). Oleh karena itu, metode ini memungkinkan pengukuran yang lebih akurat terhadap konsep teoritis yang sedang diteliti (Cole & Preacher, 2014)

Dalam analisis ini menggunakan metode *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), juga dikenal sebagai *PLS path modeling*, yang dianggap sebagai pendekatan “kausal-prediktif” terhadap *Structural Equation Modeling* (SEM) (Hair, *et al.*, 2021). PLS-SEM difokuskan pada menjelaskan variasi dalam model variabel dependen, dan telah terbukti efisien dalam menangani sampel yang kecil dan model yang kompleks (Hair, *et al.*, 2019). Kelebihan PLS-SEM termasuk kemampuan untuk menangani model pengukuran reflektif dan formatif, serta konstruksi item tunggal. Oleh karena itu, PLS-SEM dapat diterapkan dalam berbagai konteks penelitian. Selain itu keunggulan statistik yang lebih besar berarti bahwa PLS-SEM lebih cenderung menemukan pengaruh signifikan pada hubungan tertentu jika hubungan tersebut memang ada dalam populasi (Hair, *et al.*, 2021).

Tabel 4.4. Prinsip Perbedaan SEM & PLS-SEM

Kriteria	PLS-SEM	CB-SEM
Objektif	Berorientasi pada prediksi	Berorientasi pada koefisien (<i>explanation</i>) berdasarkan Covarian
Pendekatan	Berdasarkan Varian	Berdasarkan Covarian
Model Struktural	<i>No causal loops</i>	<i>Causal Loops</i>
Koefisien Penduga	Konsisten saat koefisien dugaan dan ukuran sampel meningkat	Konsisten
Variabel laten dan Variable bebas	Dapat dimodelkan secara <i>Formative</i> dan <i>Reflective</i>	Umumnya hanya dapat dimodelkan oleh indikator <i>Reflective</i>
Implikasi	Optimal untuk akurasi prediksi	Optimal untuk akurasi koefisien
Asumsi Distribusi Data	Fleksibel (non-normal, kategorikal)	Normal, multivariat normal
Ukuran Sampel	Kecil (minimum 30-50)	Besar (minimum 100-150)
Kemampuan Multikolusi	Lebih toleran terhadap multikolusi dibandingkan CB-SEM	Sensitif terhadap multikolusi antar variabel, yang dapat menyebabkan bias dan hasil yang tidak akurat.
Fokus Analisis	Lebih fokus pada prediksi dan eksplorasi hubungan antar variabel	Lebih fokus pada pengujian hipotesis dan konfirmasi model teoritis.

Sumber : Sumarno, *et al* yang disadur dari Chin (2000) dan Hair *et al.* (2014)

Partial Least Square (PLS) adalah metode analisis yang kuat sebab tidak didasarkan pada banyak asumsi atau syarat, seperti uji normalitas dan multikolinearitas (Wold dalam Andreas, 2019). Peneliti memilih menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) karena beberapa alasan, yaitu :

1. Sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat prediksi atau eksplorasi;

2. Indikator dalam kuesioner berbentuk reflektif yang dapat dihitung menggunakan partial least square;
3. Model penelitian berupa *second order factor* yang merupakan model yang cukup kompleks.
4. Tidak memiliki masalah terhadap jumlah sampel yang kecil.

Model jalur PLS terdiri dari dua bagian utama. Pertama adalah *Outer Model*, yang merupakan hubungan antara variabel laten dan indikator yang diamati. Kedua adalah *Inner Model*, yang menetapkan hubungan antara variabel laten independen dan dependen (Hair, *et al.*, 2021). Sebelum melanjutkan ke pengujian teori struktural, peneliti biasanya menguji teori pengukuran untuk memastikan reliabilitas dan validitas model pengukuran. Hal ini dilakukan karena teori struktural tidak dapat dikonfirmasi jika pengukuran yang digunakan tidak dapat diandalkan atau valid. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa model pengukuran terkonfirmasi sebelum melanjutkan ke pengujian teori.

4.8.2.1 Model Pengukuran atau *Outer Model*

Dalam penelitian ini, model pengukuran mengadopsi pendekatan model pengukuran reflektif. Konsep model pengukuran reflektif adalah bahwa ukuran atau indikator yang digunakan mencerminkan efek atau menifestasi dari konstruksi yang mendasarinya (Hair, *et al.*, 2021). Dalam konteks penelitian ini, indikator-indikator yang terkait dengan konstruksi tertentu cenderung memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Asumsinya adalah bahwa terdapat penyebab yang sama untuk item-item dalam konstruksi tersebut, sehingga mereka dapat dikorelasikan.

Reliabilitas

Reliabilitas adalah sekelompok tes yang bertujuan untuk menilai kehandalan pernyataan dalam sebuah instrumen. Ini menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dapat diandalkan atau dipercaya (Zuriah, 2009). Konsep ini berdasarkan pada teori kesalahan pengukuran. Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian (Hair, *et al.*, 2021). Menurut Hair *et al.*, (2021), terdapat beberapa langkah dalam menguji reliabilitas, seperti uji reliabilitas indikator dan konsistensi internal.

a. Indikator Reliabilitas

Langkah awal dalam evaluasi model pengukuran reflektif adalah mengevaluasi seberapa besar varians dari setiap indikator yang dijelaskan oleh konstruksinya, yang merupakan indikasi reliabilitas indikator. Untuk menghitung varians yang dijelaskan oleh suatu indikator, langkah pertama adalah mengkuadratkan beban indikator, yang merupakan korelasi antara indikator dan konstruksi. Oleh karena itu, reliabilitas indikator dapat dilihat dari komunalitasnya. Direkomendasikan bahwa beban indikator seharusnya di atas 0,708 karena ini menunjukkan bahwa konstruksi tersebut menjelaskan lebih dari 50 persen varians dari indikator, yang menandakan reliabilitas indikator yang dapat diterima (Hair, *et al.*, 2021)

b. *Internal Consistency Reliability*

Langkah kedua dalam evaluasi model pengukuran reflektif adalah menilai reliabilitas konsistensi internal. Reliabilitas konsistensi internal mengukur

seberapa erat hubungan antara indikator yang mengukur konstruk yang sama. Salah satu metrik utama dalam PLS-SEM adalah Koefisien Reliabilitas ρ_a , yang biasanya memiliki rentang tertentu dan merupakan indikator yang baik dari konsistensi internal reliabilitas konstruk. Untuk memastikan validitas konten dan menghindari redundansi indikator, disarankan agar koefisien reliabilitas tetap berada antara batas minimum 0,70 (atau 0,60 dalam penelitian eksploratif) dan batas maksimum 0.95 (Hair, *et al.*, 2021).

Uji Validitas

Pengujian validitas adalah langkah penting dalam menilai keabsahan suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2016, p.267) validitas merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan pada objek penelitian sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh peneliti, Uji validitas bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan suatu kuesioner tersebut mencerminkan aspek yang diukur dengan baik. Dalam penelitian ini, validitas diuji untuk setiap item pertanyaan pada setiap variabel. Proses pengujian validitas akan mencakup beberapa tahap, termasuk *convergent validity* dan *discriminant validity* (Hair, *et al.*, 2021)

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity mencerminkan seberapa baik konstruk tersebut berkumpul untuk menjelaskan variasi dalam indikator (Hai, *et al.*, 2021). Untuk menilai validitas konvergen suatu konstruk, parameter yang digunakan adalah rata-rata *variance extracted* (AVE). AVE dihitung sebagai rata-rata dari kuadrat beban indikator yang terkait dengan konstruk (yaitu, jumlah kuadrat beban dibagi dengan jumlah indikator) (Hair, *et al.*, 2021). Dengan demikian, AVE dapat dianggap sebagai indikasi dari seberapa banyak varians yang dijelaskan oleh

konstruk tersebut. Standar minimum yang dapat diterima untuk AVE adalah 0,50 atau lebih menunjukkan bahwa konstruk tersebut menjelaskan 50 persen atau lebih dari variasi dalam indikator yang membentuk konstruk tersebut (Hair, *et al.*, 2021)

b. *Discriminant Validity*

Metrik ini menilai seberapa jauh suatu konstruk berbeda secara empiris dari konstruk lain dalam model struktural. Penelitian ini menerapkan teknik *cross loading*, di mana setiap konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa konstruk lainnya. Standar nilai *cross loading* yang diharapkan adalah $>0,7$ (Hair, *et al.*, 2011).

Uji Kolinearitas

Kolinearitas terjadi ketika dua atau lebih indikator dalam model pengukuran reflektif memiliki korelasi yang tinggi. Korelasi yang tinggi dapat meningkatkan ketidakpastian dalam bobot indikator, yang berpotensi menyebabkan kesalahan tipe II, yaitu hasil negatif palsu. Bahkan, tingkat kolinearitas yang signifikan dapat mengubah arah bobot indikator, yang dapat membingungkan dalam interpretasi (Hair, *et al.*, 2021). Hair, *et al.* (2021) menyatakan bahwa kolinearitas menjadi masalah jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) berada dalam rentang 3-5. Namun, kolinearitas menjadi masalah jika nilai VIF adalah 5 atau lebih.

4.8.2.2 Model Struktural atau Inner Model

Sesuai dengan panduan yang disusun oleh Hair, *et al.*, (2021), dalam tahap analisis inner model, beberapa langkah penting harus diikuti, tahap awal melibatkan pemeriksaan model struktural untuk mengidentifikasi kemungkinan

masalah kolinearitas. Selanjutnya, evaluasi dilakukan terhadap signifikansi dan relevansi hubungan dalam model struktural, yang direpresentasikan oleh koefisien jalur. Langkah berikutnya dalam prosedur ini adalah pengujian kekuatan penjelasan dan prediksi dari model. Di samping itu, dalam beberapa situasi penelitian, penting untuk melakukan perhitungan dan perbandingan model alternatif, yang mungkin muncul dari teori atau konteks yang berbeda. PLS-SEM memfasilitasi perbandingan model alternatif dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, seperti biasanya digunakan dalam literatur regresi.

Tabel 4.5. Aturan Praktis Untuk Penilaian Inner Model

Kriteria	Metrik dan ambang batas
Significance and relevance of the path coefficients	<i>Apply bootstrapping to assess the significance of the path coefficients on the ground of t-values or confidence intervals Assess the magnitude of path coefficients Assess the f2 values for each path and check that they follow the same rank order as the path coefficient magnitude</i>
R² values	<i>R² values of 0.75, 0.50, and 0.25 are considered substantial, moderate, and weak. However, R² values have to be interpreted in the context of the model and its complexity. Excessive R² values indicate that the model overfits the data</i>
PLS_{predict}	Fokus pada satu konstruk target utama dalam analisis Tetapkan k = 10, dengan asumsi setiap subkelompok memenuhi ukuran sampel minimum yang disyaratkan Gunakan sepuluh pengulangan Bandingkan nilai RMSE (atau MAE) yang dihasilkan oleh PLS-SEM dengan nilai yang dihasilkan oleh LM untuk setiap indikator. Periksa apakah analisis PLS-SEM (dibandingkan dengan LM) menghasilkan kesalahan prediksi yang lebih rendah dalam hal RMSE (atau MAE) untuk semua (kekuatan prediksi tinggi), mayoritas atau jumlah yang sama (kekuatan prediksi sedang), minoritas (kekuatan prediksi rendah) kekuatan), atau tidak ada satupun indikatornya (tidak ada kekuatan prediksi)

	Gunakan pendekatan DA untuk menghasilkan prediksi dalam model mediasi
--	---

Sumber: Hair, *et al.* (2021, p. 123).

a. Uji Signifikan dan Relevansi Koefisien Jalur

Pada langkah selanjutnya, penting untuk memeriksa signifikansi dan relevansi koefisien jalur. Signifikansi pengaruh tersebut dapat dinilai berdasarkan kesalahan standar *bootstrapping*, yang menjadi dasar perhitungan nilai P atau T values. Koefisien jalur dianggap signifikan jika nilainya berada di bawah tingkat 5% atau 0,05. Selain itu, relevansi koefisien jalur dievaluasi dalam rentang antara -1 dan +1. Nilai koefisien yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat, sementara nilai yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat.

Peneliti juga dapat mengevaluasi bagaimana penghapusan konstruk prediktor tertentu mempengaruhi nilai R Square konstruk endogen. Salah satu metrik yang digunakan untuk ini adalah ukuran F Square, yang mirip dengan ukuran koefisien jalur. Secara khusus, urutan relatif relevansi konstruk prediktor dalam menjelaskan konstruk dependen dalam model struktural sering kali sama antara ukuran koefisien jalur dan ukuran efek F Square. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan ukuran efek F Square sebagai tambahan terhadap hasil analisisnya.

Selain itu, dalam konteks penelitian, seperti analisis mediasi, penting untuk melaporkan ukuran dampak, seperti F Square. Harus dicatat bahwa nilai efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total yang disebutkan sebelumnya hanya mencerminkan nilai estimasi koefisien. F Square menggambarkan dampak variabel (secara kualitatif) pada tingkat struktural. Secara umum, nilai F Square sekitar 0,02, 0,15, dan 0,35 dapat dianggap sebagai efek kecil, sedang, dan besar,

sesuai dengan pedoman yang dikemukakan oleh Cohen (1988), seperti yang dijelaskan dalam karya Hair, *et al.* (2021)

Penelitian ini menggunakan Rumus v yang dijelaskan oleh Lachowicz, *et al.* (2018) untuk menjelaskan total efek pengaruh mediasi antar variabel yang dapat dilihat pada rumus di bawah ini:

Rumus Upsilon V:

$$\begin{aligned} v &= \beta_{YM.X}^2 - [\beta_{YX}^2 + \beta_{YM.X}^2(1 - \beta_{MX}^2) - \beta_{YX}^2] \\ &= \beta_{YM.X}^2 - \beta_{YM.X}^2(1 - \beta_{MX}^2) \\ &= \beta_{MX}^2 \beta_{YM.X}^2 \end{aligned}$$

Maka interpretasi nilai statistik v merujuk pada Ogbeibu *et al.* (2021) efek v terstandarisasi kuadrat harus lebih besar dari 0,175 untuk efek besar, 0,075 untuk efek sedang, dan 0,01 untuk efek kecil, sehingga lebih sesuai untuk efek tidak langsung.

Selanjutnya, dalam menganalisis mediasi, mengikuti panduan yang disusun oleh Hair, *et al.* (2021), ada tiga langkah dalam analisis mediasi yang sistematis: pertama, evaluasi model mediasi, yang memerlukan pemenuhan semua kriteria kualitas pengukuran dan model struktural. Kedua, karakterisasi hasil, untuk menguji jenis mediasi dalam suatu model, serangkaian analisis diperlukan. Menurut Zhao, *et al.* (2010), ada tiga jenis mediasi yang digunakan di penelitian ini yaitu: mediasi parsial (atau mediasi komplementer), efek penekan (atau mediasi kompetitif), dan mediasi penuh (atau media tidak langsung saja)

Tahap ketiga dalam uji analisis mediasi adalah menguji efek mediasi menggunakan metode *Bootstrapping*, yang sangat sesuai dengan metode PLS-

SEM. *Bootstrapping* efek tidak langsung menghasilkan tingkat kekuatan statistik yang lebih tinggi daripada uji Osbel (Zhao, *et al.*, 2010)

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada konstruk endogen dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar variasi yang dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel endogen, yang juga menggambarkan kekuatan model dalam menjelaskan data dan sering disebut sebagai kekuatan prediksi dalam sampel. Rentang nilai R^2 sekitar 0,75, 0,05, dan 0,025 dapat dianggap sebagai substansial, sedang, dan lemah, sesuai dengan standar yang umumnya diterima di berbagai disiplin ilmu sosial (Hair, *et al.*, 2021)

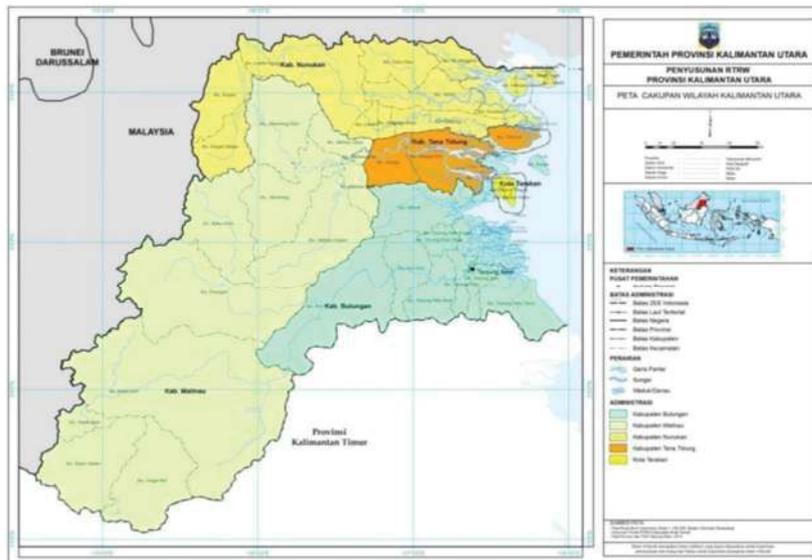
BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

5.1.1 Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara dibentuk menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) didasarkan pada UU Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 16 November 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai Provinsi baru di kawasan regional Kalimantan dan menjadi provinsi ke-34 di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara diresmikan pada tanggal 22 April 2013 dengan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara adalah Dr. H. Irianto Lambrie yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Pelantikan Penjabat Gubernur Kalimantan Utara ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No.48/P Tahun 2013 tanggal 20 April 2013.



Gambar 5.1. Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan
Sumber : RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Provinsi Kalimantan Utara terletak pada posisi antara 114⁰35'22" – 118⁰03'00" Bujur Timur dan antara 1⁰21'36" – 4⁰24'55" Lintang Utara. Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas ± 75.467,70 km² dengan luas lautan seluas 11.579 Km² (13% dari luas wilayah total). Secara administratif Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan negara Malaysia tepatnya dengan negara bagian Sabah (sebelah utara) dan Serawak (sebelah barat), Malaysia. Batas daerah daratan terdapat sekitar 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia. Sedangkan sebelah timur, Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Provinsi Kalimantan Utara berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia / *Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar / *outlet* ke Asia Pasifik. Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Bulungan sebagai Ibukota Provinsi, Kabupaten Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Tabel 5.1. Luas Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota (1)	Ibukota Kabupaten/Kota (2)	Luas (km ² /sq.km) (3)
Kabupaten Malinau	Malinau Kota	38.902
Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	13.880
Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	3.504
Kabupaten Nunukan	Nunukan	13.564
Kota Tarakan	Tarakan	251
Provinsi Kalimantan Utara	Bulungan	70.101

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

5.1.1.1 Kondisi Penduduk

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Juni) sebanyak 730,01 ribu penduduk yang terdiri dari 384,01 ribu penduduk laki-laki dan 346,00 ribu penduduk perempuan. Dari 730,01 ribu penduduk, 34,39 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,76 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung. Selama tahun 2022–2023, penduduk Provinsi Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan sebesar 1,44 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 111,0, yang berarti bahwa pada tahun 2023 di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 111 penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara (BPS RI, 2023).

Tabel 5 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	32 571	31 142	63 713
5–9	29 094	27 854	56 948
10–14	30 679	28 912	59 591
15–19	34 036	31 246	65 282
20–24	33 881	30 887	64 768
25–29	33 426	30 214	63 640
30–34	32 699	29 300	61 999
35–39	31 433	27 929	59 362
40–44	29 196	25 595	54 791
45–49	26 344	22 772	49 116
50–54	21 972	18 714	40 686
55–59	17 295	14 489	31 784
60–64	12 793	10 699	23 492
65–69	8 486	7 129	15 615
70–74	5 314	4 577	9 891
75 +	4 791	4 541	9 332
Jumlah/Total	384 010	346 000	730 010

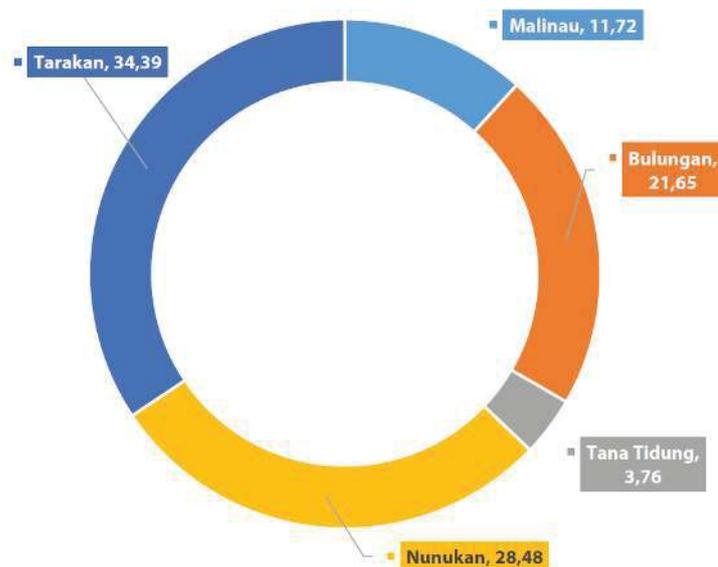
Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 5.3. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2020 – 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Rasio Jenis Kelamin Population Sex Ratio		
	2020 ¹	2023 ²	2024 ²
(1)	(13)	(14)	(15)
Malinau	114,6	113,5	113,1
Bulungan	115,0	113,8	113,4
Tana Tidung	114,5	112,9	112,4
Nunukan	113,2	112,4	112,1
Tarakan	107,9	107,1	106,8
Kalimantan Utara	111,9	111,0	110,7

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

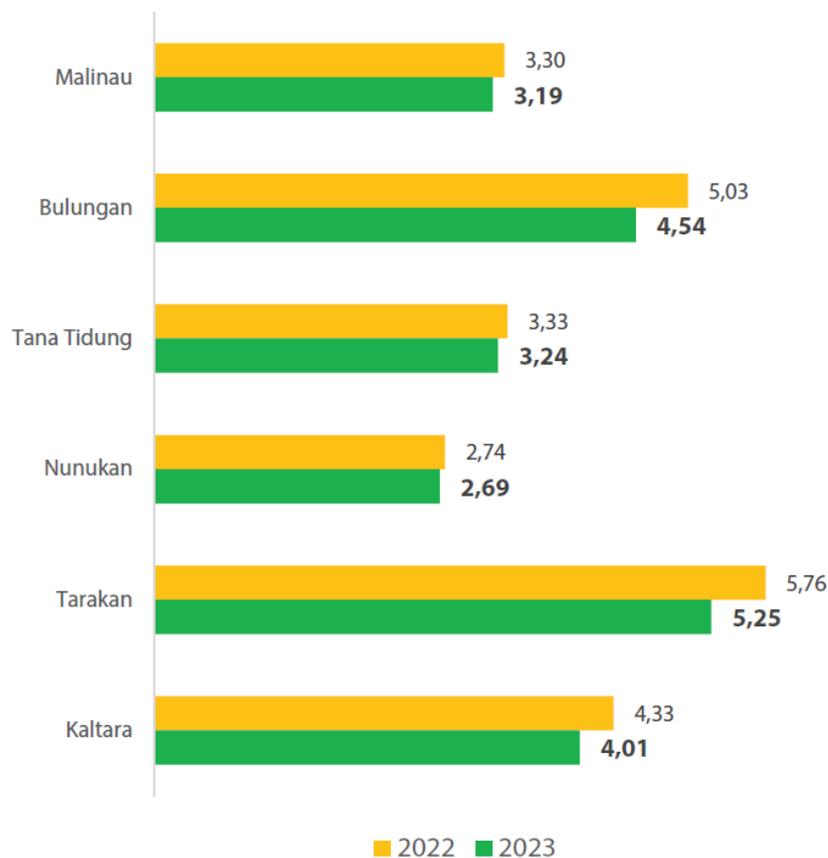
Dari 730,01 ribu penduduk di Provinsi Kalimantan Utara, 34,39 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kota Tarakan, dan hanya 3,76 persen penduduk Provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Tana Tidung.



Gambar 5.2. Distribusi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi pasar tenaga kerja di suatu daerah. Dari gambar 5.3 dapat dilihat bahwa tingkat TPT menurut kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2022–2023 menunjukkan Provinsi Kalimantan Utara memiliki tingkat TPT pada tahun 2023 pada 4,01 % atau lebih rendah dengan TPT tahun 2022 yang berada pada 4,33 %. Hal ini senada dengan yang terjadi di kabupaten/kota, untuk lebih jelasnya bisa melihat gambar 5.3.

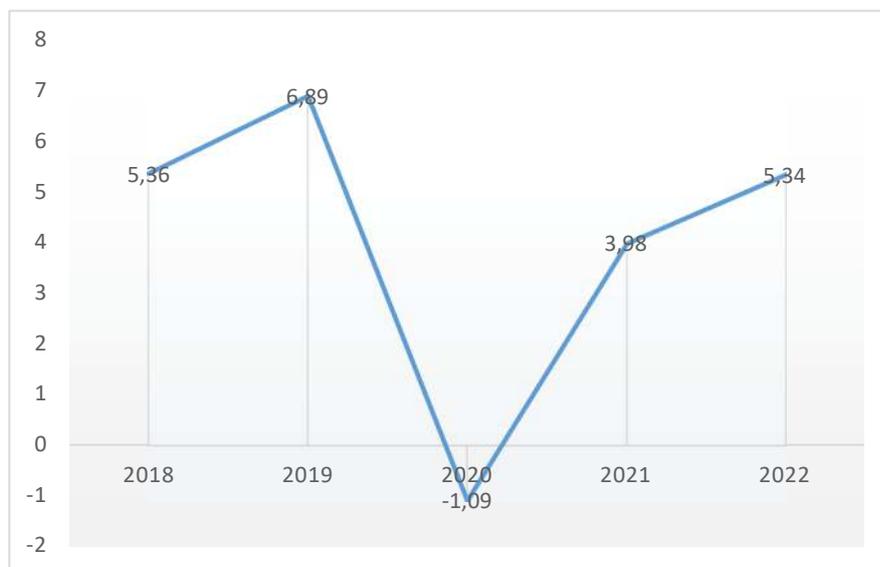


Gambar 5.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2022– 2023

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

5.1.1.2 Keadaan Perekonomian

Perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB merupakan salah satu indikator yang penting dalam analisis perkembangan wilayah. PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.



Gambar 5.4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2023

1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2022, PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 138,72 triliun rupiah dan PDRB ADHK 2010 mencapai 66,53 triliun rupiah. Dilihat dari distribusi persentase PDRB ADHB menurut lapangan usaha, pada tahun

2022, sebesar 36,42 % merupakan distribusi tertinggi pada PDRB ADHB di Provinsi Kalimantan Utara. Distribusi tertinggi tersebut adalah distribusi dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Tiga distribusi tertinggi lainnya pada PDRB ADHB tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Utara adalah pertanian, kehutanan dan perikanan (14,06 %), konstruksi (10,82 %), dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,11 %).

Laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 tumbuh 5,34 %. Laju pertumbuhan tertinggi bila dilihat menurut lapangan usaha di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (10,94 %), diikuti oleh transportasi dan pergudangan (10,38 %) serta jasa lainnya (9,55 %). Dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor barang dan jasa merupakan komponen jenis pengeluaran dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 yang mencapai 77,82 triliun rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

PDRB tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 adalah Kota Tarakan yang mencapai 47,49 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 24,22 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010. Diikuti oleh Kabupaten Nunukan (40,23 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 17,20 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010) dan Kabupaten Bulungan (24,22 triliun rupiah untuk PDRB ADHB dan 12,64 triliun rupiah untuk PDRB ADHK 2010).

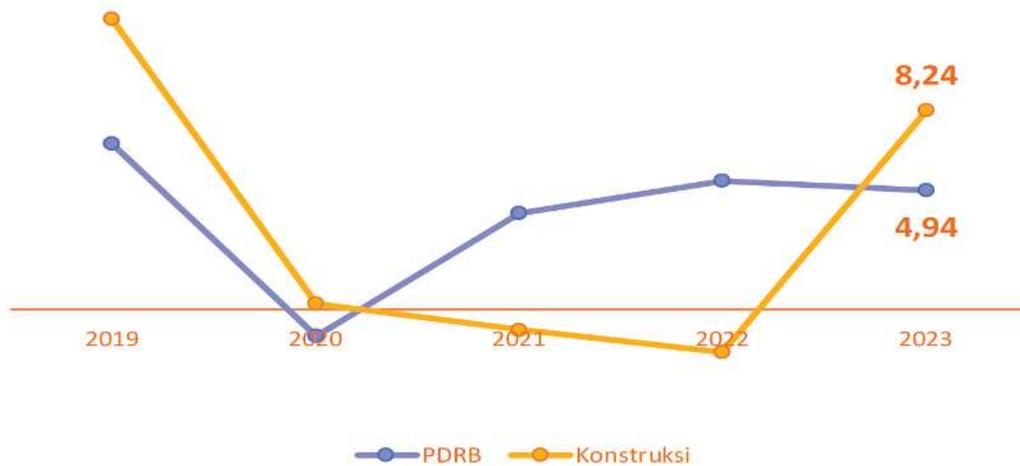
Pada tahun 2022, Kota Tarakan menjadi kota di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase kontribusi tertinggi terhadap jumlah PDRB seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 yang mencapai 34,38 %. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Nunukan (29,12 %) dan Kabupaten

Bulungan (17.54 %). Pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tertinggi adalah Kabupaten Tana Tidung dengan nilai PDRB per kapita ADHB mencapai 312,29 juta rupiah. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Malinau (205,98 juta rupiah) dan Kabupaten Nunukan (193,13 juta rupiah).

5.1.2 Gambaran Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara

Dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Utara, sektor konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat sektor konstruksi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto sebesar 11,45 persen pada tahun 2023. Sektor konstruksi merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara setelah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Namun, sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,24 persen dibandingkan tahun 2022 yang pertumbuhannya mencapai -1,76 persen.

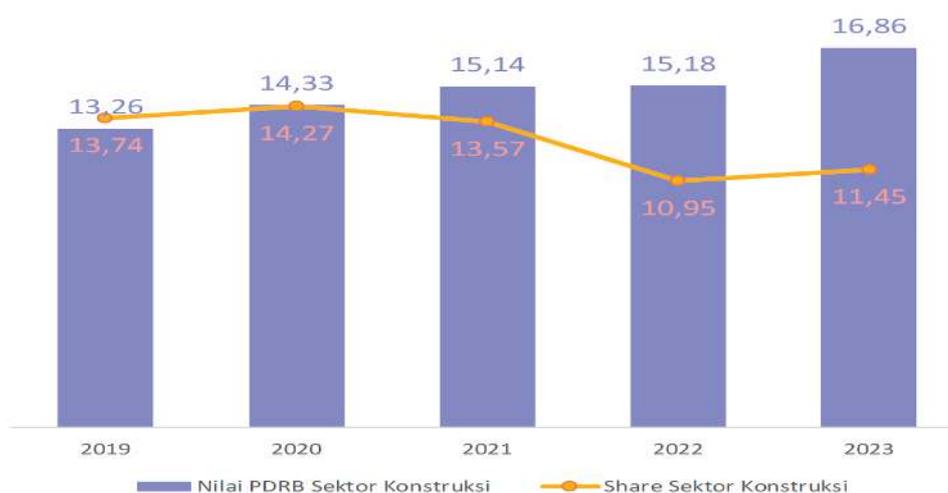
Seiring dengan gencarnya pembangunan infrastruktur sebagai roda pemacu pertumbuhan ekonomi, memberikan hubungan timbal balik terhadap sektor konstruksi. Dampak yang diberikan kepada sektor konstruksi tercermin dari peningkatan nilai tambah bruto di sektor tersebut.



Gambar 5.5. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi dan PDRB Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2019-2023

Sumber : Statistik Konstruksi Kaltara(BPS), 2024

Namun, pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor konstruksi mengalami kenaikan hingga mencapai 4,94 persen. Selain karena pandemi COVID-19, penurunan permintaan terkait kegiatan konstruksi baik dari masyarakat maupun pemerintah juga menjadi faktor penyebab melambatnya pertumbuhan sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 5.6. Nilai dan Share Sektor Konstruksi pada PDRB Provinsi Kalimantan Utara (Triliun & persen), 2019-2023

Sumber : Statistik Konstruksi Kaltara(BPS), 2024

Tenaga kerja di provinsi Kalimantan utara masih didominasi dengan pekerjaan buruh, kecenderungan ini dikhawatirkan merupakan dampak dari sedikitnya lapangan kerja yang mengakomodir sektor-sektor khusus, contohnya sektor konstruksi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya pembinaan masyarakat untuk memiliki keahlian khusus dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Dominasi pekerja buruh/karyawan/pegawai menjadi lowongan pekerja yang menyerap tenaga kerja paling banyak mulai dari latar belakang pendidikan SD hingga Perguruan Tinggi. Namun, tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara masih cukup rendah melihat penyerapan tenaga kerja terbanyak setara dengan tingkat SD.

Tabel 5.4. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kalimantan Utara, 2023

Lapangan Pekerjaan Utama ¹ Main Industry ¹	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment				Jumlah Total
	≤ SD ≤ Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Perguruan Tinggi College	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	68.184	21.669	29.202	4.144	123.199
B	1.430	1.914	5.967	1.180	10.491
C	9.043	3.571	9.652	2.244	24.510
D	46	4	803	804	1.657
E	825	365	1.082	73	2.345
F	7.405	4.948	6.077	1.082	19.512
G	17.511	10.943	26.263	4.781	59.498
H	3.980	1.994	8.982	1.318	16.274
I	8.126	5.991	9.647	1.445	25.209
J	75	54	902	567	1.598
K	156	131	1.229	1.978	3.494
L	395	153	174	334	1.056
M,N	1.414	974	3.478	1.565	7.431
O	790	770	15.294	16.414	33.268
P	73	336	3.977	17.117	21.503
Q	873	209	2.559	6.539	10.180
R,S,T,U	2.646	2.491	4.906	1.002	11.045
Jumlah/ Total	122.972	56.517	130.194	62.587	372.270

Catatan/Note: ¹ A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing
 B. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying
 C. Industri Pengolahan/Manufacturing
 D. Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas
 E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities
 F. Konstruksi/Construction
 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles
 H. Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage
 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities
 J. Informasi dan Komunikasi/Information and Communication
 K. Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities
 L. Real Estat/Real Estate Activities
 M, N. Jasa Perusahaan/Business Activities
 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security
 P. Jasa Pendidikan/Education
 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities
 R, S, T, U. Jasa Lainnya/Other Services Activities

Sumber : Kaltara Dalam Angka (BPS), 2024

Jumlah perguruan tinggi di Provinsi Kalimantan Utara sangat terbatas dan tidak seluruhnya memiliki pendidikan bidang konstruksi sehingga terdapat keterbatasan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berlatar pendidikan konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas

pendidikan. Dari gambar 5.7 dapat diketahui jumlah perguruan tinggi di setiap kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara masih terbilang minim, hanya di Kota Tarakan yang memiliki 7 perguruan tinggi, bahkan di Kabupaten Tana Tidung belum memiliki perguruan tinggi pada daerahnya.

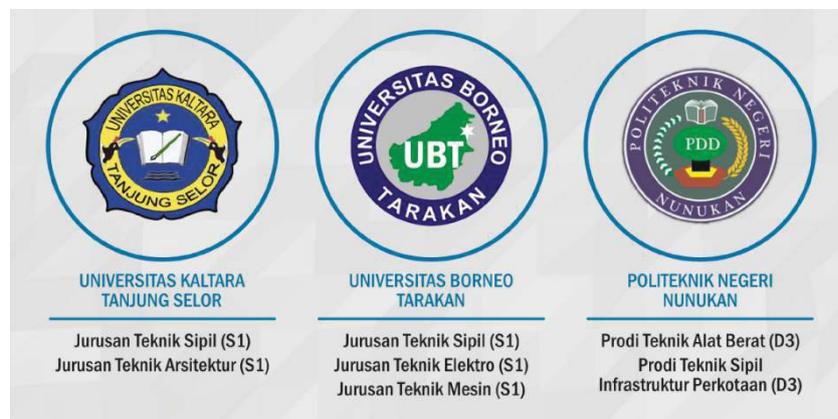


Gambar 5.7. Sarana Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Bidang Jasa Konstruksi, PUPR-Perkim Kaltara 2023

Jurusan Konstruksi di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan daerah dengan potensi besar untuk pembangunan infrastruktur dikarenakan letaknya yang merupakan beranda dari Negara Indonesia. Dengan adanya jurusan konstruksi di perguruan tinggi, akan dihasilkan tenaga kerja terampil yang siap berkontribusi dalam proyek-proyek pembangunan, seperti jalan raya, jembatan, bangunan komersial, dan perumahan. Jurusan konstruksi di perguruan tinggi membantu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia lokal. Lulusan dari program ini akan memiliki keterampilan teknis yang diperlukan untuk memenuhi standar industri konstruksi, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah. Namun dalam kenyataannya jumlah jurusan atau perguruan tinggi yang membuka jurusan yang berkaitan dengan konstruksi sangatlah sedikit. Hanya ada 3 perguruan tinggi yang membuka jurusan konstruksi antara lain Universitas Kaltara, Universitas Borneo Tarakan dan Politeknik Negeri Nunukan.



Gambar 5.8. Jumlah Jurusan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara

Sumber : Bidang Jasa Konstruksi, PUPR-Perkim Kaltara 2023

Pertumbuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah salah satu indikator penting dalam menilai perkembangan sektor konstruksi di suatu wilayah, termasuk Provinsi Kalimantan Utara. BUJK mencakup perusahaan yang bergerak dalam berbagai layanan konstruksi, seperti konstruksi bangunan, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Pertumbuhan BUJK mencerminkan kondisi ekonomi suatu daerah. Peningkatan jumlah BUJK biasanya terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor konstruksi. Data statistik dari Bidang Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Utara dapat menunjukkan tren ini, seperti yang terlihat dari laporan tahunan mereka tentang sektor konstruksi. Peningkatan

pertumbuhan BUJK sangat tinggi tapi dilihat dari jumlahnya masih sangat jauh tertinggal.



Gambar 5.9. Pertumbuhan BUJK tahun 2016 - 2022

Sumber : Bidang Jasa Konstruksi, PUPR-Perkim Kaltara 2023

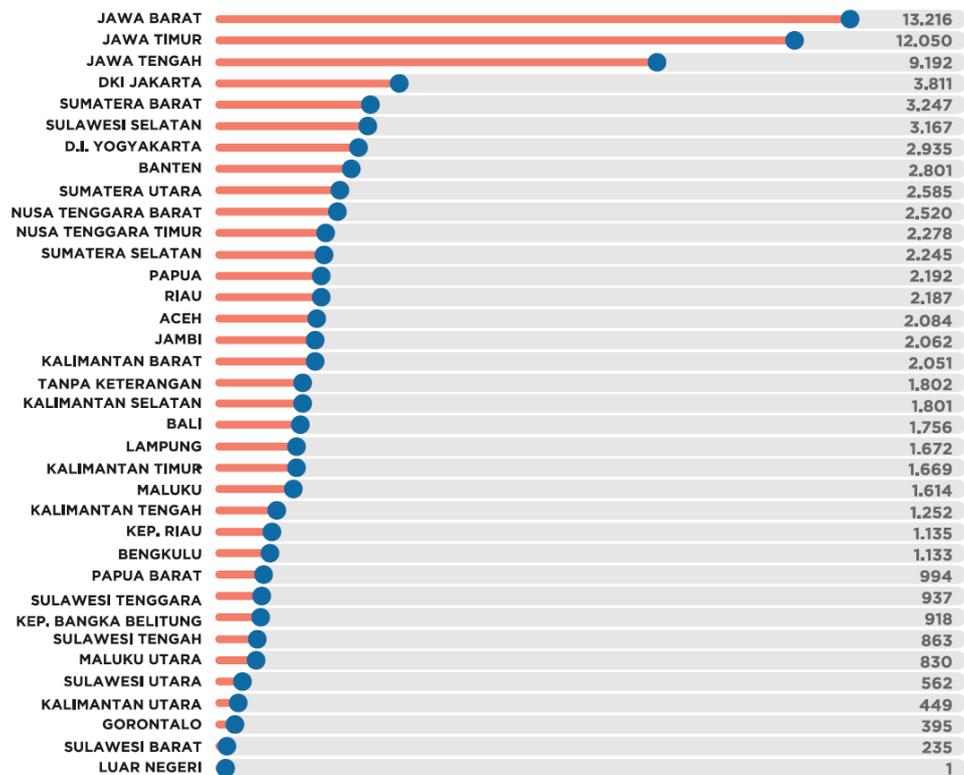
Keanggotaan dalam asosiasi dan badan usaha di sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara adalah aspek penting yang mendukung perkembangan industri ini. Asosiasi-asosiasi ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi, kerja sama, dan pertukaran informasi di antara para anggotanya. Asosiasi badan usaha bertujuan untuk meningkatkan standar profesionalisme di sektor konstruksi. Asosiasi - asosiasi tersebut menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan program pengembangan untuk memastikan bahwa para anggotanya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan standar tinggi.



Gambar 5.10. Persentase Keanggotaan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Sumber : Bidang Jasa Konstruksi, PUPR-Perkim Kaltara 2023

Berdasarkan Permen PUPR No.8 Tahun 2022 Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Seperti halnya BUJK, setelah terbitnya UU Cipta Kerja mekanisme penerbitan SKK mengalami perubahan. Hingga tahun 2023 masih dalam masa transisi, sehingga terdapat dua versi terbitan yaitu dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikat profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Nantinya sertifikasi diselenggarakan oleh LSP terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan tercatat di LPJK.



Gambar 5.11. Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi *terbitan LPJK

Sumber : Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (31 Desember 2023)

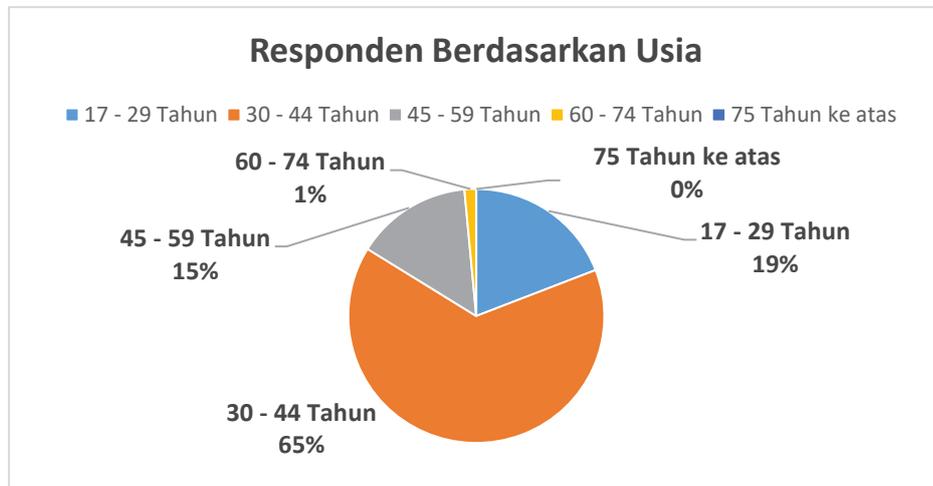
Berdasarkan Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LPJK Tahun 2023 terdapat 90.641 TKK dengan jumlah TKK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 13.216 TKK. Berdasarkan grafik Sebaran Tenaga Kerja Konstruksi yang terdaftar di LSP Tahun 2023 terdapat 239.652 TKK dengan jumlah TKK terbanyak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 33.240 TKK. Serta posisi Kalimantan Utara pada terbitan LPJK sebanyak 449 TKK dan pada terbitan LSP sebanyak 940 TKK.



Gambar 5.13. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

5.2.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Distribusi responden berdasarkan usia dapat dijelaskan melalui gambar 5.14 yakni sebagai berikut:



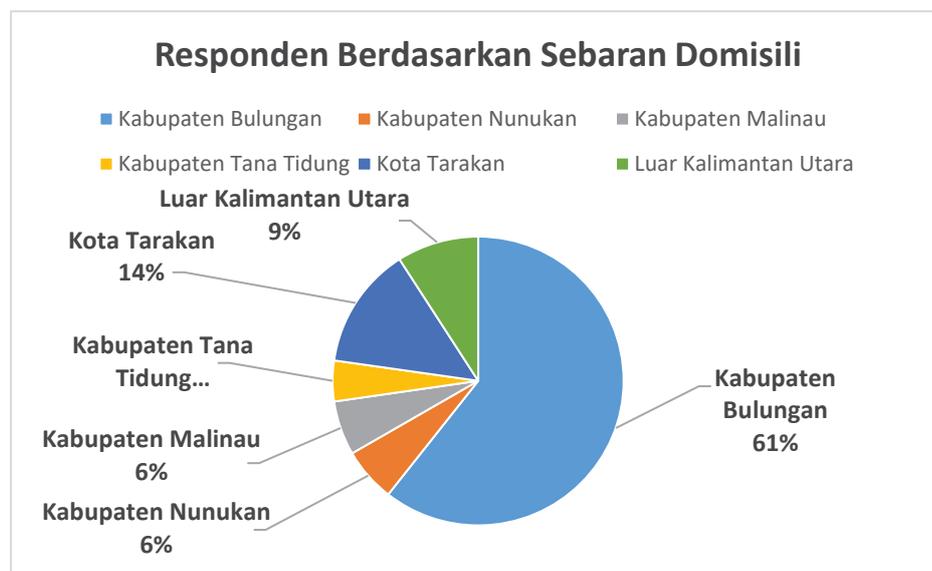
Gambar 5.14. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.14 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 30 - 44 tahun sebanyak 65%. Kemudian diikuti oleh responden yang berusia 17 - 29 tahun sebanyak 19%. Selanjutnya responden

yang berusia 45 - 59 tahun sebanyak 15%. Responden dengan rentang usia 60 - 74 tahun sebanyak 1% dan terakhir responden dengan usia atas 75 tahun memiliki jumlah responden yakni 0%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan unsur - unsur masyarakat jasa konstruksi yang menghadiri forum jasa konstruksi berada pada rentang usia produktif. Sesuai dengan Badan Pusat Statistik menyatakan penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun).

5.2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Sebaran Domisili

Distribusi responden berdasarkan sebaran domisili dapat dijelaskan melalui gambar 5.15 yakni sebagai berikut:



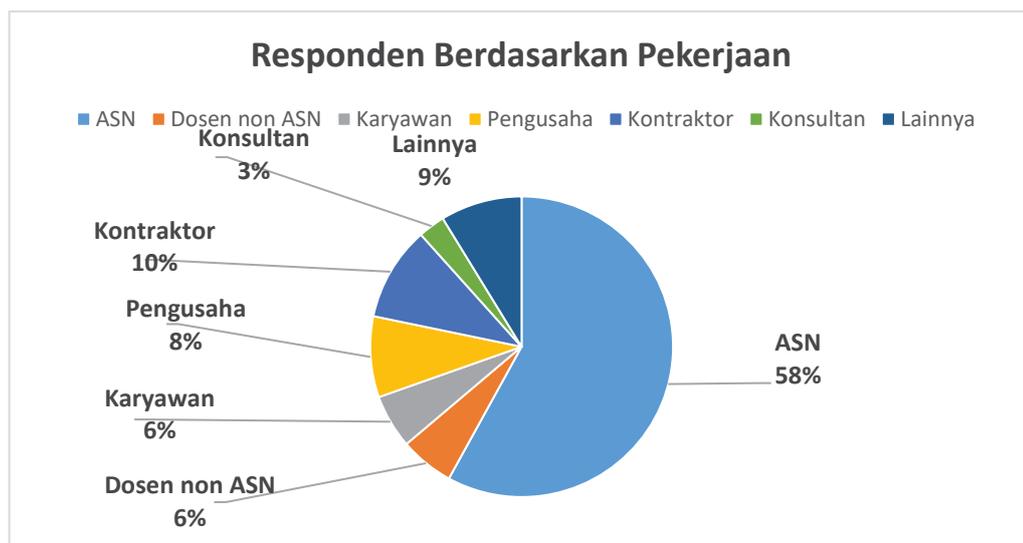
Gambar 5.15. Distribusi Responden Berdasarkan Sebaran Domisili

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.15 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berdomisili di Kabupaten Bulungan sebagai ibu kota provinsi sebanyak 61%, hal ini menunjukan bahwa kebanyakan unsur-unsur yang

menghadiri forum jasa konstruksi memilih ibu kota provinsi sebagai tempat berdomisili. Kemudian diikuti oleh responden yang berdomisili di Kota Tarakan sebanyak 14%, hal ini dikarenakan Kota Tarakan merupakan satu-satunya kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan juga sebagai kota transit dan jasa sehingga kemungkinan beberapa unsur masyarakat jasa konstruksi memilih Kota Tarakan sebagai tempat domisili untuk ditinggali dengan alasan aksesibilitas. Selanjutnya responden berdomisili di luar Provinsi Kalimantan Utara 9 % kemungkinan responden dari unsur pemerintah pusat dan unsur asosiasi badan usaha yang tidak berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara. Dan selanjutnya secara berturut-turut Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung sebanyak 6%, 6% dan 4%.

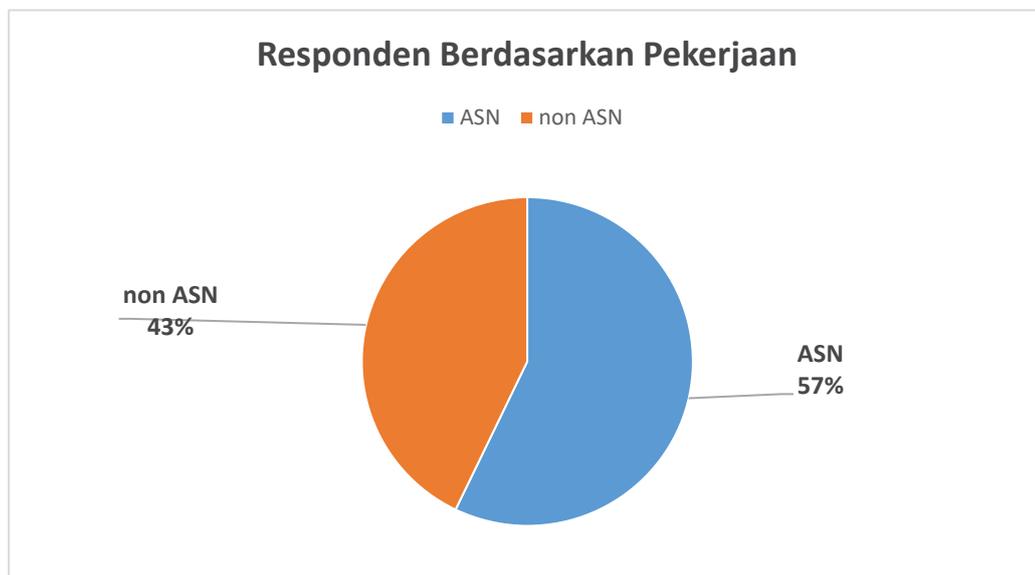
5.2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.

Distribusi responden berdasarkan pekerjaan dapat dijelaskan melalui gambar 5.16 yakni sebagai berikut:



Gambar 5.16. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.16 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 58% dari total responden. Kemudian diikuti responden dengan pekerjaan sebagai kontraktor sebanyak 10%. Kemudian responden yang memiliki pekerjaan sebagai pengusaha sebanyak 8%. Selanjutnya responden yang memiliki pekerjaan sebagai Dosen non ASN dan Karyawan masing-masing sebanyak 6%. Sisanya Sebagai Konsultan sebanyak 3% dan lain-lain diluar dari jenis pekerjaan yang telah disebutkan sebanyak 9%.

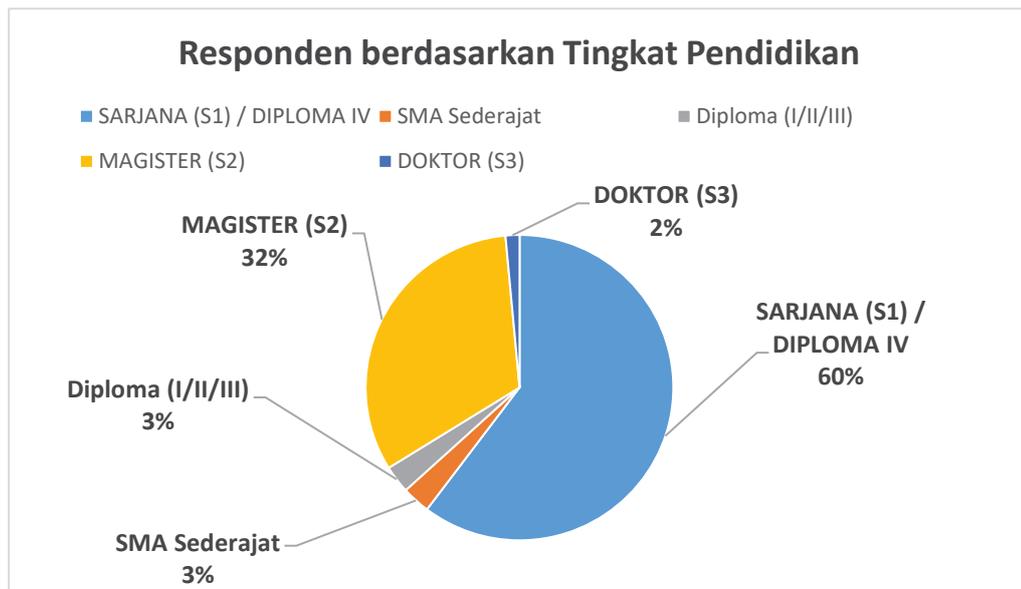


Gambar 5.17. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jika diambil dua kelompok besar jenis pekerjaan maka dari data penelitian dapat dilihat bahwa kelompok ASN sebagai representatif pemerintahan masih lebih banyak dengan kelompok Non ASN sebagai representatif non pemerintahan. Diharapkan unsur diluar ASN/pemerintahan dapat ditambah untuk bisa memberikan pandangan yang lebih beragam sebagai representatif masyarakat jasa konstruksi non pemerintahan.

5.2.5 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Distribusi responden berdasarkan pendidikan dapat dijelaskan melalui gambar 5.18 yakni sebagai berikut:

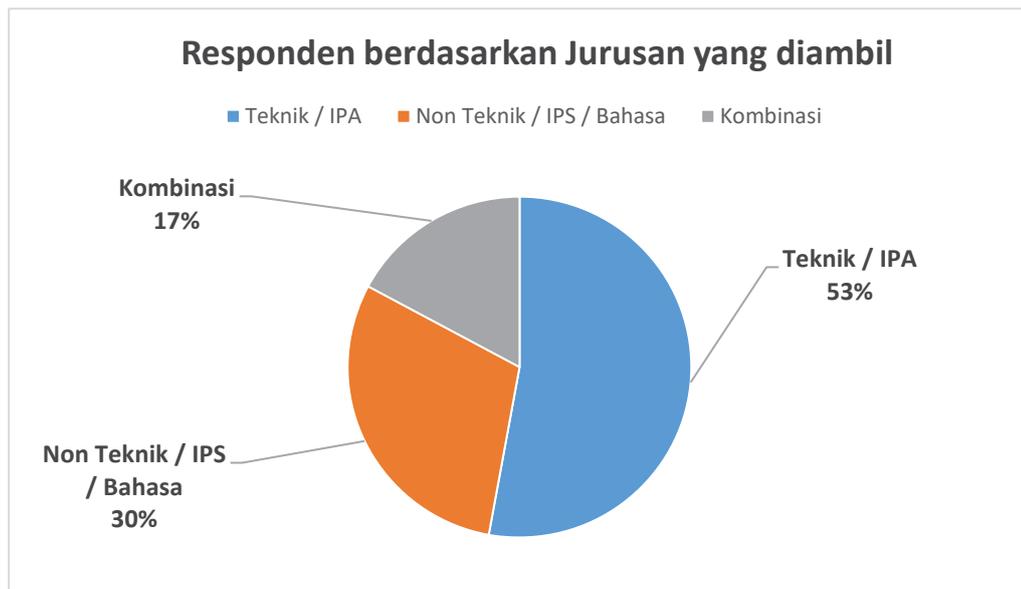


Gambar 5.18. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat pendidikan mayoritas responden penelitian ini adalah Sarjana(S1)/Diploma IV sebesar 60%. Kemudian disusul dengan tingkat pendidikan Magister (S2) sebesar 32%, tingkat pendidikan SMA sederajat dan Diploma I/II/II berada pada tingkatan yang sama sebesar 3% dan pendidikan Doktor (S3) sebesar 2%. hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam forum jasa konstruksi (FJK) unsur-unsur masyarakat jasa konstruksi yang hadir rata-rata memiliki pendidikan yang rata-rata sudah baik.

5.2.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan yang diambil

Distribusi responden berdasarkan jurusan yang diambil dapat dijelaskan melalui gambar 5.19 yakni sebagai berikut:

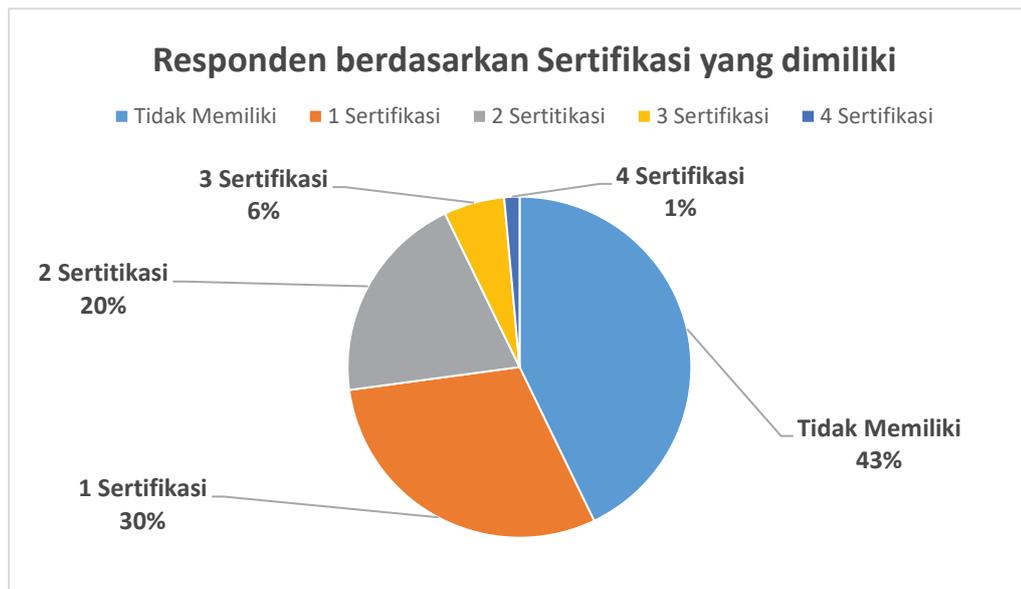


Gambar 5.19. Distribusi Responden Berdasarkan Jurusan yang diambil

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.19 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki *background* pendidikan yang linier dengan bidang ditekuni dalam hal ini bidang konstruksi. Dari data di atas responden yang memiliki *background* jurusan Teknik atau IPA sebanyak 53% dimana *background* pendidikan tersebut dianggap linier dengan bidang konstruksi. Dan sebanyak 30% responden memiliki *background* pendidikan Non teknik. IPS atau Bahasa. Dan sebanyak 17% memiliki *background* pendidikan kombinasi yaitu memiliki pendidikan perpaduan dari Teknik dan Non Teknik.

5.2.7 Distribusi Responden Berdasarkan Sertifikasi yang dimiliki

Distribusi responden berdasarkan sertifikasi yang dimiliki dapat dijelaskan melalui gambar 5.20 yakni sebagai berikut:

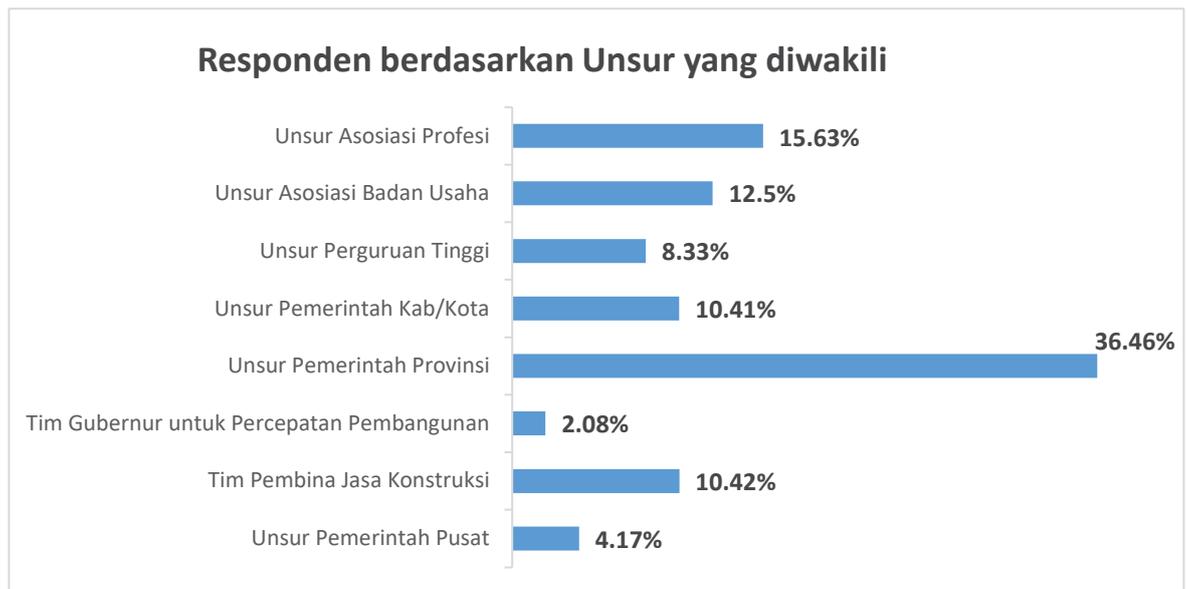


Gambar 5.20. Distribusi Responden Berdasarkan Sertifikasi yang dimiliki

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.20 dapat disimpulkan bahwa responden tidak memiliki sertifikasi tenaga terampil / ahli bidang konstruksi yaitu sebanyak 43% sedangkan yang mempunyai sertifikasi setidaknya 1 sertifikasi bidang konstruksi sebanyak 57% dengan rincian 1 sertifikasi sebanyak 30%, 2 sertifikasi sebanyak 20%, 3 sertifikasi sebanyak 6% dan yang mempunyai 4 sertifikasi atau lebih sebanyak 1%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menghadiri forum jasa konstruksi sudah pernah melakukan stratifikasi keahlian/terampil bidang konstruksi.

5.2.8 Distribusi Responden Berdasarkan Unsur yang diwakili

Distribusi responden berdasarkan Unsur yang diwakili yang dimiliki dapat dijelaskan melalui gambar 5.21 yakni sebagai berikut:



Gambar 5.21. Distribusi Responden Berdasarkan Unsur yang diwakili

Berdasarkan data penelitian, pada gambar 5.21 dapat disimpulkan bahwa distribusi unsur pada forum jasa konstruksi terdiri dari Unsur Pemerintah Provinsi sebesar 36,46%, Unsur Asosiasi Profesi sebesar 15,63%, Unsur Asosiasi Badan Usaha sebesar 12,5%, Unsur Tim Pembina Jasa Konstruksi sebesar 10,42%, Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 10,41%, Unsur Perguruan Tinggi sebesar 8,33%, Unsur Pemerintah Pusat sebesar 4,17% dan Unsur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan sebesar 2,08%. Perlu diketahui bahwa responden bisa mewakili lebih dari satu unsur dalam menghadiri forum jasa konstruksi.

5.3. Analisis Statistik Deskriptif

5.3.1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah (X)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi variabel persepsi kinerja pemerintah (X). Variabel ini terukur oleh 22 indikator yaitu kualitas pelayanan pemerintah (X.1), kompetensi (X.2) dan Etika (X.3). Masing-masing indikator diukur antara 6 sampai 8 item pertanyaan. Indikator kualitas pelayanan pemerintah memiliki 6 pernyataan dalam kuesioner. Pernyataan dalam kuesioner tersebut sifatnya positif yang dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.5. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kualitas Pelayanan Pemerintah

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Kualitas Pelayanan Pemerintah	Mudah menjalin hubungan kerja sama/bekerja bersama dengan pemerintah daerah dengan unsur masyarakat jasa konstruksi	3.70
	Mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah terkait jasa konstruksi	3.77
	Puas akan layanan pemerintah daerah terkait jasa konstruksi	3.67
	Pemerintah memberikan layanan melebihi dari harapan.	3.37
	Merasakan dampak positif dari regulasi/program/kegiatan pemerintah.	3.73
	Puas akan penyelenggaraan forum jasa konstruksi.	3.63
	Puas akan hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.	3.57
	Merasakan dampak dari hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.	3.57
Total Rata-rata		3.62

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator Kualitas Pelayanan Pemerintah yaitu 3.62 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan kualitas pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan dibidang jasa konstruksi dapat dikatakan memberi kepuasan kepada perwakilan setiap unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi.

Masyarakat jasa konstruksi telah mempersepsikan bahwa kemudahan untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah terkait jasa konstruksi telah sesuai dengan harapan masyarakat jasa konstruksi. Akan tetapi, sejauh mana dampak dan hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi telah dirasakan oleh masyarakat jasa konstruksi berada ditingkat bawah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun Forum Jasa Konstruksi memberikan kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi, akan tetapi masih terdapat sejumlah masyarakat jasa konstruksi di tingkat bawah yang belum merasakan dampak dan hasil tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat jasa konstruksi, terutama di tingkat bawah, dapat merasakan manfaat penuh dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.

Tabel 5.6. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kompetensi Pegawai

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Kompetensi Pegawai	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi mampu memahami tentang bidang yang ditekuni.	3.70

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi merupakan orang yang profesional.	3.73
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan pelayanan secara efisien.	3.77
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berusaha keras/ <i>proactive</i> memberikan layanan terbaik.	3.87
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berhati-hati, menghindari kesalahan (akurasi) dan memperbaiki kesalahannya.	3.73
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki keahlian komunikasi yang baik.	3.67
Total Rata-rata		3.74

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator kompetensi pegawai yaitu 3,74 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan kompetensi pegawai di lingkungan pemerintah khususnya pelayanan dalam bidang jasa konstruksi dapat dikatakan mendapat apresiasi yang positif/baik dari setiap perwakilan unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi.

Masyarakat jasa konstruksi mempersepsikan bahwa Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berusaha keras/*proactive* memberikan layanan terbaik. Akan tetapi, yang perlu mendapatkan sorotan adalah komunikasi yang baik antara pemberi layanan dan penerima layanan menduduki urutan terbawah. Secara keseluruhan, hakikatnya komunikasi yang efektif antara

pemberi layanan dan partisipan di Forum Jasa Konstruksi sangat penting untuk memastikan bahwa semua informasi, manfaat, dan kesempatan dapat diakses dan dirasakan oleh seluruh partisipan, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme masyarakat jasa konstruksi secara keseluruhan.

Komunikasi yang baik antara pemberi layanan dan partisipan di Forum Jasa Konstruksi sangat penting untuk penyebaran informasi yang efektif serta peningkatan partisipasi aktif. Hal inilah, yang menyebabkan mengapa dampak dan hasil belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh tingkat bawah. Perlu ditekankan bahwa, dengan komunikasi yang baik, informasi penting seperti pelatihan, sertifikasi, peluang kerja, dan perkembangan industri dapat disebarkan dengan cepat dan tepat, sehingga partisipan mendapatkan akses yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan mereka. Selain itu, komunikasi yang jelas dan terbuka meningkatkan transparansi dan keterlibatan partisipan dalam berbagai kegiatan dan diskusi di forum. Hal ini memungkinkan partisipan memberikan masukan dan *feedback* yang konstruktif, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program dan kegiatan yang ada, serta memastikan keberhasilan dan efektivitas forum secara keseluruhan.

Tabel 5.7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Etika Pegawai

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Etika Pegawai	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaannya dengan jujur.	3.83
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan perlakuan adil.	3.87

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah.	3.73
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) / tidak memiliki konflik kepentingan.	3.93
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi tidak penerima hadiah/barang/jasa (gratifikasi) dari masyarakat guna mendapatkan layanan.	3.90
	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi dapat menjaga kerahasiaan data privasi dari pengguna layanan.	3.97
Total Rata-rata		3.87

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator etika pegawai yaitu 3.87 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan etika pegawai dalam pelayanan dalam bidang jasa konstruksi dapat dikatakan memberi pengalaman yang positif/baik dari setiap perwakilan unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi. Hal ini menempati urutan pertama, dibandingkan dengan indikator kualitas pelayanan dan kompetensi.

Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi dapat menjaga kerahasiaan data privasi dari setiap informasi yang dibagikan dalam mendapatkan layanan dibidang jasa konstruksi. Menjaga kerahasiaan data privasi masyarakat pengguna jasa konstruksi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Menjaga kerahasiaan data privasi

pengguna memiliki kaitan erat dengan kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Masyarakat yang percaya bahwa data mereka aman lebih cenderung merasa nyaman dan puas dengan layanan yang mereka terima, karena mereka tidak khawatir tentang potensi penyalahgunaan informasi pribadi mereka.

Kepuasan pengguna meningkat ketika mereka merasa bahwa layanan yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka dan disampaikan dengan efisien. Dengan demikian, menjaga kerahasiaan data privasi bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang memastikan bahwa pelayanan yang diberikan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan keseluruhan kepuasan mereka terhadap layanan pemerintah.

5.3.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepercayaan Masyarakat (Z)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi variabel Kepercayaan Masyarakat (Z). Variabel ini terukur oleh 3 indikator yaitu Kepercayaan Disposisional (Z.1), Kepercayaan Institusional (Z.2) dan Kepercayaan Interpersonal (Z.3). Masing-masing indikator diukur dengan 4 - 6 item pertanyaan. Pernyataan dalam kuesioner tersebut sifatnya positif dan dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Disposisional

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Kepercayaan Disposisional	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi peduli dengan kepuasan dari masyarakat pengguna layanan	3.80
	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi dapat	3.97

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya	
	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dengan baik.	3.93
	Yakin untuk tetap menggunakan layanan dari pemerintah selama tidak menemukan hal yang yang mengecewakan	3.87
Total Rata-rata		3.89

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator kepercayaan disposisional yaitu 3,89 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan responden menganggap bahwa pegawai di lingkungan pemerintah khususnya dalam pelayanan dalam bidang jasa konstruksi dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata setiap perwakilan unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi.

Masyarakat jasa konstruksi percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi dapat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Ini merupakan indikasi yang sangat positif, menunjukkan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap tanggung jawab pegawai pemerintah di bidang jasa konstruksi. Secara keseluruhan, hasil rata-rata dari kuisisioner ini menunjukkan bahwa masyarakat jasa konstruksi memiliki tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terhadap pegawai pemerintah dalam hal kepedulian, tanggung jawab, kompetensi, dan kesediaan untuk terus

menggunakan layanan yang disediakan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan agar persepsi positif ini dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan.

Dalam konteks layanan publik seperti bidang jasa konstruksi, kepercayaan bahwa pegawai pemerintah dapat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya memainkan peran penting dibandingkan dengan poin-poin lain dalam kuisioner tersebut. Kepercayaan ini mencerminkan integritas dan profesionalisme pegawai dalam mematuhi regulasi, mengelola proyek dengan baik, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lebih dari sekadar menjamin kualitas layanan yang sesuai standar, kepercayaan terhadap tanggung jawab ini juga membangun fondasi kuat bagi hubungan yang positif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini membentuk citra positif pemerintah dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan publik, menjaga dan memperkuat kepercayaan terhadap tanggung jawab pegawai pemerintah dapat dianggap sebagai hal yang krusial untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Tabel 5.9. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Institusional

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Kepercayaan Institusional	Senang dan percaya menggunakan layanan terkait jasa konstruksi	3.90
	Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan saat ini.	3.77
	Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan berdasarkan UU.	4.07
	Mengandalkan pembinaan jasa konstruksi melalui pemerintah daerah.	3.77

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	Percaya terhadap pemerintah sebagai perantara dan regulator terkait layanan jasa konstruksi	3.83
	Percaya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Forum Jasa Konstruksi (FJK)	3.90
	Percaya terhadap pemerintah sebagai pembina jasa konstruksi	4.00
Total Rata-rata		3.88

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator Kepercayaan Instiusional yaitu 3.88 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan, responden menganggap bahwa institusi pemerintah khususnya dalam pelayanan dalam bidang jasa konstruksi dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata setiap perwakilan unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi.

Secara keseluruhan, hasil kuisisioner ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap peran pemerintah dalam berbagai aspek terkait jasa konstruksi, mulai dari regulasi hingga penyelenggaraan forum dan peran sebagai pembina jasa konstruksi. Namun, terdapat beberapa area di mana pemerintah masih dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, seperti dalam memenuhi kebutuhan yang berkembang dan memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan harapan. Dengan mempertimbangkan analisis ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor konstruksi.

Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan berdasarkan UU (Nilai 4.07), Nilai tertinggi pada poin ini menunjukkan bahwa responden sangat yakin bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam bidang jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang - Undang. Ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap legalitas dan otoritas dalam proses pelayanan. Meskipun demikian, terdapat dimensi perbaikan terkait dengan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan saat ini (Nilai 3.77), nilai ini juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari masyarakat pengguna layanan.

Mengandalkan pembinaan jasa konstruksi melalui pemerintah daerah (Nilai 3.77): Nilai ini sejajar dengan nilai terendah sebelumnya, menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengandalkan pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan arahan dan dukungan kepada industri konstruksi di tingkat lokal.

Tabel 5.10. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Kepercayaan Interpersonal

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Kepercayaan Interpersonal	Percaya terhadap regulasi yang sudah berjalan pada sektor jasa konstruksi	3.83
	Percaya terhadap mekanisme pengambilan kebijakan dalam pembuatan regulasi jasa konstruksi	3.83
	Percaya terhadap <i>output</i> kebijakan dalam penyelenggaraan FJK	3.63

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	Percaya terhadap tindak lanjut hasil FJK oleh pemerintah daerah	3.90
Total Rata-rata		3.80

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang didapatkan dari indikator Kepercayaan Intrapersonal yaitu 3,80 termasuk dalam rentang 3,4 - 4,2 berdasarkan garis kontinum merupakan kategori tinggi. Hal ini menandakan responden menganggap bahwa Hasil dari regulasi atau *output* yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah khususnya dalam pelayanan dalam bidang jasa konstruksi dapat dikatakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di mata setiap perwakilan unsur yang hadir dalam forum jasa konstruksi.

Dalam analisis hasil kuisisioner mengenai tingkat kepercayaan terhadap berbagai aspek regulasi dan penyelenggaraan di sektor jasa konstruksi, kita dapat melihat bahwa terdapat variasi yang relatif kecil dalam penilaian responden. Skor yang diberikan menunjukkan bahwa secara umum ada tingkat kepercayaan yang baik terhadap aspek-aspek yang ditanyakan.

Kepercayaan terhadap tindak lanjut hasil FJK oleh pemerintah daerah mendapatkan skor tertinggi yaitu 3.90. Ini menunjukkan bahwa, dari aspek-aspek yang ditanyakan, responden merasa paling optimis terhadap bagaimana pemerintah daerah menangani hasil atau *output* dari kebijakan yang telah diterapkan. Ini bisa mencerminkan pengalaman positif atau keyakinan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan di tingkat lokal.

Namun, sedikit kekhawatiran terhadap efektivitas output kebijakan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal implementasi kebijakan tersebut. (Nilai 3.63):.Nilai ini adalah yang terendah di antara poin-poin kuisisioner lainnya. Meskipun masih di atas nilai rata-rata, ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan keyakinan terhadap efektivitas dan dampak dari kebijakan yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi. Hal ini dapat mencerminkan harapan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap hasil konkret yang dapat dilihat dari forum ini dalam membawa perubahan positif dalam industri konstruksi. Seperti pembagian kuota sertifikasi untuk setiap unsur oleh pemerintah dan regulasi tentang penggunaan tenaga kerja lokal tersertifikasi sehingga memberi kepastian terserapnya tenaga kerja lokal yang sudah tersertifikasi.

5.3.3 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai deskripsi variabel Partisipasi Masyarakat (Y). Variabel ini terukur oleh 2 indikator yaitu Penerimaan pelayanan (Y.1) dan Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal (Y.2). Masing-masing indikator diukur dengan 4 item pertanyaan. Pernyataan dalam kuesioner tersebut sifatnya positif dan dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.11. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Penerimaan pelayanan

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Penerimaan pelayanan	Memiliki niat/bermaksud untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK).	3.97

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
	Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika mempunyai kepentingan/maksud tertentu.	3.87
	Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) merupakan salah cara untuk mengutarakan aspirasi.	4.13
	menghadiri kembali Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika diadakan kembali.	4.07
Total Rata-rata		4.01

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, hasil kuisisioner menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat minat dan kepuasan yang tinggi terhadap Forum Jasa Konstruksi sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memengaruhi kebijakan di sektor konstruksi. Meskipun ada variasi dalam tingkat kesediaan untuk menghadiri forum tergantung pada kepentingan pribadi, secara umum, partisipasi ini dianggap penting dan efektif dalam mengekspresikan aspirasi dan pandangan masyarakat terhadap pembangunan dan regulasi dalam industri konstruksi. Dengan mempertimbangkan analisis ini, pemerintah dapat terus meningkatkan dan mempromosikan forum ini sebagai alat yang efektif untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses kebijakan.

Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) merupakan salah satu cara untuk mengutarakan aspirasi (Nilai 4.13). Merupakan Nilai tertinggi pada poin ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden melihat Forum Jasa Konstruksi sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengutarakan aspirasi dan kepentingan mereka terkait dengan sektor konstruksi. Ini mencerminkan persepsi positif bahwa

forum ini memberikan platform yang relevan dan penting bagi partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan.

Akan tetapi, Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika mempunyai kepentingan/maksud tertentu (Nilai 3.87). Nilai ini menunjukkan adanya titik yang perlu mendapatkan perbaikan agar dapat memperoleh hasil maksimal, bahwa sebagian besar responden cenderung bersedia menghadiri Forum Jasa Konstruksi jika mereka memiliki kepentingan atau maksud tertentu dalam diskusi dan kegiatan yang dilakukan. Meskipun nilai ini tidak mencapai level sangat tinggi, masih menunjukkan bahwa ada minat yang signifikan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum tersebut jika ada manfaat yang jelas untuk mereka.

Tabel 5.12. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Indikator Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal

Indikator	Sub Indikator	Skor Rata Rata (Mean)
Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal	Membagikan pengalaman selama mengikuti Forum Jasa Konstruksi (FJK)	4.03
	Menyebarkan hasil dari Forum Jasa Konstruksi (FJK) ke masyarakat jasa konstruksi lainnya	4.03
	Mengajak teman untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK)	3.90
	Berkontribusi ke kegiatan Forum Jasa Konstruksi (FJK)	3.97
Total Rata-Rata		3.98

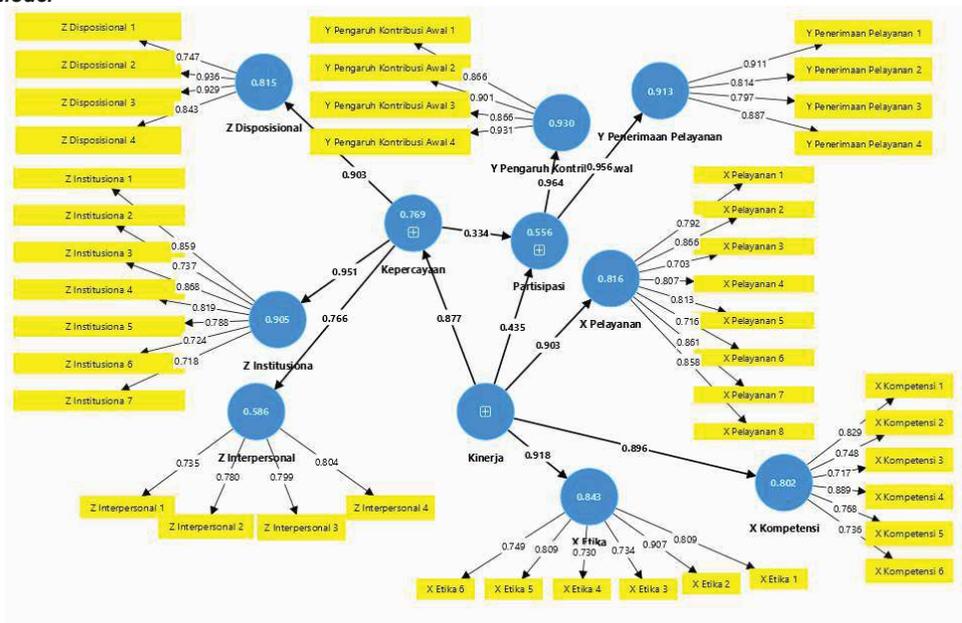
Secara keseluruhan, hasil kuisioner menunjukkan bahwa Forum Jasa Konstruksi memiliki dampak yang positif terhadap partisipasi aktif dan kontribusi masyarakat dalam industri konstruksi. Masyarakat tidak hanya aktif dalam menghadiri forum dan berkontribusi langsung, tetapi juga aktif dalam menyebarkan informasi dan hasil dari forum tersebut kepada komunitas lebih luas. Tingginya

nilai pada poin-poin terkait membagikan pengalaman dan hasil forum menunjukkan bahwa forum ini dianggap efektif dalam memfasilitasi dialog, membangun jaringan, dan mempromosikan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas dan regulasi dalam sektor konstruksi. Dengan mempertimbangkan analisis ini, pemerintah dan pihak terkait dapat terus mengembangkan strategi untuk memperkuat dan memperluas dampak positif dari Forum Jasa Konstruksi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di sektor ini.

Membagikan pengalaman selama mengikuti Forum Jasa Konstruksi (FJK) (Nilai 4.03). Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung aktif dalam membagikan pengalaman mereka selama mengikuti Forum Jasa Konstruksi kepada orang lain. Hal ini mencerminkan tingkat kepuasan dan nilai yang diberikan oleh forum tersebut bagi peserta, sehingga mereka merasa penting untuk berbagi informasi dan pengalaman yang diperoleh. Akan tetapi, terdapat sedikit kekhawatiran, sekaligus menjadi perbaikan terkait dengan peran masyarakat jasa konstruksi, terkait dengan mengajak teman untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) (Nilai 3.90). Hal ini mencerminkan upaya untuk memperluas partisipasi aktif, dan mempromosikan kegiatan forum kepada orang lain. Dalam perkataan lain, masyarakat tidak hanya ingin berpartisipasi tetapi lebih tinggi tingkatannya, yakni merekomendasikan kepada orang lain untuk ikut berpartisipasi tetap. Namun dalam realisasinya dibatasi karena kegiatan tersebut tidak dibuka secara umum, masyarakat jasa konstruksi yang ingin menyalurkan pendapat harus menyalurkan pendapatnya kepada setiap perwakilan unsur.

5.4. Pengujian Hasil Analisis SEM (Structural Equation Modelling)

5.4.1 Outer Model



Gambar 5.22. Model Pengukuran Penelitian PLS SEM
 Keterangan: Olahan Peneliti melalui Software Smart PLS 4

Penelitian ini menggunakan *Software Smart-PLS 4* untuk membantu peneliti dalam menganalisis pengaruh signifikan variabel yang diuji. Lebih lanjut dapat dilihat pada gambar 5.22 yang menunjukkan model pengukuran dapat diterima reliabilitasnya dan validitasnya. Ditunjukkan dengan nilai *indikator loading* dan AVE telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan.

Model pengukuran reflektif digunakan dalam penelitian ini. Menurut teori ini, ukuran mewakili efek (atau manifestasi) dari suatu konstruksi yang mendasarinya. Ukuran reflektif menyatakan bahwa semua item indikator “disebabkan” oleh konstruk yang sama (yaitu berasal dari domain yang sama), maka indikator-indikator yang terkait dengan konstruk tertentu harus sangat berkorelasi satu sama lain. Selain itu, setiap item harus dapat dipertukarkan, dan setiap item secara umum dapat dihapus tanpa mengubah makna konstruksinya, selama konstruk lainnya mempunyai reliabilitas dan validitas yang memadai (Hair et al., 2022). Sehingga dalam penelitian terdapat 3 item yang tidak memenuhi uji reliabilitas dan validitas dapat dihapus atau diabaikan. Lebih lanjut akan dibahas dalam poin-poin penting di bawah ini.

5.4.1.1 Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada 71 responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang mana

Tabel 5.13. Uji Reliabilitas Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah

Variable	Indikator	Item	Indicator Loading	Kesimpulan
Persepsi Kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Pemerintah	X.1.1	0,792	Reliabel
		X.1.2	0.866	Reliabel
		X.1.3	0.703	Tidak Reliabel

Variable	Indikator	Item	Indicator Loading	Kesimpulan
		X.1.4	0.807	Reliabel
		X.1.5	0.813	Reliabel
		X.1.6	0.716	Reliabel
		X.1.7	0.816	Reliabel
		X.1.8	0.858	Reliabel
	Kompetensi Pegawai	X.2.1	0.829	Reliabel
		X.2.2	0.748	Reliabel
		X.2.3	0.717	Reliabel
		X.2.4	0.889	Reliabel
		X.2.5	0.768	Reliabel
		X.2.6	0.736	Reliabel
	Etika	X.3.1	0.809	Reliabel
		X.3.2	0,907	Reliabel
		X.3.3	0,734	Reliabel
		X.3.4	0,730	Reliabel
		X.3.5	0,809	Reliabel
		X.3.6	0,749	Reliabel

Keterangan: Olahan peneliti melalui Software SmartPLS 4

Berdasarkan Tabel 5.13 dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator pada variabel Persepsi Kinerja Pemerintah (X) yang digunakan dalam penelitian ini reliabel hanya 1 item yang tidak reliabel yaitu item X.1.3 (0.703). Hal ini didasarkan pada kecukupan nilai *indicator loading* yang dipersyaratkan di atas 0,708, karena hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator, sehingga memberikan reliabilitas indikator yang dapat diterima.

Tabel 5.14. Uji Reliabilitas Variabel Kepercayaan Masyarakat

Variable	Indikator	Item	Indicator Loading	Kesimpulan
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Disposisional	Z.1.1	0.747	Reliabel
		Z.1.2	0.936	Reliabel
		Z.1.3	0.929	Reliabel
		Z.1.4	0.843	Reliabel
	Kepercayaan Institusional	Z.2.1	0.859	Reliabel
		Z.2.2	0.737	Reliabel
		Z.2.3	0.868	Reliabel
		Z.2.4	0.819	Reliabel
		Z.2.5	0.788	Reliabel
		Z.2.6	0.724	Reliabel
		Z.2.7	0.718	Reliabel
	Kepercayaan Interpersonal	Z.3.1	0.735	Reliabel
		Z.3.2	0.780	Reliabel
Z.3.3		0.799	Reliabel	
Z.3.4		0.735	Reliabel	

Keterangan: Olahan peneliti melalui Software SmartPLS 4

Berdasarkan tabel 5.14 dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel Kepercayaan Masyarakat (Z) yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Hal ini didasarkan pada kecukupan nilai *indicator loading* yang dipersyaratkan di atas 0,708, karena hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator, sehingga memberikan reliabilitas indikator yang dapat diterima.

Tabel 5.15. Uji Reliabilitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Variable	Indikator	Item	Indicator Loading	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat	Penerimaan pelayanan	Y.1.1	0.747	Reliabel
		Y.1.2	0.936	Reliabel
		Y.1.3	0.929	Reliabel
		Y.1.4	0.843	Reliabel
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal	Y.2.1	0.859	Reliabel
		Y.2.2	0.737	Reliabel
		Y.2.3	0.868	Reliabel
		Y.2.4	0.819	Reliabel

Keterangan: Olahan peneliti melalui Software SmartPLS 4

Berdasarkan tabel 5.15 dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada variabel Partisipasi Masyarakat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. Hal ini didasarkan pada kecukupan nilai indikator loading yang dipersyaratkan di atas 0,708, karena hal ini menunjukkan bahwa konstruk tersebut menjelaskan lebih dari 50 persen varians indikator, sehingga memberikan reliabilitas indikator yang dapat diterima.

5.4.1.2 Uji Internal Consistency Reliability

Berdasarkan hasil uji internal *consistency reliability* pada 71 responden, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.16. Uji Internal Consistency Reliability

Variable	Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Kesimpulan
	Kualitas Pelayanan Pemerintah	0.921	0.927	0.936	Reliabel

Variable	Indikator	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_a)</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>	Kesimpulan
Persepsi Kinerja pemerintah	Kompetensi Pegawai	0.873	0.880	0.905	Reliabel
	Etika	0.880	0.888	0.909	Reliabel
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Disposisional	0.887	0.892	0,923	Reliabel
	Kepercayaan Institusional	0.898	0.901	0.920	Reliabel
	Kepercayaan Interpersonal	0.786	0.790	0.861	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	Penerimaan pelayanan	0.874	0.892	0.923	Reliabel
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awa	0.914	0.915	0.939	Reliabel

Keterangan: Olahan peneliti melalui Software SmartPLS 4

Berdasarkan tabel 5.16 dapat disimpulkan bahwa semua variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini reliabel melalui uji internal *consistency reliability*. Hal ini didasarkan pada kecukupan nilai *Cronbach's Alpha*, *Composite Reliability Rho a* dan *Composite Reliability Rho c* yang dipersyaratkan yakni minimum 0,70 (atau 0,60 dalam penelitian eksplorasi) Maksimum 0,95 untuk menghindari redudansi indikator. Sehingga memberikan sejauh mana indikator-indikator yang mengukur konstruk yang sama dikaitkan satu sama lain.

5.4.1.3 Uji *Convergent Validity*

Berdasarkan hasil uji *Convergent Validity* pada 71 responden, dapat dilihat pada tabel 5.17.

Tabel 5.17. Uji Internal Consistency Reliability

Variable	Indikator	Average variance extracted (AVE)	Kesimpulan
Persepsi Kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Pemerintah	0.647	Valid
	Kompetensi Pegawai	0.614	Valid
	Etika	0.627	Valid
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Disposisional	0.752	Valid
	Kepercayaan Institusional	0.624	Valid
	Kepercayaan Interpersonal	0.609	Valid
Partisipasi Masyarakat	Penerimaan pelayanan	0.728	Valid
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awa	0.729	Valid

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software SmartPLS 4*

Berdasarkan tabel 5.17 dapat disimpulkan bahwa semua variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini valid melalui uji *Convergent Validity*. Hal ini didasarkan pada kecukupan nilai AVE minimum yang dapat diterima adalah sebesar 0,50 atau lebih tinggi.

5.4.1.4 Uji *Discriminant Validity*

Berdasarkan hasil uji *cross-loading* pada tabel 5.18 sampai dengan tabel 5.20 dengan 71 responden, masing-masing indikator dalam variabel Persepsi Kinerja Pemerintah (X) memiliki nilai *cross-loading* lebih tinggi dari 0,7. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data dapat diterima dan memenuhi syarat *Discriminant Validity*. Sedangkan pada Variabel Kepercayaan Masyarakat (Z), dan Partisipasi Masyarakat (Y) memiliki nilai *cross-loading* lebih tinggi dari 0,7. *Cross-loading*

adalah metode lain untuk mengetahui *discriminant validity*, yakni dengan melihat nilai *cross loading*. Apabila nilai *loading* dari masing-masing item terhadap konstruksya lebih besar daripada nilai *cross loading*-nya. (Ghozali dan Latan, 2015)

Tabel 5.18. Discriminant Validity Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah

Variable	Indikator		X.1	X.2	X.3	Z.1	Z.2	Z.3	Y.1	Y.2	Kesimpulan
Persepsi Kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Pemerintah	X.1.1	0.792	0.620	0.629	0.435	0.601	0.289	0.531	0.489	Valid
		X.1.2	0.866	0.663	0.684	0.613	0.676	0.453	0.592	0.644	Valid
		X.1.3	0.703	0.386	0.541	0.539	0.448	0.322	0.455	0.377	Valid
		X.1.4	0.807	0.727	0.636	0.524	0.558	0.390	0.618	0.570	Valid
		X.1.5	0.813	0.548	0.654	0.649	0.544	0.561	0.385	0.471	Valid
		X.1.6	0.716	0.370	0.473	0.536	0.444	0.527	0.346	0.389	Valid
		X.1.7	0.861	0.454	0.427	0.395	0.416	0.472	0.359	0.387	Valid
		X.1.8	0.858	0.513	0.558	0.471	0.569	0.570	0.391	0.422	Valid
	Kompetensi Pegawai	X.2.1	0.501	0.829	0.634	0.522	0.598	0.336	0.539	0.427	Valid
		X.2.2	0.433	0.748	0.514	0.513	0.502	0.524	0.395	0.398	Valid
		X.2.3	0.589	0.717	0.596	0.729	0.658	0.543	0.533	0.586	Tidak Valid
		X.2.4	0.643	0.889	0.735	0.711	0.692	0.402	0.566	0.564	Valid
		X.2.5	0.502	0.768	0.649	0.669	0.653	0.331	0.537	0.484	Valid
		X.2.6	0.502	0.736	0.594	0.569	0.522	0.353	0.579	0.551	Valid
	Etika	X.3.1	0.630	0.746	0.809	0.592	0.691	0.367	0.697	0.581	Valid
		X.3.2	0.757	0.629	0.907	0.795	0.801	0.575	0.589	0.626	Valid
		X.3.3	0.481	0.666	0.734	0.668	0.680	0.364	0.527	0.486	Valid
		X.3.4	0.555	0.444	0.730	0.654	0.591	0.52	0.442	0.417	Valid
X.3.5		0.443	0.640	0.809	0.540	0.628	0.277	0.585	0.361	Valid	
X.3.6		0.530	0.647	0.749	0.787	0.589	0.446	0.448	0.503	Tidak Valid	

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

Tabel 5.19. Discriminant Validity Variabel Kepercayaan Masyarakat

Variable	Indikator		X.1	X.2	X.3	Z.1	Z.2	Z.3	Y.1	Y.2	Kesimpulan
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Disposisional	Z.1.1	0.455	0.720	0.700	0.747	0.699	0.448	0.546	0.525	Valid
		Z.1.2	0.616	0.703	0.803	0.936	0.689	0.601	0.448	0.596	Valid
		Z.1.3	0.599	0.758	0.788	0.929	0.686	0.476	0.439	0.574	Valid
		Z.1.4	0.569	0.564	0.648	0.843	0.645	0.485	0.471	0.661	Valid
	Kepercayaan Institusional	Z.2.1	0.593	0.671	0.805	0.750	0.859	0.503	0.588	0.593	Valid
		Z.2.2	0.691	0.637	0.696	0.688	0.737	0.513	0.536	0.706	Valid
		Z.2.3	0.616	0.660	0.791	0.617	0.868	0.425	0.678	0.623	Valid
		Z.2.4	0.466	0.563	0.588	0.486	0.819	0.360	0.658	0.696	Valid
		Z.2.5	0.503	0.662	0.535	0.604	0.788	0.437	0.524	0.667	Valid
		Z.2.6	0.540	0.534	0.662	0.575	0.724	0.723	0.514	0.522	Valid
		Z.2.7	0.249	0.543	0.538	0.584	0.718	0.466	0.388	0,427	Valid
	Kepercayaan Interpersonal	Z.3.1	0.214	0.357	0.283	0.383	0.409	0.735	0.139	0.109	Valid
		Z.3.2	0.351	0.399	0.375	0.596	0.487	0.780	0.264	0.398	Valid
Z.3.3		0.507	0.473	0.478	0.327	0.577	0.799	0.301	0.273	Valid	
Z.3.4		0.633	0.405	0.520	0.492	0.462	0.804	0.192	0.261	Valid	

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

Tabel 5.20. Discriminant Validity Variabel Partisipasi Masyarakat

Variable	Indikator		X.1	X.2	X.3	Z.1	Z.2	Z.3	Y.1	Y.2	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat	Penerimaan pelayanan	Y.1.1	0.493	0.613	0.585	0.490	0.629	0.232	0.911	0.730	Valid
		Y.1.2	0.393	0.402	0.427	0.262	0.409	0.195	0.814	0.643	Valid
		Y.1.3	0.626	0.699	0.757	0.623	0.764	0.318	0.797	0.749	Valid
		Y.1.4	0.465	0.570	0.589	0.476	0.593	0.248	0.887	0.752	Valid

Variable	Indikator		X.1	X.2	X.3	Z.1	Z.2	Z.3	Y.1	Y.2	Kesimpulan
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal	Y.2.1	0.509	0.672	0.599	0.636	0.751	0.271	0.809	0.866	Valid
		Y.2.2	0.513	0.549	0.562	0.632	0.629	0.335	0.695	0.901	Valid
		Y.2.3	0.537	0.525	0.457	0.403	0.646	0,285	0.702	0.866	Valid
		Y.2.4	0.552	0.530	0.631	0.643	0.705	0.335	0.792	0.931	Valid

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software SmartPLS 4*

Dari ketiga tabel diatas dapat dilihat dari *variable* persepsi kinerja pemerintah pada indikator kompetensi pegawai dengan item X.2.3 (0.717) tidak valid dikarenakan terdapat konstruk yang lebih besar yaitu di Z.1 (0.729). Hal ini senada item X.3.6 (0.749) pada indikator etika terdapat konstruk yang melebihi nilai X.3.6 yaitu Z.1 (0.787).

5.4.1.5 Uji Kolinearitas

Menurut Hair, et al. (2021) Kolinearitas tidak menjadi masalah jika $VIF < 3$, Namun tidak ada kolinearitas juga dapat diterima jika $VIF = 3-5$. Sedangkan Kolinearitas menjadi masalah kritis mungkin terjadi jika $VIF \geq 5$. Dalam uji kolinearitas pada 71 responden dapat dilihat pada tabel 5.18 sampai dengan 5.20 dimana kolinearitas tidak terjadi pada penelitian ini.

Tabel 5.21. Uji Kolinearitas Variabel Persepsi Kinerja Pemerintah

Variable	Indikator	Item	Kolinearitas	Kesimpulan
Persepsi Kinerja pemerintah	Kualitas Pelayanan Pemerintah	X.1.1	3.937	Lolos Uji
		X.1.2	4.319	Lolos Uji
		X.1.3	2.551	Lolos Uji
		X.1.4	3.341	Lolos Uji
		X.1.5	3.030	Lolos Uji
		X.1.6	2.194	Lolos Uji

Variable	Indikator	Item	Kolinearitas	Kesimpulan
		X.1.7	4.698	Lolos Uji
		X.1.8	4.303	Lolos Uji
	Kompetensi Pegawai	X.2.1	2.832	Lolos Uji
		X.2.2	2.567	Lolos Uji
		X.2.3	1.920	Lolos Uji
		X.2.4	4.062	Lolos Uji
		X.2.5	3.265	Lolos Uji
		X.2.6	1.961	Lolos Uji
	Etika	X.3.1	2.704	Lolos Uji
		X.3.2	3.887	Lolos Uji
		X.3.3	1.999	Lolos Uji
		X.3.4	2.509	Lolos Uji
		X.3.5	2.356	Lolos Uji
		X.3.6	2.091	Lolos Uji

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software SmartPLS 4*

Tabel 5.22. Uji Kolinearitas Variabel Kepercayaan Masyarakat

Variable	Indikator	Item	Kolinearitas	Kesimpulan
Kepercayaan Masyarakat	Kepercayaan Disposisional	Z.1.1	1.919	Lolos Uji
		Z.1.2	4.270	Lolos Uji
		Z.1.3	4.092	Lolos Uji
		Z.1.4	3.157	Lolos Uji
	Kepercayaan Institusional	Z.2.1	4.537	Lolos Uji
		Z.2.2	2.450	Lolos Uji
		Z.2.3	3.758	Lolos Uji
		Z.2.4	2.693	Lolos Uji
		Z.2.5	2.180	Lolos Uji

Variable	Indikator	Item	Kolinearitas	Kesimpulan
		Z.2.6	1.932	Lolos Uji
		Z.2.7	2.880	Lolos Uji
	Kepercayaan Interpersonal	Z.3.1	1.810	Lolos Uji
		Z.3.2	1.832	Lolos Uji
		Z.3.3	2.187	Lolos Uji
		Z.3.4	2.197	Lolos Uji

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

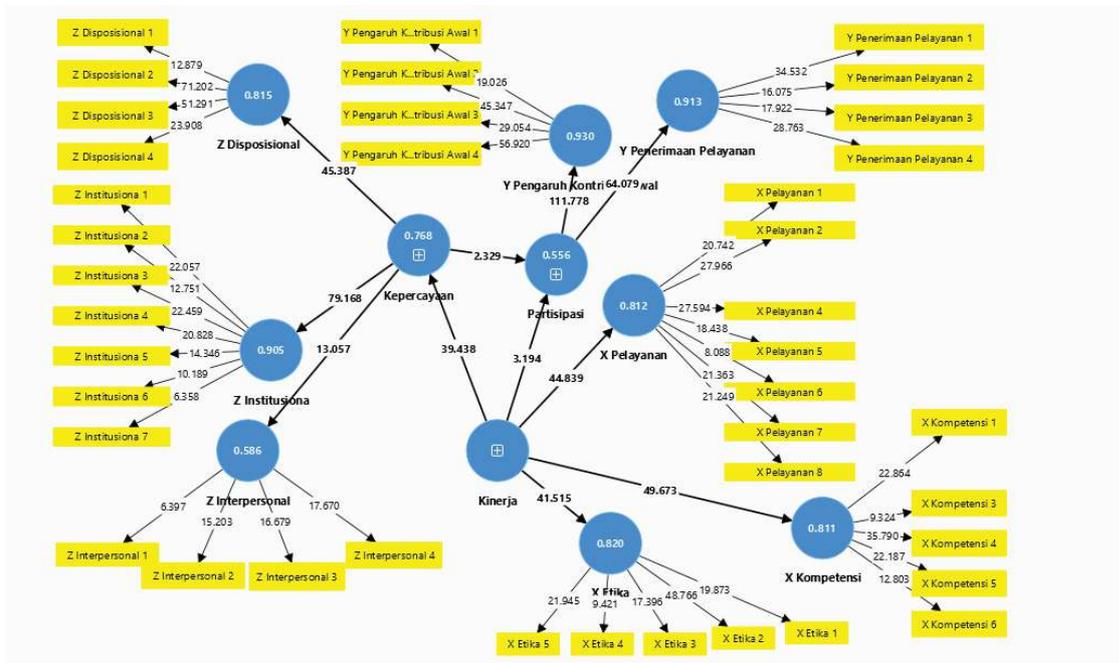
Tabel 5.23. Uji Kolinearitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Variable	Indikator	Item	Kolinearitas	Kesimpulan
Partisipasi Masyarakat	Penerimaan pelayanan	Y.1.1	3.670	Lolos Uji
		Y.1.2	2.309	Lolos Uji
		Y.1.3	2.222	Lolos Uji
		Y.1.4	3.345	Lolos Uji
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal	Y.2.1	2.352	Lolos Uji
		Y.2.2	3.572	Lolos Uji
		Y.2.3	2.568	Lolos Uji
		Y.2.4	4.479	Lolos Uji

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

5.4.2 Inner Model

Berdasarkan uji *inner model* pada 71 responden penelitian dapat diperoleh pada gambar 5.23. Pada gambar tersebut, dapat dilihat nilai t statistik yang menunjukkan pengaruh signifikan antar variabel yang diuji.



Gambar 5.23. Uji Model Struktural
 Keterangan: Olahan Peneliti Melalui SmartPLS 4

5.4.2.1 Analisis *Higher-Order Model*

Berdasarkan hasil uji reflektif yang dapat dilihat pada gambar 5.23 dapat diperoleh bahwa, sebuah variabel laten diukur oleh beberapa dimensi, kemudian dimensi diukur oleh variabel manifes. Kompetensi pegawai memiliki nilai t statistik sebesar 49,673 dalam merefleksikan variabel persepsi kinerja pemerintah dibandingkan dengan dimensi lainnya pada konstruks yang sama. Hal ini menepati urutan ke pertama dalam merefleksikan variabel persepsi kinerja pemerintah. Tindakan *proactive* dalam memberikan layanan terbaik, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kompetensi pegawai yakni nilai t statistik sebesar 35,790. Tindakan proaktif berkaitan erat dengan kompetensi pegawai dan memiliki dampak signifikan dalam membentuk kepuasan pelayanan. Pegawai yang proaktif menunjukkan inisiatif dalam mengenali dan mengatasi masalah sebelum menjadi besar, serta berusaha untuk terus meningkatkan kinerja dan layanan yang diberikan. Dalam indikator, Kompetensi pegawai mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif, dan tindakan proaktif merupakan salah satu indikasi yang dominan merefleksikan pegawai memiliki kompetensi tersebut. Dengan bertindak proaktif, pegawai mampu mengantisipasi kebutuhan dan harapan masyarakat jasa konstruksi, memberikan solusi yang cepat dan tepat, serta mencegah terjadinya kesalahan atau penundaan. Hal ini menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih positif bagi masyarakat jasa konstruksi, meningkatkan kepuasan mereka, dan membangun kepercayaan serta loyalitas terhadap organisasi. Oleh karena itu, tindakan proaktif berkaitan dengan kompetensi pegawai, sangat penting dalam memastikan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Kualitas pelayanan pemerintah memiliki nilai t statistik sebesar 44,839 dalam merefleksikan variabel persepsi kinerja pemerintah, hal ini menepati urutan ke dua, setelah kompetensi. Kemudahan dalam memberikan pelayanan, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kualitas pelayanan pemerintah yakni nilai t statistik sebesar 27,966. Kemudahan pelayanan sangat penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintahan. Ketika masyarakat jasa konstruksi dapat dengan mudah mengakses layanan, pengalaman mereka menjadi lebih positif. Misalnya, proses yang sederhana dan cepat dalam pendaftaran, atau penyelesaian keluhan akan sangat dihargai oleh masyarakat jasa konstruksi. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan tetapi juga mendorong mereka untuk kembali menggunakan layanan tersebut di masa depan. Sebaliknya, jika pelayanan sulit diakses atau rumit, masyarakat jasa konstruksi dapat merasa frustrasi dan kecewa, yang akan berdampak negatif pada organisasi. Dengan demikian, kemudahan pelayanan adalah faktor kunci yang mendukung kualitas pelayanan secara keseluruhan dan membantu menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah.

Etika (t Statistik 41.515) tidak kalah penting dalam persepsi kinerja pegawai karena berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelayanan. Pegawai yang beretika membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan masyarakat jasa konstruksi, sehingga mereka merasa dilayani dengan jujur dan adil, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan. Perlakuan adil oleh pegawai dalam pelayanan, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi etika yakni nilai t statistik sebesar 48,766. Masyarakat jasa konstruksi mengharapkan perlakuan yang adil. Tindakan keadilan tersebut, merupakan bagian dari tindakan etis yang dapat

mengurangi konflik dan keluhan masyarakat jasa konstruksi, karena mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik. Dengan demikian, etika dalam persepsi kinerja pegawai merupakan dasar penting untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat jasa konstruksi, dan mencapai keberhasilan organisasi.

Kepercayaan Institusional memiliki nilai t statistik sebesar 79,168 yang dominan dalam merefleksikan variabel kepercayaan masyarakat jasa konstruksi dibandingkan dengan dimensi lainnya pada konstruks yang sama. Dimensi ini terkait dengan persepsi individu terhadap institutionalnya yakni pemerintah itu sendiri dalam forum jasa konstruksi. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terkait institusi telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kepercayaan instutional yakni nilai t statistik sebesar 22,459. Masyarakat jasa konstruksi akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap institusi pemerintah jika institusi tersebut menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika institusi pemerintah beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan transparan, masyarakat merasa yakin bahwa tindakan dan keputusan yang diambil adalah sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Kesesuaian dengan undang-undang juga menunjukkan bahwa pemerintah menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, yang merupakan fondasi dari tata kelola yang baik atau *good governance*. Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang mencerminkan integritas, di mana pegawai pemerintah bertindak dengan tanggung jawab dan dapat diawasi oleh mekanisme yang telah ditentukan. Kepercayaan masyarakat akan semakin kuat apabila mereka melihat bahwa institusi pemerintah secara konsisten menerapkan undang-undang dalam

pelaksanaan tugasnya, memberikan layanan publik yang efektif, serta merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tepat. Dengan demikian, ketaatan terhadap kewenangan berdasarkan undang-undang adalah kunci dalam membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Selanjutnya Kepercayaan Disposisional memiliki nilai t statistik sebesar 45,451 dalam merefleksikan variabel kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi, hal ini menepati urutan ke dua, setelah indikator kepercayaan institutional. Kepercayaan pada birokrasi jalanan atau para pegawai yang terlibat dalam pelayanan langsung ke masyarakat jasa konstruksi merupakan titik tekan dalam kepercayaan di dimensi ini. Kepercayaan masyarakat terhadap pegawai pemerintah dalam menangani bidang jasa konstruksi dapat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kepercayaan disposisional yakni nilai t statistik sebesar 71.278. Masyarakat jasa konstruksi percaya terhadap pegawai pemerintah ketika mereka menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya karena tanggung jawab mencerminkan komitmen dan integritas dalam melayani publik. Ketika pegawai pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelayanannya, hal ini menandakan mereka harus bersedia menerima konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam bentuk evaluasi kinerja maupun transparansi dalam proses kerja. Hal ini menciptakan lingkungan yang positif, di mana pegawai pemerintah dapat dipercaya untuk bertindak secara profesional dan etis. Kepercayaan masyarakat meningkat seiring dengan konsistensi pegawai pemerintah dalam menunjukkan tanggung jawab, karena ini menandakan bahwa mereka serius dalam tugasnya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Kepercayaan interpersonal memiliki nilai t statistik sebesar 13,057 dalam merefleksikan variabel kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi, hal ini menepati urutan terakhir, dalam variabel kepercayaan masyarakat jasa konstruksi. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap tindak lanjut hasil FJK oleh pemerintah daerah, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kepercayaan interpersonal yakni nilai t statistik sebesar 17,670. Masyarakat jasa konstruksi akan percaya terhadap pemerintah ketika pemerintah menindaklanjuti hasil harapan yang telah didiskusikan bersama karena hal ini menunjukkan bahwa *output* dari FJK benar-benar dihargai dan diperhatikan. Ketika pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat jasa konstruksi dan bertindak berdasarkan forum tersebut, mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini menciptakan rasa partisipasi dan keterlibatan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan. Selain itu, tindak lanjut yang nyata menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi janji dan tidak sekadar mengadakan forum sebagai formalitas.

Pengaruh terhadap kontribusi awal memiliki nilai t statistik sebesar 111,778 dalam merefleksikan variabel partisipasi masyarakat jasa konstruksi dibandingkan dengan dimensi lainnya pada konstruksi yang sama. Pengalaman yang dilalui atau dirasakan menjadi faktor utama, hal ini menjelaskan bahwa ketika para responden mengikuti kegiatan forum jasa konstruksi dan mendapatkan pengalaman yang baik maka para responden akan senang tiasa untuk menyebarkan pengalamannya ke orang-orang sekitar atau akan aktif berkontribusi dalam kegiatan tersebut atas dasar kepuasan dari pengalamannya tersebut. Hal ini juga bisa dilihat dari konstruksi Berkontribusi ke kegiatan Forum Jasa Konstruksi (FJK) yang memiliki t statistik sebesar 56,920 yang cukup dominan diantara konstruksi lainnya

Penerimaan pelayanan memiliki nilai t statistik sebesar 64,079 dalam merefleksikan variabel partisipasi masyarakat jasa konstruksi dibandingkan dengan dimensi lainnya pada konstruks yang sama. Memiliki niat/bermaksud untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) kembali, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi penerimaan pelayanan yakni nilai t statistik sebesar 34,532. Hal ini menandakan bahwa masyarakat jasa konstruksi memiliki niat untuk menghadiri forum jasa konstruksi merupakan bagian penting dalam partisipasi kembali pada forum-forum jasa konstruksi mendatang. Selain itu diperkuat oleh hasil data yang menunjukkan masyarakat jasa konstruksi akan berkontribusi ke kegiatan FJK kembali dengan memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal, yakni nilai t statistik sebesar 56,920. Hal ini menandakan mereka memiliki niat, serta akan berkontribusi jika terdapat FJK yang diadakan kembali oleh Pemerintah.

5.4.2.2 Uji Signifikan dan Relevansi Koefisien Jalur

Pengukuran *path coefficients* antar konstruk untuk melihat pengaruh signifikan dan kekuatan hubungan tersebut dan juga untuk menguji hipotesis. Dalam hal relevansi, koefisien jalur biasanya antara -1 dan +1, dengan koefisien yang mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat dan koefisien yang mendekati +1 menunjukkan hubungan positif yang kuat (Hair, *et al.*, 2021). Hal ini dapat diperoleh pada tabel 5.24.

Tabel 5.24. Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	P Values	Keterangan
Persepsi atas Kinerja Pemerintahan -> Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	0,436	0,423	0,001	signifikan

Persepsi atas Kinerja Pemerintahan -> Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	0,876	0,876	0,000	signifikan
Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi -> Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	0,333	0,347	0,020	signifikan

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

Berdasar tabel 5.24 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

Hasil estimasi *inner model* untuk pengaruh langsung antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,436 yang artinya jika Variabel X meningkat satu satuan unit maka variabel Y dapat meningkat sebesar 43,6%. Jika dilihat dari nilai koefisien jalur bertanda positif, maka hal ini mengindikasikan pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif, yang memiliki implikasi bahwa semakin tinggi Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X), maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y).

Selain itu dengan Sig P sebesar 0.001 dibawah P *value* yang dipersyaratkan yakni 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yakni terdapat pengaruh signifikan dari variable X terhadap variable Y.

2. Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Hasil estimasi *inner model* untuk pengaruh langsung antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X) terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,876 yang artinya jika Variabel X meningkat satu satuan unit maka variabel Z dapat meningkat sebesar 87,6%. Jika dilihat dari nilai koefisien jalur bertanda positif, maka hal ini mengindikasikan pengaruh variabel X terhadap Z adalah positif, yang memiliki implikasi bahwa semakin tinggi Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X), maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z).

Selain itu dengan Sig P sebesar 0.000 dibawah P value yang dipersyaratkan yakni 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z). Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yakni terdapat pengaruh signifikan dari variable X terhadap variable Z.

3. Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

Hasil estimasi *inner model* untuk pengaruh langsung antara Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,333 yang artinya jika Variabel Z meningkat satu satuan unit maka variabel Y dapat meningkat sebesar 33,3%. Jika dilihat dari nilai koefisien jalur bertanda positif, maka hal ini mengindikasikan pengaruh variabel Z terhadap Y adalah positif, yang memiliki implikasi bahwa semakin tinggi Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z), maka akan mengakibatkan semakin tinggi pula Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y).

Selain itu dengan Sig P sebesar 0,020 dibawah P *value* yang dipersyaratkan yakni 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung antara Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) memiliki pengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak yakni terdapat pengaruh signifikan dari variable Z terhadap variable Y.

Selain itu terdapat uji pengaruh signifikan dari variabel mediasi yang dapat dilihat pada tabel 5.25.

Tabel 5.25. Uji Pengaruh Signifikan Pengaruh Tidak Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	P Values	Keterangan
Persepsi atas Kinerja Pemerintah -> Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi -> Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	0,292	0,305	0,024	signifikan

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software* SmartPLS 4

Tabel 5.25. dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Hasil estimasi *inner model* untuk pengaruh langsung antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah (X) terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) dimediasi oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) menunjukkan nilai P *values* sebesar 0.024. Nilai tersebut, dibawah P *value* yang dipersyaratkan yakni 0,05 maka dapat diperoleh bahwa kepercayaan masyarakat signifikan memediasi pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa

Konstruksi. Hal ini dapat disimpulkan H_a diterima dan H_o ditolak yakni variabel Z signifikan memediasi pengaruh variabel X terhadap Y.

Selain itu, terdapat uji F *Square* yang dijelaskan pada tabel 5.26 dibawah ini.

Tabel 5.26. F *Square*

	Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi
Persepsi atas Kinerja Pemerintah	3.305	0.100
Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi		0.058

Sebagai pedoman, nilai f^2 masing-masing 0,02, 0,15, dan 0,35 mewakili efek kecil, sedang, dan tinggi (Cohen 1988 dalam Hair, *et al.*, 2021). Maka berdasarkan tabel nilai F *Square* di atas, pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi memiliki efek yang tinggi, yakni 3,305. Sedangkan Persepsi atas Kinerja Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi pada level menuju sedang, yakni 0,100. Sedangkan variabel Z terhadap Y yakni pengaruh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi pada level menuju sedang yakni 0,058 di atas kriteria F *Square* 0,02.

Sedangkan perhitungan *effect size* mediasi, maka berlaku rumus Upsilon

V:

$$\begin{aligned}
 v &= \beta_{YM \cdot X}^2 - [\beta_{YX}^2 + \beta_{YM \cdot X}^2(1 - \beta_{MX}^2) - \beta_{YX}^2] \\
 &= \beta_{YM \cdot X}^2 - \beta_{YM \cdot X}^2(1 - \beta_{MX}^2) \\
 &= \beta_{MX}^2 \beta_{YM \cdot X}^2
 \end{aligned}$$

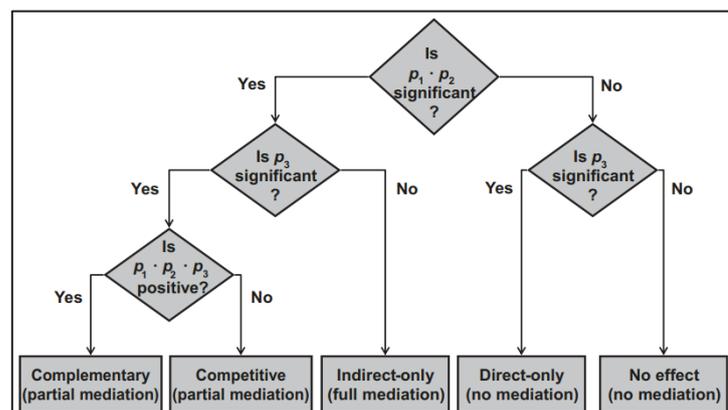
Perhitungan efek *size* peran mediasi Kepercayaan Masyarakat, antara pengaruh signifikan variabel Persepsi atas Kinerja Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi. Diperoleh perhitungan sebagai berikut.

$$V = (0,878^2) \times (0,347^2) = 0,09282$$

Maka merujuk pada Ogbeibu, *et al.* (2021) efek *v* terstandarisasi kuadrat harus lebih besar dari 0,175 untuk efek besar, 0,075 untuk efek sedang, dan 0,01 untuk efek kecil, sehingga lebih sesuai untuk efek tidak langsung.

Berdasarkan perhitungan di atas maka peran Kepercayaan Masyarakat dalam memediasi terhadap Partisipasi Masyarakat terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam signifikan level sedang atau menuju level tinggi.

Sedangkan terkait dengan jenis mediasi, maka berlaku analisis yang direkomendasikan Hair, *et al.* (2021).



Gambar 5 24. Prosedur Analisis Mediasi

Sumber: Hair, *et al.* (2021, p. 142)

Gambar 5.24 mengilustrasikan. Langkah pertama membahas pentingnya pengaruh signifikan ($p_1 \cdot p_2$) melalui konstruksi mediator (*Y*), jika pengaruh tidak

langsungnya tidak signifikan (sisi kanan Gambar 5.24), maka dapat disimpulkan bahwa variabel tidak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan yang diuji. analisis lebih lanjut mengenai efek langsung p3 dapat menunjukkan mediator yang belum ditemukan. Secara khusus, jika pengaruh langsungnya signifikan, dapat menyimpulkan bahwa ada kemungkinan bahwa terdapat mediator yang dihilangkan, yang berpotensi menjelaskan hubungan antara variabel(non-mediasi hanya langsung). Namun, jika efek langsungnya juga tidak signifikan (tidak ada efek non-mediasi), maka harus diartikan bahwa kerangka teoritis salah. Namun dalam penelitian ini tidak didapati kondisi tersebut. Sehingga kerangka teoritis benar.

Dalam penelitian ini terdapat efek langsung X (Persepsi atas Kinerja Pemerintah) signifikan terhadap Y (Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi), masih menemukan dukungan terhadap hubungan mediasi yang dihipotesiskan. Namun, pengaruh total antara konstruk sebagian berasal dari pengaruh langsung p3 dan sebagian lagi dari pengaruh tidak langsung p1 · p2. Maka perlu mencari jenis mediasi parsial komplementer atau kompetitif. Karena persepsi atas kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi dan Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi signifikan memediasi hubungan antara Persepsi atas Kinerja Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi, maka berlaku rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & p1 \cdot p2 \cdot p3 \\ & = 0,878 \cdot 0,347 \cdot 0,423 \\ & = 0,129 \text{ (Positif)} \end{aligned}$$

Maka dari hasil perhitungan tersebut, dapat diperoleh bahwa peran kepercayaan masyarakat jasa konstruksi dalam memediasi pengaruh signifikan

atas Kinerja Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi adalah *Partial Mediation* (mediasi komplementer) yang menggambarkan situasi dimana pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung $p1 \cdot p2$ mengarah ke arah yang sama. Dengan kata lain, hasil kali pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (yaitu, $p1 \cdot p2 \cdot p3$) adalah positif.

5.4.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sebagai pedoman umum, nilai R^2 Adjusted sebesar 0,75, 0,50, dan 0,25 masing-masing dapat dianggap substansial, sedang, dan lemah, di banyak disiplin ilmu sosial (Hair, *et al.*, 2021). Lebih lanjut hasil uji dapat dilihat pada tabel 5.27.

Tabel 5.27. Uji Koefisien Determinasi

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	0,768	0,764
Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	0,556	0,543

Keterangan: Olahan peneliti melalui *Software SmartPLS 3*

Berdasarkan tabel 5.27 dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi atau *R Square Adjusted* variabel Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) adalah sebesar 0,556. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel persepsi atas kinerja pemerintah (X) dan kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi (Y) sebesar 55,6%, hal ini berada pada kategori sedang . sedangkan sisanya yakni 44,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Sedangkan nilai koefisien determinasi atau *R Square* variabel kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) adalah sebesar 0,768. Angka tersebut

mengandung arti bahwa variabel persepsi atas kinerja pemerintah (X) secara parsial berpengaruh terhadap kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi (Z) sebesar 76,8%, hal ini berada pada kategori kuat sedangkan sisanya yakni 23,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5.5. Pembahasan

Penelitian ini mendukung penelitian milik Kalgin *et al.* (2017) bahwa pegawai negeri yang bekerja cenderung memiliki kepuasan pelayanan yang lebih tinggi meskipun berbeda instansi. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa karakteristik responden berdasarkan pekerjaan (Gambar 5.16), dapat dilihat dengan mayoritas pekerjaan adalah ASN (Gambar 5.17). Peneliti menemukan dari survey yang telah disebar kebanyakan ASN juga merangkap di beberapa unsur dalam masyarakat jasa konstruksi sehingga proporsional yang diharapkan untuk menangkap persepsi masyarakat jasa konstruksi cenderung unsur-unsur dari pemerintahan yang lebih dominan. Sehingga hasil dari survey cenderung lebih mengarah dengan kecenderungan lebih puas.

Dapat dilihat juga meskipun dari data empiris menunjukkan *output* dari sertifikasi di Provinsi Kalimantan Utara masih terbilang kecil (tabel 1.1) dibandingkan dengan provinsi - provinsi lain tetapi pada data karakteristik responden berdasarkan sertifikasi yang dimiliki (gambar 5.20) dapat dilihat bahwa mayoritas responden sudah pernah mendapatkan pelayanan sertifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah pernah berinteraksi langsung dan mendapatkan layanan sertifikasi serta menganggap bahwa kualitas pelayanan sertifikasi/pelatihan memuaskan tanpa melihat jumlah *output* dari sertifikasi tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Kara, A. (2009) untuk mencapai tingkat

kualitas layanan publik yang optimal, sektor-sektor harus meningkatkan kualitas dan mengurangi kuantitas dengan selisih yang cukup besar.

Hal ini juga di perkuat dengan adanya masyarakat jasa konstruksi yang berpartisipasi kembali, cenderung memiliki kepercayaan kepada pemerintah, sehingga mereka memiliki niat untuk berpartisipasi kembali. Disisi lain kepercayaan tersebut dibentuk oleh adanya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan meliputi: kualitas pelayanan, kompetensi dan etika. Sehingga pada penelitian ini ditemukan bahwa hasil survey kinerja pelayanan cenderung memiliki kualitas yang baik, dikarenakan mereka yang berpartisipasi dalam forum jasa konstruksi kebanyakan orang-orang yang sebelumnya telah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Serta sesuai dengan penerapan Teori DIAD *Network Dynamic* yang menyebabkan kepuasan terhadap forum jasa konstruksi meningkat dimana Forum Jasa Konstruksi dapat melibatkan berbagai profesional dengan latar belakang berbeda (*Diversity*) seperti arsitek, insinyur sipil, kontraktor, manajer proyek, pemangku kepentingan, akademisi, dan asosiasi. Keberagaman ini membawa perspektif yang kaya dan beragam, yang penting untuk memecahkan masalah kompleks terhadap kebijakan mengenai jasa konstruksi. Keberagaman memungkinkan berbagai ide dan pendekatan untuk diusulkan, meningkatkan peluang untuk menemukan solusi yang inovatif dan efektif. Setiap unsur memiliki peran yang saling bergantung (*Interdependence of interest*). Misalnya, unsur pemerintah membutuhkan pandangan dari sisi unsur akademik, asosiasi dan badan usaha, dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan dalam konteks jasa konstruksi dan setiap unsur memiliki agenda masing-masing untuk membawa kepentingannya masing – masing. Hal ini bisa dilakukan pada forum

jasa konstruksi sebagai wadah pertemuan antar unsur masyarakat jasa konstruksi. Serta adanya dialog yang terbuka dan jujur (*Dialog Autentik*) antara semua unsur memungkinkan penyelesaian konflik dan kesalahpahaman dengan lebih cepat antar unsur sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antar unsur serta memungkinkan semua unsur untuk berbagi ide dan feedback dengan lebih bebas dan konstruktif.

5.5.1 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengartikan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah merupakan aspek penting dalam membentuk partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Semakin baik Masyarakat jasa konstruksi mempersepsikan kepuasan pelayanan yang diberikan, maka partisipasi masyarakat jasa konstruksi juga semakin meningkat.

Hal ini menegaskan bahwa apabila masyarakat melihat pemerintahan berkinerja baik, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan sektor tersebut. Menurut Smith dan Thomas (2017), kinerja pemerintah yang efisien dalam mengelola sektor konstruksi, termasuk regulasi dan kebijakan yang transparan, meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proyek-proyek konstruksi (Smith & Thomas, 2017).

Lebih lanjut, studi oleh Johnson (2019) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik utamanya terkait dengan kinerja yang diberikan berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sektor

konstruksi. Johnson menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan memperkuat keterlibatan masyarakat, karena mereka merasa memiliki peran serta dalam proses yang berdampak langsung pada komunitas mereka (Johnson, 2019). Penelitian ini juga konsisten dengan temuan oleh Lee dan Wong (2018), yang menemukan bahwa adanya persepsi kinerja pemerintah yang positif terkait langsung dengan peningkatan partisipasi publik dalam berbagai aspek pembangunan.

Selanjutnya, hasil ini juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Zhao dan Zhang (2020), yang menyatakan bahwa persepsi positif terhadap kinerja pemerintahan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam inisiatif pemerintah, termasuk di sektor konstruksi. Oleh karena itu, pengaruh positif dan signifikan dari persepsi kinerja pemerintahan terhadap partisipasi masyarakat dalam jasa konstruksi menggarisbawahi pentingnya pemerintahan yang responsif dan efektif. Untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sektor konstruksi (Cahyandari *et al.*, 2024). Menurunnya tingkat keterlibatan dan kepercayaan masyarakat menimbulkan tantangan bagi pemerintah daerah, Untuk mengatasi permasalahan ini, pejabat publik harus menunjukkan efisiensi dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya secara tepat (Gibson *et al.*, 2005). Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas melalui partisipasi masyarakat jasa konstruksi sangat penting untuk membentuk komunitas masa depan dan membangun modal sosial. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonomi tetapi juga akan memperdalam demokrasi partisipatif melalui keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan nasional.

Persepsi atas kinerja pemerintah dalam penelitian ini diukur menggunakan persepsi terkait efektifitas pemerintah dalam memberikan layanan/kerja sama yang berkualitas, memiliki pegawai yang ahli, dan menunjukkan perilaku yang etis, yang dievaluasi berdasarkan tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima layanan. Data menunjukkan bahwa etika memberikan kontribusi untuk mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpartisipasi kembali dalam forum jasa konstruksi tersebut (Jessiman-Perreault & Godley, 2016; Brevik, 2013). Etika pelayanan forum memastikan kesetaraan antara semua peserta, di mana setiap suara dihargai dan dipertimbangkan dengan serius. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif di mana ide-ide dari berbagai latar belakang dan pengalaman dihargai. Sehingga peserta merasa nyaman untuk mengemukakan pendapat tanpa takut akan diskriminasi, intimidasi, atau perlakuan tidak hormat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keinginan untuk kembali berpartisipasi di masa mendatang.

Alasan utama, kepuasan terhadap pelayanan pemerintah memainkan peran penting dalam mempengaruhi keinginan seseorang untuk berpartisipasi kembali dalam program yang diselenggarakan adalah ketika individu merasa puas dengan interaksi mereka dengan pemerintah, ini cenderung meningkatkan keinginan dan motivasi untuk berkontribusi lebih lanjut dalam mendukung tujuan-tujuan program publik. Penelitian telah menunjukkan bahwa kepuasan pelayanan pemerintah dapat secara signifikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program sosial dan pembangunan (Piotrowski & Van Ryzin, 2007).

Data menunjukkan bahwa Masyarakat Jasa Konstruksi memiliki kepuasan yang lebih terhadap etika pelayanan yang didapatkan. Hal ini terkait dengan

kejujuran, perlakuan adil, tanggungjawab, kesesuaian SOP, bersih dari KKN, dan menjaga kerahasiaan data. Ketika pemerintah menerapkan prinsip-prinsip etika ini secara konsisten dalam penyelenggaraan kebijakan publik, ini menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi partisipasi aktif dari masyarakat.

Kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan pelayanan jasa konstruksi membangun keinginan untuk mendukung melalui partisipasi aktif. Ketika pemerintah secara konsisten menunjukkan integritas dalam tindakan mereka, masyarakat cenderung merasa lebih yakin dan nyaman untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan program.

Perlakuan adil dan kesesuaian dengan SOP dalam kaitannya indikator kinerja pemerintah memastikan bahwa setiap partisipasi dan masukan dari masyarakat dihargai dan dipertimbangkan dengan serius. Ini memberikan dorongan tambahan bagi masyarakat untuk aktif terlibat, karena mereka merasa bahwa kontribusi mereka memiliki dampak nyata dalam pembuatan keputusan.

Ketika pelayanan prosesnya bersih dari KKN, hal ini mengurangi keraguan dan skeptisisme masyarakat terhadap motif dan hasil dari kebijakan yang diadakan. Masyarakat jasa konstruksi akan lebih cenderung untuk melibatkan diri jika mereka yakin bahwa proses kebijakan berjalan transparan dan bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, Menjaga kerahasiaan data pribadi atau informasi sensitif masyarakat merupakan aspek penting untuk membangun kepercayaan dan menjaga privasi individu. Ketika pemerintah dapat menjamin perlindungan data dengan baik, ini meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa partisipasi mereka dalam kebijakan tidak akan membahayakan privasi atau kepentingan pribadi mereka.

5.5.2 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengartikan bahwa persepsi atas kinerja pemerintah merupakan aspek penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat jasa konstruksi. Semakin baik Masyarakat jasa konstruksi mempersepsikan kepuasan pelayanan yang diberikan, maka kepercayaan masyarakat jasa konstruksi juga semakin meningkat.

Hal ini menegaskan bahwa apabila masyarakat melihat pemerintahan berkinerja baik, mereka cenderung lebih percaya dalam kegiatan sektor tersebut. Selanjutnya, hasil ini juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Zhao dan Zhang (2020) dimana menunjukkan bahwa ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah bertindak efektif dan adil, mereka lebih cenderung berinvestasi waktu, sumber daya, dan tenaga kerja dalam proyek-proyek yang didukung atau diatur oleh pemerintah.

Selain itu hasil tersebut, sejalan dengan penelitian He dan Ma (2020) dan Yao (2014) yang menjelaskan bahwa perspektif kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan. Dari hasil temuan studi ini memberikan landasan teoretis yang kuat bahwa persepsi kinerja pemerintahan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat secara langsung, terutama dalam konteks layanan publik seperti sektor jasa konstruksi.

Oleh karena itu, berbagai penelitian menemukan bahwa persepsi kualitas layanan publik berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong kepercayaan terhadap pemerintah (Badri dkk., 2015;

Widodo dkk., 2020). Kinerja di bidang tertentu, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan, dapat mempunyai dampak yang berbeda-beda terhadap kepercayaan masyarakat (Sempiga dkk., 2023). Namun, hubungan antara kinerja dan kepercayaan sangatlah kompleks, dengan potensi kausalitas dua arah (Van de Walle & Bouckaert, 2003). Faktor-faktor seperti demografi masyarakat, ekspektasi, dan konteks budaya juga mungkin berperan dalam membentuk kepercayaan (Badri dkk., 2015; Widodo dkk., 2020). Meskipun pelayanan publik yang berfungsi dengan baik sering disebut-sebut sebagai cara untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintah, hubungan antara kinerja dan kepercayaan tidak selalu jelas dan bergantung pada kondisi tertentu (Van de Walle & Bouckaert, 2003). Secara keseluruhan, studi-studi ini menyoroti pentingnya kinerja layanan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari data temuan di lapangan menunjukkan bahwa kepercayaan Institusional memiliki nilai signifikansi yang tinggi jika dibandingkan dengan indikator lainnya. Dimensi ini terkait dengan persepsi individu terhadap institusionalnya yakni pemerintah itu sendiri dalam forum jasa konstruksi. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terkait institusi telah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU, memiliki nilai yang dominan dalam merefleksikan dimensi kepercayaan Institusional. Bagaimanapun hal ini terkait dengan bagaimana institusi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat jasa konstruksi.

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah akan memberikan perspektif bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menilai sejauh mana harapan mereka telah terpenuhi. Jika kebanyakan harapan telah terpenuhi maka akan menimbulkan kepercayaan terhadap institusi, disposisi, maupun interpersonal. Kepuasan

pelayanan merujuk pada persepsi partisipan terhadap kualitas layanan yang diterima, yang mencakup aspek-aspek seperti kompetensi, kualitas pelayanan, dan etika. Ketika masyarakat jasa konstruksi merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, mereka cenderung membangun kepercayaan yang lebih tinggi terhadap penyedia layanan tersebut.

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan jangka panjang antara penerima layanan dan penyedia layanan (Casielles et al., 2005). Salah satu alasan utama mengapa kepuasan pelayanan berdampak positif terhadap kepercayaan adalah karena kepuasan mencerminkan pengalaman positif penerima layanan. Pengalaman positif ini menciptakan persepsi bahwa penyedia layanan konsisten dalam memberikan kualitas layanan yang baik. Konsistensi ini yakni, konsisten dalam hal kompetensi, kualitas dan etika yang menjadi salah satu dasar utama dari kepercayaan, karena penerima layanan merasa yakin bahwa mereka dapat mengandalkan penyedia layanan untuk memenuhi harapan mereka secara terus-menerus.

Penelitian yang dilakukan oleh Zeithaml *et al.* (1996) mendukung hubungan ini. Dalam studi mereka, ditemukan bahwa ada korelasi kuat antara kepuasan pelayanan dan kepercayaan. Mereka menunjukkan bahwa ketika penerima layanan puas dengan pelayanan yang diberikan, mereka cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap penyedia layanan. Penelitian ini menekankan pentingnya kualitas pelayanan dalam membangun kepercayaan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt (1994) dalam teori komitmen-kepercayaan juga mendukung pandangan ini. Ketika konsumen merasakan bahwa penyedia layanan menghargai mereka dan berusaha untuk

memenuhi kebutuhan mereka, hal ini akan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap penyedia layanan. Selain itu, kepuasan pelayanan yang tinggi sering kali diikuti oleh pengalaman interaksi yang positif antara penerima layanan dan penyedia layanan. Interaksi ini mencakup aspek-aspek seperti respons yang cepat terhadap permintaan penerima layanan, sikap ramah, dan kemauan untuk membantu menyelesaikan masalah. Ketika penerima layanan merasa bahwa penyedia layanan peduli terhadap mereka dan berupaya memberikan layanan terbaik, hal ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka.

Dalam konteks ini, penting bagi penyedia layanan untuk terus mengukur dan meningkatkan kepuasan masyarakat jasa konstruksi. Melalui survei kepuasan dan *feedback*, penyedia layanan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pelayanan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat jasa konstruksi.

Dengan demikian, hubungan antara kepuasan pelayanan dan kepercayaan adalah hubungan yang saling mendukung dan berkelanjutan. Penyedia layanan FJK yang berfokus pada peningkatan kepuasan masyarakat jasa konstruksi akan melihat peningkatan kepercayaan, yang pada gilirannya akan membawa manfaat jangka panjang dalam bentuk loyalitas dan reputasi yang baik di organisasi sektor publik.

5.5.3 Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini mengartikan bahwa kepercayaan merupakan aspek penting dalam membentuk partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, maka partisipasi masyarakat jasa konstruksi juga semakin meningkat. Hal ini mendukung penelitian milik Nulhusna, *et al* (2017), Caemmerer, *et al.* (2017), lee *et al* (2018) dimana kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keinginan untuk berpartisipasi.

Hubungan antara kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan merupakan bidang kajian yang penting, karena mempengaruhi efektivitas pemerintahan dan keterlibatan warga dalam proses politik. Hasil temuan penelitian ini memahami bagaimana kepercayaan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah utamanya di bidang konstruksi. Kepercayaan terhadap institusi pemerintah berdampak positif terhadap kemungkinan warga negara untuk memilih dan menandatangani program pemerintah, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dapat meningkatkan partisipasi politik (Lee & Schachter, 2019).

Hubungan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat bersifat kompleks dan bergantung pada konteks. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang lebih tinggi akan meningkatkan partisipasi dalam aktivitas seperti memberikan suara (Lee & Schachter, 2019), penelitian lain menemukan adanya korelasi negatif, khususnya untuk partisipasi terkait protes (Holum, 2022). Kepercayaan terhadap institusi politik dan pemimpin

dapat mempengaruhi keterlibatan warga negara dan persepsi kualitas hidup secara positif (Carreira et al., 2016). Namun, inisiatif pemerintah untuk meningkatkan partisipasi mungkin memiliki dampak terbatas terhadap kepercayaan dan tingkat partisipasi aktual (Holum, 2022). Oleh karena itu, Pejabat publik memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan melalui praktik berkelanjutan yang mengelola hubungan dengan warga negara (Corbett & Dantec, 2018). Dampak kepercayaan terhadap partisipasi bervariasi dalam berbagai bentuk keterlibatan, dengan beberapa aktivitas menunjukkan korelasi positif dan aktivitas lainnya negatif. Hal ini menyoroti perbedaan sifat hubungan ini dalam sistem demokrasi (Lee & Schachter, 2019; Holum, 2022).

Kepercayaan merupakan faktor penting dalam partisipasi masyarakat, dengan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi akan menyebabkan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif (Uslaner & Brown, 2005). Kepercayaan pada umumnya mendorong partisipasi politik dan komunal, terutama ketika warga negara merasa dihormati dan mendapat informasi. Namun kesenjangan antara kesesuaian dengan kewenangan yang di dapat melemahkan kepercayaan dan mengurangi partisipasi. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk membina masyarakat yang lebih terlibat dan percaya. Dikarenakan banyak hal yang kemudian tidak diatur oleh undang-undang. Sehingga para aktor pelayanan harus berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap penyedia jasa konstruksi meningkatkan rasa aman dan kenyamanan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi atau kegiatan dalam pembinaan jasa konstruksi. Ketika mereka percaya bahwa penyedia jasa konstruksi dapat diandalkan, mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam berbagai

tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan tidak kalah pentingnya yaitu berperan aktif dalam pembinaan jasa konstruksi. Partisipasi ini dapat berupa kontribusi ide, umpan balik, hingga keterlibatan fisik dalam pembangunan. Kepercayaan yang tinggi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan penyedia jasa konstruksi.

Penelitian oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) dalam model kepercayaan organisasi menunjukkan bahwa kepercayaan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan partisipasi. Mereka mengemukakan bahwa kepercayaan meningkatkan keterlibatan individu karena mereka merasa yakin bahwa pihak lain akan memenuhi komitmen mereka. Dalam konteks jasa konstruksi, kepercayaan masyarakat terhadap penyedia jasa konstruksi memastikan bahwa partisipasi mereka akan dihargai dan diterima dengan baik.

Penelitian oleh Rousseau *et al.* (1998) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa kepercayaan dapat mengurangi ketidakpastian dan kompleksitas dalam hubungan kerja. Dalam bidang konstruksi, kepercayaan masyarakat terhadap penyedia jasa konstruksi membantu mengurangi ketidakpastian terkait dengan hasil proyek dan proses pelaksanaannya, sehingga mendorong partisipasi yang lebih besar.

Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, proses, dan tanggung jawab mereka dalam proyek konstruksi (Lee & Kim, 2018). Ketika masyarakat merasa bahwa penyedia jasa konstruksi transparan dan jujur dalam komunikasi mereka, hal ini memperkuat kepercayaan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Masyarakat jasa konstruksi percaya terhadap pegawai pemerintah ketika mereka menunjukkan

tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya karena tanggung jawab mencerminkan komitmen dan integritas dalam melayani publik. Ketika pegawai pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelayanannya maka kecenderungan masyarakat jasa konstruksi akan berpartisipasi kembali.

Dalam praktiknya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jasa konstruksi memerlukan upaya yang konsisten dari penyedia jasa konstruksi. Hal ini meliputi penyediaan layanan yang berkualitas melalui institusi, pegawai, serta dampak dan hasil membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan yang terbentuk akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dan konstruktif dari masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan keberhasilan FJK.

5.5.4 Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi

Berdasarkan hasil pengolahan data disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat jasa konstruksi signifikan memediasi hubungan antara persepsi atas kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Hal ini mengartikan bahwa kepercayaan merupakan aspek penting dalam memediasi kedua hubungan tersebut. Hal ini mendukung penelitian milik Caemmerer, *et al.* (2017) dimana kepercayaan signifikan memediasi hubungan persepsi atas kinerja terhadap keinginan untuk berpartisipasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin orang merasa puas terhadap layanan yang telah diberikan maka semakin orang tersebut memiliki kepercayaan, kemudian kepercayaan tersebut menimbulkan dukungan sehingga orang yang percaya akan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah tersebut

(Caemmerer, *et al.*, 2017). Meskipun hasil penelitian menunjukkan mediasi bersifat komplementer, yakni mediasi parsial. Akan tetapi tanpa adanya kepercayaan, maka partisipasi tidak dapat memberikan pengaruh sempurna terhadap keinginan untuk berpartisipasi kembali.

Kepercayaan merupakan elemen kunci dalam hubungan jangka panjang antara penerima layanan dan penyedia layanan (Casielles *et al.*, 2005). Ketika penerima layanan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap penyedia layanan, mereka lebih mungkin untuk tetap setia dan terus menggunakan layanan tersebut. Kepercayaan ini juga mendorong penerima layanan untuk merekomendasikan layanan tersebut kepada orang lain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi penyedia layanan.

Dalam analisis ini, kepuasan layanan berperan sebagai faktor utama yang memengaruhi kepercayaan, yang pada gilirannya berdampak pada keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan jasa konstruksi. Proses mediasi ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Kepercayaan yang terbentuk dari kepuasan layanan kemudian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepuasan dengan keinginan untuk berpartisipasi. Kepercayaan meningkatkan rasa aman dan kenyamanan masyarakat, yang membuat mereka lebih cenderung untuk terlibat secara aktif dalam pembinaan jasa konstruksi. Kepercayaan mengurangi persepsi risiko dan ketidakpastian, sehingga masyarakat merasa lebih yakin dan termotivasi untuk berkontribusi dalam berbagai aspek proyek, termasuk memberikan umpan balik, ide, dan bahkan keterlibatan fisik.

Penelitian oleh Morgan dan Hunt (1994) dalam teori komitmen-kepercayaan mendukung peran mediasi kepercayaan dalam hubungan ini. Mereka mengemukakan bahwa kepercayaan memediasi hubungan antara berbagai faktor, seperti kepuasan layanan dan partisipasi, dengan mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan komitmen. Lebih lanjut, kepercayaan yang tinggi juga mendorong komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara masyarakat dan penyedia jasa konstruksi. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa harapan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terpenuhi. Ketika masyarakat merasa bahwa penyedia jasa konstruksi transparan dan responsif terhadap kebutuhan mereka, hal ini memperkuat kepercayaan dan meningkatkan keinginan mereka untuk berpartisipasi.

Penelitian oleh Garbarino dan Johnson (1999) menunjukkan bahwa kepercayaan memperkuat hubungan antara kepuasan layanan dan perilaku partisipatif konsumen (di dunia bisnis). Dalam konteks jasa konstruksi, kepercayaan diterjemahkan menjadi partisipasi aktif dan konstruktif. Dengan demikian, kepercayaan memainkan peran mediasi yang signifikan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada gilirannya akan mendorong partisipasi yang lebih besar dan lebih bermakna pembinaan jasa konstruksi. Hal ini menunjukkan pentingnya pemerintah sebagai penyedia jasa konstruksi untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan dan membangun kepercayaan sebagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat jasa konstruksi.

Tabel 5. 28 Summary

	Kesimpulan
Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	Berpengaruh positif dan signifikan
Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintahan terhadap Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Berpengaruh positif dan signifikan
Pengaruh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi	Berpengaruh positif dan signifikan
Pengaruh Persepsi atas Kinerja Pemerintah Terhadap Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi Dimediasi Oleh Kepercayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi signifikan memediasi hubungan antara persepsi atas kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi

Keterangan: Olahan peneliti

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Persepsi kinerja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi. Ketika masyarakat menilai kinerja pemerintah baik dan sesuai harapan, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi. Selain kepuasan pelayanan pemerintah, juga dipengaruhi oleh etika pelayanan seperti kejujuran, perlakuan adil, tanggung jawab, kesesuaian dengan SOP, dan bebas dari KKN di samping kompetensi aktor yang terlibat. Akan tetapi harapan/ekspektasi masyarakat jasa konstruksi yang jauh lebih besar harus lebih diperhatikan karena membawa pengaruh yang signifikan terhadap menurunnya kepuasan kinerja pelayanan.
2. Persepsi atas kinerja pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Dikarenakan sejauh mana harapan masyarakat jasa konstruksi telah terpenuhi, hal ini berkaitan dengan baiknya kinerja pemerintah dalam pelayanan forum jasa konstruksi tersebut termasuk kegiatan dalam upaya pembinaan jasa konstruksi. Jika kebanyakan harapan telah terpenuhi maka akan menimbulkan kepercayaan terhadap institusi, aktor pada institusi, maupun produk dari institusi tersebut. Ketika masyarakat jasa konstruks merasa puas dengan

pelayanan yang diberikan, mereka cenderung membangun kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah dalam hal ini penyedia layanan terkait pembinaan jasa konstruksi. Akan tetapi terdapat kekhawatiran terhadap efektivitas output pelayanan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal kualitas pelayanan tersebut.

3. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi berpengaruh positif dan signifikan. Dikarenakan, ketika masyarakat jasa konstruksi percaya terhadap kegiatan terkait pembinaan jasa konstruksi, maka hal ini meningkatkan rasa aman dan kenyamanan mereka dalam berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi atau kegiatan dalam pembinaan jasa konstruksi. Ketika mereka percaya maka kecenderungan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan tidak kalah pentingnya yaitu berperan aktif dalam pembinaan jasa konstruksi. Namun, yang perlu mendapatkan perhatian adalah partisipasi aktif masih perlu mendapatkan sorotan, harapannya masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam forum, tetapi juga berkontribusi dalam setiap proses yang dilakukan sehingga membentuk partisipasi aktif.
4. Kepercayaan masyarakat jasa konstruksi signifikan memediasi hubungan antara persepsi atas kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat jasa konstruksi. Dikarenakan, semakin masyarakat jasa konstruksi puas terhadap kinerja pelayanan yang telah diberikan, maka mereka semakin memiliki kepercayaan, yang kemudian menimbulkan dukungan sehingga orang yang percaya akan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah tersebut. Namun temuan menunjukkan mediasi berjenis

parsial, yang menandakan pengaruh dapat melalui dua jalur yakni pengaruh langsung dan tidak langsung. Akan tetapi, meningkatnya kinerja pelayanan dengan dibarengi meningkatnya kepercayaan, jauh lebih baik mempengaruhi keinginan berpartisipasi kembali, dibandingkan tanpa adanya kepercayaan.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diperoleh saran sebagai berikut ini.

1. Berdasarkan pelaksanaan Forum Jasa Konstruksi yang merupakan perwujudan dari keterwakilan Masyarakat Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran keterwakilan unsur didominasi oleh keterwakilan pemerintah, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN). Situasi ini tidak ideal karena tujuan dari forum tersebut adalah untuk menciptakan partisipasi yang seimbang antara berbagai pemangku kepentingan dalam sektor konstruksi, termasuk masyarakat, profesional, dan pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa dominasi keterwakilan pemerintah ini sebaiknya tidak dilanjutkan:

- a. Ketidakseimbangan Partisipasi: Dominasi ASN dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan, di mana perspektif dari masyarakat dan pelaku industri konstruksi swasta mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
- b. Keterbatasan Inovasi: Partisipasi yang beragam dari berbagai unsur dapat membawa inovasi dan ide-ide baru yang mungkin tidak muncul jika hanya satu kelompok yang dominan.

- c. Pembangunan Berkelanjutan: Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, perlu adanya representasi yang adil dari semua pemangku kepentingan. Keterwakilan yang seimbang dapat membantu memastikan bahwa semua perspektif dipertimbangkan dan kebutuhan berbagai kelompok dapat terpenuhi.
- d. Kepercayaan Masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pengambilan keputusan dapat meningkat jika mereka merasa bahwa mereka memiliki perwakilan yang adil dalam forum tersebut. Hal ini penting untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas: Keterwakilan yang lebih seimbang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat mengurangi risiko konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi dari berbagai unsur masyarakat dalam Forum Jasa Konstruksi. Ini bisa melibatkan langkah-langkah seperti memperkuat peran asosiasi profesi, organisasi masyarakat, dan pelaku industri konstruksi swasta dalam forum tersebut, serta memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus menjaring secara efektif harapan Masyarakat jasa konstruksi, hal ini dapat dilakukan dengan rutin memberikan survey kepuasan, menerima bentuk kritik dan saran. Serta, benar-benar menindaklanjuti dari hasil survey, kritik dan saran tersebut. Di sisi lain forum

jasa konstruksi yang sudah diadakan rutin guna menjaring aspirasi-aspirasi dari unsur-unsur jasa konstruksi lebih bisa lebih diperkaya pesertanya di luar unsur pemerintah guna dapat menjaring aspirasi yang konstruktif dan membangun.

2. Selain kualitas pelayanan yang memiliki kepuasan yang cukup baik hendaknya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendorong percepatan secara kuantitas dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi khususnya sertifikasi tenaga ahli. Dengan kedua hal tersebut, diharapkan *outcome* pembinaan jasa konstruksi semakin terasa signifikan salah satunya dengan peningkatan sertifikasi dan pelatihan yang lebih terstruktur, tenaga kerja konstruksi akan memiliki kompetensi yang lebih tinggi, meningkatkan profesionalisme di sektor ini dan juga peningkatan kualitas hasil pekerjaan konstruksi, mengurangi kesalahan dan kecelakaan kerja, serta meningkatkan efisiensi proyek.
3. Untuk menciptakan partisipasi aktif, diperlukan kolaborasi yang erat antara target pelayanan dengan penerima layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong kontribusi aktif partisipan masyarakat jasa konstruksi dan memberikan peran evaluatif dalam menciptakan saran yang konstruktif. Sehingga, peran penyedia layanan, dalam hal ini pemerintah, dapat memperbaiki segala kekurangan dari kualitas pelayanan yang diberikan.

Strategi untuk Mendorong Partisipasi Aktif

- a. Pengadaan Forum Diskusi dan Konsultasi Publik.

Pertemuan rutin dalam hal ini Forum Jasa Konstruksi yaitu forum yang mempertemukan antara pemerintah dan masyarakat jasa

konstruksi guna membahas isu-isu terkini, tantangan, dan peluang dalam sektor konstruksi. Konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik sebelum implementasi kebijakan atau proyek besar untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari berbagai pihak. Serta mendorong perwakilan setiap unsur untuk menjaring aspirasi yang diwakili guna dibawa ke dalam Forum Jasa Konstruksi.

b. Peran Evaluatif Partisipan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendorong dalam pemberian partisipan di dalam forum jasa konstruksi wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta membangun sistem umpan balik yang efektif di mana partisipan dapat memberikan saran dan kritik yang konstruktif, yang kemudian dianalisis dan ditindaklanjuti oleh pemerintah

c. Kolaborasi *Multi-Stakeholder*

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendorong asosiasi profesi dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa berbagai suara dan kepentingan terwakili. Selain itu melibatkan akademisi dan lembaga riset untuk melakukan studi dan penelitian yang dapat memberikan wawasan tambahan mengenai cara meningkatkan kualitas pelayanan.

d. Inisiatif Penghargaan

Dalam konteks penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada partisipan yang

memberikan kontribusi signifikan dalam proses masukan dan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat jasa konstruksi dapat meningkat, sehingga tercipta partisipasi aktif yang konstruktif. Partisipasi aktif ini tidak hanya akan membantu memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga akan memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Hasil akhirnya adalah terciptanya layanan konstruksi yang lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinboade, O. A., Kinfack, E. C., & Mokwena, M. P. (2012). *An analysis of citizen satisfaction with public service delivery in the Sedibeng district municipality of South Africa*. *International Journal of Social Economics*, 39(3), 182–199. Doi:10.1108/03068291211199350.
- Badri, M.A., Al Khaili, M., & Al Mansoori, R.L. (2015). *Quality of Service, Expectation, Satisfaction and Trust in Public Institutions: The Abu Dhabi Citizen Satisfaction Survey*. *Asian Journal of Political Science*, 23, 420 - 447.
- Berglas, E. (1984). *Quantities, qualities and multiple public services in the Tiebout model*. *Journal of Public Economics*, 25, 299-321. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(84\)90058-6](https://doi.org/10.1016/0047-2727(84)90058-6).
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge.
- Bouckaert, G., & van de Walle, S. (2003). *Comparing measures of citizen trust and user satisfaction as indicators of 'good governance': Difficulties in linking trust and satisfaction indicators*. *International Review of Administrative Sciences*. 69(3), 329–343. Doi: 10.1177/0020852303693003.
- Brevik, L.M. (2013). *Research Ethics: An Investigation Into Why School Leaders Agree Or Refuse To Participate In Educational Research*. *Problems of Education in the 21st Century*.
- Caemmerer, et al (2017). *Public Service Satisfaction, Citizen Trust, and Participation*, *Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science*. Doi: 10.1007/978-3-3-319-47331-4_96
- Cahyandari, R., Ibrahim, R.A., & Yuningsih, S.H. (2024). *The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Cibungur Tasikmalaya Village Fund Management*. *International Journal of Humanities, Law, and Politics*.
- Calnan, M. and Rowe, R. (2004) *Trust in Health Care: An Agenda for Future Research*. The Nuffield Trust.
- Calnan, M. and Rowe, R. (2006) *Researching trust relations in health care: conceptual and methodological challenges*. *Journal of Health Organisation and Management*, 20(5): 349–58. Doi: 10.1108/14777260610701759.
- Calnan, M. and Rowe, R. (2008) *Trust Matters In Healthcare*. McGrawHill.
- Casielles, R. V., Álvarez, L. S., & Martín, A. M. D. (2005). *Trust as a key factor in*

successful relationships between consumers and retail service providers. The Service Industries Journal, 25(1), 83–101. <https://doi.org/10.1080/0264206042000302423>.

- Christensen, T., & Læg Reid, P. (2005). *Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors and demography*. Public Performance & Management Review, 28(4), 487–511. Doi: 10.1080/15309576.2005.11051848.
- Church, J., Saunders, D., Wanke, M., Et al. (2002). *Citizen participation in health decision-making: past experience and future prospects*. Journal of Public Health Policy, 23(1), 12–32. Doi:10.2307/3343116.
- Cole, Martin & Greg Parston (2006). *Unlocking Public Value: A New Model For Achieving High Performance In Public Service Organization*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Corbett, E., & Dantec, C.A. (2018). *Going the Distance: Trust Work for Citizen Participation. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks.
- Dalton, R. J. (2004). *Democratic challenge, democratic choices*. Oxford University Press.
- Dryzek, J. S. (2000). *Deliberative Democracy and Beyond*. Oxford University Press.
- European Commission. (2018). *Indicators of Citizen-centric Public Service Delivery*. The World Bank.
- Fitriani, D., Shauki, E. R., & Pratiwi, S. C. (2020). *Village fund accountability and gendering in masculine hegemonic institution: A study during COVID-19*. ASEAN Journal of Community Engagement, 4(2), 386–415. Doi: 10.7454/ajce.v4i2.1106.
- Garbarino, E., & Johnson, M. S. (1999). *The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationships*. Journal of Marketing, 63(2), 70–87.
- Gibson, P.D., Lacy, D.P., & Dougherty, M.J. (2005). *Improving Performance and Accountability in Local Government with Citizen Participation*.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan (2015). *Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. Haryono, Siswoyo. (2016). *Metode SEM*

- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). *PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet*. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–151. Doi: 10.2753/MTP1069-6679190202.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L. & Kuppelwieser, V. G. (2014). *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research*. *European Business Review*, 26(2), 106-121. Doi: 10.1108/EBR-10-2013-0128.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). *Rethinking some of the rethinking of partial least squares*. *European Journal of Marketing*, 53(4), 566–584. Doi: 10.1108/EJM-10-2018-0665.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. Et al. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. Springer.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. Et al. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Third Edition*. Sage Publication.
- Hajer, M. A., & Wagenaar, H. (Eds.). (2003). *Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society*. Cambridge University Press. Doi: 10.1017/CBO9780511490934.
- Holum, M. (2023). *Citizen Participation: Linking Government Efforts, Actual Participation, and Trust in Local Politicians*. *International Journal of Public Administration*, 46(13), 915–925. Doi: 10.1080/01900692.2022.2048667.
- Innes, J. & Booher, D. E. (2000). *Planning Institutions in the Network Society: Theory for Collaborative Planning*, in Salet, W. and A. Faludi (eds.), *Revival of Strategic Spatial Planning*, Amsterdam: Elsevier/Oxford University Press, pp. 175–189.
- Jessiman-Perreault, G., & Godley, J. (2016). *Playing through the Pain: A University-Based Study of Sports Injury*. *Advances in Physical Education*, 06, 178-194.
- Jiaming, et al. (2008). *Effects of innovativeness and trust on web survey participation*. 144-152.
- Johnson, M. (2019). *Governance, Transparency, and the Role of Public Participation in the Construction Sector*. *International Journal of Public Administration*, 42(12), 1034-1045
- Kalgin, A., Dvinskikh, D., & Parfenteva, D. (2017). *Do Performance Management Systems Increase the Civil Servants Job Satisfaction*.
- Kim, S. (2005). *The Role of Trust in the Modern Administrative State: An Integrative*

- Model. Administration & Society*, 37(5),611-635. Doi: 10.1177/0095399705278596.
- Kim, S., & Lee, J. (2012). *E-participation, transparency, and trust in local government*. *Public Administration Review*, 72(6), 819–828. Doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x.
- Kumlin, S. (2002). *Institutions-experiences-preferences: How welfare state design affects political trust and ideology*. dalam B. Rothstein & S. Steinmo (Eds.), *Restructuring the welfare state: Political institutions and policy change* (pp. 20–50). Palgrave Macmillan US.
- Lachowicz, M. J., Preacher, K. J., & Kelley, K. (2018). *A novel measure of effect size for mediation analysis*. *Psychological Methods*, 23(2), 244–261. <https://doi.org/10.1037/met0000165>.
- Lee, M., & Wong, S. (2018). *Public Trust in Construction and Participation in Urban Development: The Impact of Governance*. *Urban Studies*, 55(2), 367-387
- Lee, N., & Kim, Y. (2018). *A Conceptual Framework for Effective Communication in Construction Management*. *Information Processing and Visual Communication*.
- Lee, Y., & Schachter, H. (2019). *Exploring the Relationship between Trust in Government and Citizen Participation*. *International Journal of Public Administration*, 42, 405 - 416. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1465956>.
- Ma, L., & Christensen, T. (2019). *Government trust, social trust, and citizens' risk concerns: Evidence from crisis management in China*. *Public Performance & Management Review*, 42(2), 383–404. Doi : 10.1080/15309576.2018.1464478.
- Marc, et al. (2013). *Effects of innovativeness and trust on web survey participation*, 131-155.
- Marthe Holum. (2023). *Citizen Participation: Linking Government Efforts, Actual Participation, and Trust in Local Politicians*, 915-925
- Martono, N. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust*. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- Meer, V. D. (2017). *Political Trust and the Crisis of Democracy*. Oxford University Press.
- Mizrahi, S., Vigoda-Gadot, E., & Cohen, N. (2009). *Trust, participation, and*

performance in public administration: An empirical examination of health services in Israel. Public Performance & Management Review, 33(1), 7–33. Doi: 10.2753/PMR1530-9576330101.

Morgeson, F. V., & Petrescu, C. (2011). *Do they all perform alike? An examination of perceived performance, citizen satisfaction and trust with US federal agencies*. *International Review of Administrative Sciences*, 77(3), 451–479. Doi: 10.1177/0020852311407278.

Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). *The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing*. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.

Nulhusna, et al (2017). *The Relation of e-Government Quality on Public Trust and its Impact towards public participation*. Emerald Publishing Limited. Doi: 10.1108/TG-01-2017-0004

OECD. (2000). *Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services*. OECD Publishing. Doi: 10.1787/9789264048874-en.

OECD. (2003). *Poverty and Health*. OECD Publishing.

OECD. (2006). *DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment: Good Practice Guidance for Development Co-operation*. OECD Publishing.

OECD. (2008). *Implementation Guide To Ensure Accountability And Transparency In State Ownership*. OECD Publishing.

OECD. (2013). *Investing in Trust: Leveraging Institutions for Inclusive Policymaking*. OECD Publishing.

OECD. (2013b). *Citizen satisfaction with public services. in Government at a Glance 2013*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/gov_glance-2013-56-en.

OECD. (2015). *OECD Recommendation of the Council on Budgetary Governance*. OECD Guidelines for citizen participation processes.

OECD. (2016). *Policy Shaping And Policy Making: The Governance Of Inclusive Growth*. OECD Publishing.

OECD. (2022). *OECD Guidelines for Citizen Participation Processes*. OECD Publishing. Doi: 10.1787/f765caf6-en.

Ogbeibu, S., Jabbour, C. J. C., Gaskin, J. Et al. (2021). *Leveraging STARA competencies and green creativity to boost green organisational innovative evidence: A praxis for sustainable development*. *Business Strategy and the Environment*, 30(5), 2421–2440. Doi: 10.1002/bse.2754.

- Panjaitan (2022). Paradigma Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, 162–171.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). *Citizens' satisfaction with public services: Effects of individual and local government characteristics*. *Urban Affairs Review*, 42(1), 79-97.
- Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Rafaella Nanetti, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Quixian, et al. (2020). *Empirical Study on the Evaluation Model of Public Satisfaction With Local Government Budget Transparency: A Case From China*, 1-15
- Rachenjantono, 2010. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Jasa Konstruksi BPHN*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Robinson, S. E., Stoutenboroughm J. W. & Vedlitz, A. (2017). *Understanding Trust In Government Environmental Sustainability, Fracking, And Public Opinion In American Politics*. Routledge.
- Romieke, J., Hertel, G., & Konradt, U. (2016). *How Differences in Perceptions of Own and Team Performance Impact Trust and Job Satisfaction in Virtual Teams*. *Team Performance Management: An International Journal*, 22(3/4), 146-186. <https://doi.org/10.1108/TPM-01-2016-0003>
- Rose-Ackerman, S. (2001). *Trust, honesty and corruption: reflection on the state-building process*. *European Journal of Sociology*. 42(3): 526–70.
- Rothstein, B., & Steinmo, S. (2002). *Restructuring politics: Institutional analysis and the challenges of modern welfare states*. In B. Rothstein & S. Steinmo (Eds.), *Restructuring the welfare state: Political institutions and policy change*, 1–19. Palgrave Macmillan.
- Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). *Not So Different After All: A Cross-Discipline View of Trust*. *Academy of Management Review*, 23(3), 393-404.
- Salim, M. , Peng, X. , Almaktary, S. and Karmoshi, S. (2017). *The Impact of Citizen Satisfaction with Government Performance on Public Trust in the Government: Empirical Evidence from Urban Yemen*. *Open Journal of Business and Management*, 5, 348-365. Doi: 10.4236/ojbm.2017.52030.
- Sempiga, O., Liedekerke, L.V., & Mestdagh, B. (2023). *Does Government Performance Influence Public Trust? The Case of Sustainable Development Goals Policies at Local Level*. *Journal of Management Policy and Practice*.

- Sinambela, L. P. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Graha Ilmu.
- Smith, J., & Thomas, R. (2017). *Governance and transparency impacts on construction sector performance*. *Journal of Civil Engineering and Management*, 23(5), 641-655
- Sonali, et al. (2020). *Moderating effect of perceived trust on service quality – student satisfaction relationship: evidence from Indian higher management education institutions*. 1-26.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 , tentang Jasa Kontruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Nomor Tambahan Lembar Negara 6673)
- Uslaner, E., & Brown, M. (2005). *Inequality, Trust, and Civic Engagement*. *American Politics Research*, 33, 868 - 894. <https://doi.org/10.1177/1532673X04271903>.
- Van de Walle, S., & Bouckaert, G. (2003). *Public Service Performance and Trust in Government: The Problem of Causality*. *International Journal of Public Administration*, 26, 891 - 913.
- Widodo, D., Silitonga, P.E., & Ali, H. (2020). *The Influence of Good Governance, Culture, and Performance in Increasing Public Satisfaction and Implication to Public Trust: Study in Indonesian Government*.
- S. Pavan, et al. (2017). *Influence of Trust and Participation in Decision Making on Employee Attitudes in Indian Public Sector Undertakings*, 1-13
- Yao, X. (2014). *Citizen Trust Of Government In The Context Of Citizen-Centered Administration: Performance, Information Technology, Participation, And Social Capital*. Dissertation Graduate School-Newark Rutgers, The State University of New Jersey
- Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). *The Behavioral Consequences of Service Quality*. *Journal of Marketing*, 60(2), 31-46.
- Zhao, D., & Zhang, L. (2020). *Public Perception of Government Performance and Public Participation in Infrastructure Projects*. *Journal of Public Affairs*, 20(4), e2043.
- Zhao, X., Lynch, J. G., & Chen, Q. (2010). *Reconsidering Baron and Kenny: Myths*

and truths about mediation analysis. *Journal of Consumer Research*, 37(2), 197–206. Doi: 10.1086/651257.

Zuriah, N. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*. PT Bumi Aksara.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Bapak/ibu, Ysh.

Ketidaktepatan anggaran, serta belum terbentuknya perangkat daerah yang diamanatkan oleh undang-undang, menjadi beberapa faktor yang menyebabkan kemungkinan belum maksimalnya kinerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam urusan sektor jasa konstruksi. Sehingga perlu ada prioritas program dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mencapainya diperlukan partisipasi masyarakat jasa konstruksi untuk ikut andil dalam pengambilan kebijakan yang sesuai, salah satunya melalui Forum Jasa Konstruksi (FJK). Forum Jasa Konstruksi (FJK) diperlukan partisipasi yang dimediasi kepercayaan masyarakat agar terbentuk suatu kebijakan publik yang efektif dan efisien. Forum Jasa Konstruksi (FJK) menjadi perwujudan partisipasi masyarakat jasa konstruksi, yaitu dengan memanfaatkan hak untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi, termasuk ide-ide atau evaluasi dalam pemecahan masalah yang kerap terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh kinerja pemerintah terhadap partisipasi masyarakat dimediasi oleh kepercayaan masyarakat

Kami mohon bantuan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner tersebut agar kami dapat menyelesaikan penelitian kami. Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu kami menyampaikan terima kasih.

a.n Peneliti
Angga Asfan Candra, S.ST

IDENTITAS RESPONDEN

Nama	:						
Asal Kabupaten	:	Bulungan Tarakan	<input type="checkbox"/>	Tana Tidung Nunukan	<input type="checkbox"/>	Malinau diluar Kaltara	<input type="checkbox"/>
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki	<input type="checkbox"/>	Perempuan	<input type="checkbox"/>		
Pekerjaan	:	Pengusaha ASN DLL..... (Mohon ditulis)	<input type="checkbox"/>	Dosen Karyawan	<input type="checkbox"/>	Wiraswasta Kontraktor	<input type="checkbox"/>
Usia	:	17 – 29 Th 60 – 74 Th	<input type="checkbox"/>	30 – 44 Th 75 Th ke atas	<input type="checkbox"/>	45 – 59 Th	<input type="checkbox"/>
Pendidikan Terakhir:		Diploma	<input type="checkbox"/>	S1	<input type="checkbox"/>	S2	<input type="checkbox"/>
Jurusan yang diadml:		Teknik/IPA	<input type="checkbox"/>	Non Teknik/IPS	<input type="checkbox"/>	Kombinasi	<input type="checkbox"/>
Jumlah Sertifikasi:		0	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>
				3	<input type="checkbox"/>	>4	<input type="checkbox"/>

Unsur yang diwakili :

1. *Unsur Pemerintah Pusat*
2. *Pembina Jasa Konstruksi*
3. *Tim Pembangunan dan Percepatan Pembangunan*
4. *Unsur Asosiasi Badan Usaha*
5. *Unsur Asosiasi Profesi*
6. *Unsur Pemerintah Provinsi*
7. *Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota*
8. *Unsur Perguruan Tinggi.*

No.	Pernyataan untuk direspon atau dijawab	SS	S	C	TS	STS
	Kualitas Pelayanan Pemerintah					
1.	Mudah menjalin hubungan kerja sama/bekerja bersama dengan pemerintah daerah dengan unsur masyarakat jasa konstruksi					
2.	Mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah daerah terkait jasa konstruksi					
3.	Puas akan layanan pemerintah daerah terkait jasa konstruksi					
4.	Pemerintah memberikan layanan melebihi dari harapan.					
5.	Merasakan dampak positif dari regulasi/program/kegiatan pemerintah.					
6.	Puas akan penyelenggaraan forum jasa konstruksi.					
7.	Puas akan hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.					
8	Merasakan dampak dari hasil dari penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.					
	Kompetensi Pegawai					
1.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi mampu memahami tentang bidang yang ditekuni.					
2.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi merupakan orang yang profesional.					
3.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan pelayanan secara efisien.					

4.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berusaha keras/proactive memberikan layanan terbaik.					
5.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi berhati-hati, menghindari kesalahan (akurasi) dan memperbaiki kesalahannya.					
6.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki keahlian komunikasi yang baik.					
	Etika					
1.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaannya dengan jujur.					
2.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi memberikan perlakuan adil.					
3.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi bertanggungjawab dalam penyelesaian masalah.					
4.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi menjalankan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) / tidak memiliki konflik kepentingan.					
5.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi tidak penerima hadiah/barang/jasa (gratifikasi) dari masyarakat guna mendapatkan layanan.					
6.	Pegawai di pemerintahan yang menangani bidang jasa konstruksi dapat menjaga kerahasiaan data privasi dari pengguna layanan.					

Kepercayaan Masyarakat

No.	Pernyataan untuk direspon atau dijawab	SS	S	C	TS	STS
	Kepercayaan Disposisional					
1.	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi peduli dengan kepuasan dari masyarakat pengguna layanan					
2.	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi dapat bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya					

3.	Percaya bahwa pegawai pemerintah yang menangani bidang jasa konstruksi memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dengan baik.					
4.	Yakin untuk tetap menggunakan layanan dari pemerintah selama tidak menemukan hal yang yang mengecewakan					
Kepercayaan Institusional						
1.	Senang dan percaya menggunakan layanan terkait jasa konstruksi					
2.	Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan butuhkan saat ini.					
3.	Percaya bahwa pelayanan yang diberikan sesuai kewenangan berdasarkan UU.					
4.	Mengandalkan pembinaan jasa konstruksi melalui pemerintah daerah.					
5.	Percaya terhadap pemerintah sebagai perantara dan regulator terkait layanan jasa konstruksi					
6.	Percaya terhadap pemerintah sebagai penyelenggara Forum Jasa Konstruksi (FJK)					
7.	Percaya terhadap pemerintah sebagai pembina jasa konstruksi					
Kepercayaan Interpersonal						
1.	Percaya terhadap regulasi yang sudah berjalan pada sektor jasa konstruksi					
2.	Percaya terhadap mekanisme pengambilan kebijakan dalam pembuatan regulasi jasa konstruksi					
3.	Percaya terhadap <i>output</i> kebijakan dalam penyelenggaraan FJK					
4.	Percaya terhadap tindak lanjut hasil FJK oleh pemerintah daerah					

Partisipasi Masyarakat

No.	Pernyataan untuk direspon atau dijawab	SS	S	C	TS	STS
	Penerimaan pelayanan					

1.	Memiliki niat/bermaksud untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK).					
2.	Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika mempunyai kepentingan/maksud tertentu.					
3.	Menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK) merupakan salah cara untuk mengutarakan aspirasi.					
4.	Menghadiri kembali Forum Jasa Konstruksi (FJK) jika diadakan kembali.					
	Pengalaman yang dipengaruhi oleh kontribusi awal					
1.	Membagikan pengalaman selama mengikuti Forum Jasa Konstruksi (FJK)					
2.	Menyebarkan hasil dari Forum Jasa Konstruksi (FJK) ke masyarakat jasa konstruksi lainnya					
3.	Mengajak teman untuk menghadiri Forum Jasa Konstruksi (FJK)					
4.	Berkontribusi ke kegiatan Forum Jasa Konstruksi (FJK)					

Pertanyaan Jawaban **71** Setelan

71 jawaban

[Lihat di Spreadsheet](#)

Tidak menerima jawaban

Pesan untuk responden

Formulir ini tidak menerima jawaban lagi

Ringkasan **Pertanyaan** Individual

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Lengkap

71 jawaban

Suryanti Aswar
Chrestella J Hutauruk,S.H.,M.H
Sholehah
Ardhi Winata